

KATA PENGANTAR



Om Swastyastu,

Puji syukur angayu bagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunanNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 yang merupakan Laporan Kinerja di akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kami juga patut bersyukur dan merasa bangga karena berkat komitmen serta kerja keras, di tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Badung mendapat kepercayaan untuk memaparkan succes story penguatan akuntabilitas Kinerja Kabupaten Badung langsung di hadapan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Bapak Yudi Crisnandi yang sekaligus memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Badung, hal ini tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi segenap jajaran kami untuk mewujudkan Budaya Kinerja di Kabupaten Badung.

Secara substansi LKjIP Pemerintah Kabupaten Badung ini merupakan pelaporan kinerja di akhir periode RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung selama 5 (Lima) Tahun.

Disamping itu pula, penyusunan LKjIP ini dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (***Result Oriented Government***).

Kami berharap LKjIP ini mampu memberikan gambaran keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2010-2015, sekaligus bahan evaluasi untuk penyempurnaan target kinerja di masa RPJMD Kabupaten Badung yang baru periode Tahun 2016-2021.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP ini, khususnya kepada Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia atas bimbingan dan pembinaanya selama ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Badung dapat membangun sistem Akuntabilitas Kinerja dengan baik dan telah mendapat hasil evaluasi AKIP BB dengan nilai 75,89, kami berkomitmen untuk dapat mempertahankan predikat tersebut dan bekerja keras untuk bisa lebih meningkatkan lagi dimasa-masa mendatang.

Sekian dan Terima Kasih

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 22 Maret 2016

Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Kata Pengantar



OM SWASTIASTRU

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan, tuntunan dan perkenannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang dilaporkan tahun 2016 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung mentaati segala peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, LKjIP ini telah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, LKjIP tahun 2015 ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis karena sebagai tahun terakhir upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan sesuai RPJMD 2010 – 2015. Secara umum penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sampai dengan akhir tahun 2015 di Kabupaten Badung telah berhasil mencapai kemajuan yang ditunjukkan dengan capaian kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Ringkasan eksekutif LKjIP Tahun 2015 ini. Kondisi ini diperkuat pula dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2011 – 2015 sebagai bentuk apresiasi dari kesungguhan Pemkab Badung melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian disamping meraih berbagai kemajuan, tentu masih ada beberapa kekurangan yang perlu terus disempurnakan , ada harapan – harapan masyarakat yang belum bisa diwujudkan karena berbagai alasan dan pertimbangan yang bersifat teknis. Berkenaan

dengan hal tersebut, sebagai Bupati Badung yang baru, Saya berkomitmen terhadap beberapa indicator sasaran yang belum terwujud akan tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan dalam RPJMD 2016 – 2021, serta terus berupaya untuk semakin memperkuat penerapan system akuntabilitas kinerja guna terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Badung.

Besar harapan kami agar laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menyusun RPJMD 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Badung yang kita cintai ini.

BADUNG MANGUPURA, KIRANG LANGKUNG TITIANG NUNAS PENGAMPURA

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH,OM

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
A. Pendahuluan	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Program Reformasi Birokrasi.....	2
1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	3
2. Pelatihan Perubahan POla Pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set)	3
3. Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3
4. Pembentukan LPSE	3
5. Pembentukan ULP.....	4
D. Program Inovasi Daerah.....	4
- e-Musrenbang dan e-Planning	4
- e-monev	4
- e-sakip	5
- Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja (2011-2015).....	5
- Capaian Kinerja Tahun 2015.....	6

A. Pendahuluan

Secara umum sasaran reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah daerah dan instansi pemerintah sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi yang diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented Governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Mengingat tahun 2015 merupakan tahun akhir dari upaya pencapaian Tujuan dan sasaran strategis RPJMD tahun 2010 – 2015, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya selama kurun waktu 5 (Lima) tahun atas kinerja tahun 2011 – 2015.

Laporan Kinerja ini juga menjadi media pertanggungjawaban kepada pemerintah atasan dan kepada publik secara transparan dan akuntabel sekaligus sarana evaluasi serta alat kendali untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung di tahun berikutnya.

Data dan informasi capaian kinerja, keberhasilan / kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang semakin baik, terlebih lagi tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Badung berkewajiban untuk menyusun RPJMD 2016 - 2021 sebagai dokumen perencanaan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

C. Program Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, terukur dan professional.

Secara sederhana keberhasilan reformasi birokrasi sesungguhnya bisa dibuktikan dengan mudah yaitu bagaimana dapat memberi bukti kepada masyarakat akan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi baru bisa dikatakan berhasil apabila terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang baik.

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi melalui berbagai upaya antara lain :

1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

yaitu rencana rinci tahapan-tahapan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu Lima tahun ke depan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan

reformasi birokrasi dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 90 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

2. Pelatihan Perubahan Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set)

Sebagai implementasi salah satu program Nawa Cita perubahan karakter bangsa atau revolusi mental bagi segenap jajaran aparatur sipil Negara di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. Pelatihan menekankan pentingnya melakukan perubahan yang dapat dimulai dari diri sendiri khususnya berkenaan dengan pola pikir (*mind Set*) untuk menumbuhkan budaya kerja (*culture Set*) yang mendorong munculnya perubahan kearah yang lebih baik / Reformasi Birokrasi.

3. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Merupakan salah satu langkah kongkrit implementasi program reformasi birokrasi pada unit kerja di Kabupaten Badung melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara formal pencanangannya dilakukan oleh Menteri PAN dan RB tanggal 5 Juni 2015.

4. Pembentukan LPSE

Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, transparan, persaingan sehat dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung telah mendirikan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1784/01/HK/2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. LPSE telah mampu mewujudkan fungsi keberadaannya sebagai sarana mempertemukan penyedia barang/jasa secara elektronik dalam rangka mencegah KKN dan menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung.

5. Pembentukan ULP

Dalam upaya mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan

barang / jasa pemerintah yang jumlahnya cukup besar, Pemerintah Kabupaten Badung telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 70 tahun 2011. Pembentukan ULP bertujuan agar proses pengadaan barang / jasa pemerintah dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari praktek KKN. ULP Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai ULP Percontohan tingkat nasional oleh LKPP.

D. Program Inovasi

Untuk mempercepat program reformasi birokrasi di Kabupaten Badung khususnya berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran reformasi birokrasi peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, ada beberapa program inovasi daerah yang telah dilaksanakan antara lain:

- E- Musrenbang dan E- Planning

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, tepat sasaran dan transparan dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun system perencanaan berbasis tehnologi informasi yaitu e-musrenbang dan e-planning. Melalui program BEST PLANNING (Badung E-Government system & Tehnology) ini, kualitas perencanaan daerah diharapkan akan semakin meningkat dan terarah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan di Kabupaten Badung.

- E-Monev

Mengingat pentingnya peran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Badung mengembangkan system Monitoring dan Evaluasi yang berbasis *web dan online (e-Monev)* . Dengan system ini, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan serta memastikan terbangunnya keterkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran.

- E- Sakip

Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun system akuntabilitas kinerja yang semakin berkualitas, mudah, cepat dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah membangun dan menerapkan pelaporan kinerja berbasis elektronik (e- Sakip). Melalui e – Sakip ini diharapkan dapat mewujudkan pelaporan kinerja yang handal, dapat dipercaya, tepat waktu karena SKPD dapat melaporkan kinerjanya secara elektronik, meningkatkan fungsi monitoring dan pengendalian capaian kinerja organisasi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Tabel 1 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT NILAI 2009-2014	BOBOT NILAI 2015	Nilai evaluasi tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Perencanaan Kinerja	35	30	10,31	19,45	23,05	25,19	24,92
2.	Pengukuran Kinerja	20	25	2,93	10,42	13,46	13,96	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	15	15	7,63	8,48	9,75	10,93	11,08
4.	Evaluasi Kinerja	10	10	1,02	4,96	6,22	5,80	6,57
5.	Capaian Kinerja	20	20	12,39	11,99	13,44	13,24	14,34
NILAI EVALUASI		100	100	34,27	55,31	65,92	69,12	75,89
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA				C	CC	B	B	BB

- Capaian Kinerja

**Tabel 2 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai sesuai RPJMD	Capaian Kinerja	Kinerja
1	2	3	4		5	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti	1. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Srad	27 Upacara	117 Upacara	100%	100%
		2. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Bhakti	27 Kegiatan	117 Kegiatan	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 1 :				
2	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali	1. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yg ditetapkan	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
		2. Persentase sekaa teruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	10.90 % (58 sekaa teruna)	14.66% (78 sekaa teruna)	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 2 :				
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak usia sekolah yg tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 3 :				
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat	Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jejang SMA/MA/SMK	81,30%	100%	99,37%	99,37%

	melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Rata2 kinerja indikator tujuan 4 :				99,37%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	1. Angka kesakitan	634 per 100.000 penddk	200 per 100.000 penddk	353,34 per 100.000 penddk	23,33%
		2. Angka kematian	-	-	-	91,74%
		3. Persentase Balita Gizi buruk	0,47	0,4	0,2	150,0%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 5 :				89,71%
6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu	Cakupan layanan administrasi kependudukan	83.38%	98.75%	101.35%	103.00%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 6 :				103%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati	Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 RTS	(4.326 RTS) 32,54%	(4.326 RTS) 32,54%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 7 :				100%
8	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan	1. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung;	14.305	5.600	5.534	98,82%
		2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.017.947,01	US\$ 590.140.152,668	US\$ 368.197.191,86	62,39%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 8 :				80,61%
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan	162.371,5 ton	174.450 ton	177.004 ton	109,01%
		2. Peningkatan populasi peternakan				

		3. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	1.607.998 ekor	1.450.000 ekor	1.486.869 ekor	102,54 ekor
			1.607.998 ekor	1.450.000 ekor	1.486.869 ekor	102,54 %
			31.228,10 ton	157.556,50 ton	148.913,13 ton	94,51 %
		Rata2 kinerja indikator tujuan 9 :				
10	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	1.764	1.500	1.658	89,46%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 10 :				89,46%
11	Terjaminnya terwujudnya good government dan clean government	1. Opini pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	100%
		2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	35,72	70	75,89	108,41%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 11 :				104,21%
12	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang	1. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten	3 dok	30 dok	30 dok	100%
		2. Persentase luas kawasan bebas banjir	99,86%	99,92%	99,96%	100,03%
		Rata2 kinerja indikator Tujuan 12 :				100,02%

13	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah	1. Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45,82%	60,00%	65,01%	108,34%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 13 :				108,34%
14	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu				
		COD air sungai	110,2 MG/L	<50	26,74	146,72
		BOD air sungai	5,2	<6	6,10	97,83
		BOD air laut	6,03	<10	8,6	116,80
		Rata2 kinerja indikator tujuan 14 :				120,45%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian tujuan yang dijabarkan melalui masing-masing indikator sasaran sebagai berikut

Tabel 3.2
**Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai	Target th 2015 /satuan	Realisasi th 2015	% Capaian Kinerja th 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	100 %
	Rata-rata kinerja sasaran 1:		0	0	0	0	100%
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	16,39% (20 ds adat)	3,27 (4)	3,27 (4)	100%
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	3,68% (20 sekaa teruna)	0,73 (4)	0,73 (4)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 2 :						100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100	100	100	100%
		5. Angka Melek Huruf	92,92 %	100	100	95,71	95,71%
	Rata-rata kinerja sasaran 3 :						97,86%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 4 :						100%

5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	62.16	99.83	60/100.000	99.83	33,62%
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6.71	3.87	4,5/1.000	3.87	114,00%
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5.1	3.62	5/1.000	3.62	127,60%
	Rata-rata kinerja sasaran 5 :						91,74%
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat KabupatenBadung.	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	0	46.15	45	46.15	102,56%
		11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 6 :						101,28%
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	98,08	97.74	95	97.74	102,88%
		13. Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100%
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga		80.18	70	80.18	114,54%
	Rata-rata kinerja sasaran 7 :						105,81%
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: 1. Prosentase keluarga yang memiliki KK	93.60	100	100	100	100%
		2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	90.62	100	100	90.02	90.02%
		3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	65.91	95	95	99.99	105.25%

		4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	100	100	115.39	115.39%
	Rata-rata kinerja sasaran 8 :						102,80%
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.13	0.12	0.12	0.12	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 9 :						100%
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.29 4 rts	4.326 RTS (32,54%)	600 RTS (4,51%)	600 RTS (4,51%)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 10 :						100%
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	88 koperasi)	100 %(332 Koperasi)	21.68% (72 Koperasi)	30.10% (100 Koperasi)	138,8 %
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.0 17.49 7,01	US\$ 590.140. 152,668	US\$ 120.152. 926,503	US\$ 51.860 .534,1 6	43,16%
	Rata – rata kinerja sasaran 11 :						90,98%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	180.9 23	873.446	174.450	177.00 4	101,47%
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	63.93 Kw/Ha	63,18 Kw/Ha	64Kw/Ha	63.18K w/Ha	98,72%

	Rata-rata kinerja sasaran 12 :						100,10%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan		1.486.081	1.450.000	1.486.081	102,49%
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan		149.766,9	5.061,87	7.097,59	140,22%
	Rata-rata kinerja sasaran 13 :						121,36
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	1764	3158	1.500	1.658	86,98%
	Rata-rata kinerja sasaran 14 :						86,98%
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	25%	67.92%	65%	67.92%	104,49%
	Rata-rata kinerja sasaran 15 :						104,49%
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100%
		27. Peningkatan pendapatan asli daerah	936.887.975.37	2.990.965.598	2.302.169.811	2.990.965.598	129,92%
	Rata-rata kinerja sasaran 16 :						114,96%
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35.72	70,0	70,0	75.89	108,41%
	Rata-rata kinerja sasaran 17 :						108,41%

18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	3	30	3	4	133,33%
		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	89.14	94.58	94.68	94.72	100,04%
	Rata-rata kinerja sasaran 18 :						116,69%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguan lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45.82	65.01	60	65.01	108,34%
	Rata-rata kinerja sasaran 19 :						108,34%
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	31	0,64	0.60	0,61	98,3%
		33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	56,86	80,39	78.43	80,39	102,5%
	Rata-rata kinerja sasaran 20 :						100,48%
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	10.2	26.74	50	26,74	146,5%
		• COD air sungai					
		• BOD air sungai	5.2	6.1	6	6,1	97,83%
		• BOD air laut	6.03	10	10	8,6	116,8%
		Sub Rata-rata					120,38%
		35. Persentase sumberdaya udara yang dipantau	74,63	400	400	23.48	195,71%

		yang memenuhi standar baku mutu					
		36. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	216	240	316	131,67%
	Rata-rata kinerja sasaran 21 :						149,25%

F. Penutup

Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatanNYA kepada kita semua dalam mengemban amanat dan melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

Mangupura, 22 Maret 2016
Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 3.1	Desa Adat Yang Memenuhi Tatanan Yang Ditetapkan..... 47
Grafik 3.2	jumlah penduduk usia sekolah dan penduduk yang sudah mengenyam pendidikan Tahun 2011-2014 55
Grafik 3.3	Perkembangan capaian kinerja Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah tahun 2013 – 2015..... 56
Grafik 3.4	Perkembangan Penduduk Laki-Laki (Lanjut Usia) Di Kabupaten Badung tahun 2011-2015 57
Grafik 3.5	Perkembangan Penduduk Perempuan (Lanjut Usia) Di Kabupaten Badung tahun 2011-2015 57
Grafik 3.6	Realisasi angka melek huruf tahun 2011-2015 58
Grafik 3.7	Angka lulusan siswa tahun ajaran 2014/2015 dan siswa baru tahun ajaran 2015/2016 di Kabupaten Badung 61
Grafik 3.8	Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah tahun 2011 – 2015 62
Grafik 3.9	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 66
Grafik 3.10	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2015 67
Grafik 3.11	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2011- 2015 68
Grafik 3.12	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2015 69
Grafik 3.13	Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2011- 2015 70
Grafik 3.14	Penyebab kematian ibu melahirkan di Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2015 71
Grafik 3.15	Tingkat Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2015..... 77
Grafik 3.16	Tingkat Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015 79
Grafik 3.17	Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015 82

LKJIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Grafik 3.18	Cakupan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015	84
Grafik 3.19	Capaian PHBS Per Indikator di Kabupaten Badung Tahun 2015	85
Grafik 3.20	Cakupan layanan administrasi kependudukan	94
Grafik 3.21	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun dari tahun 2011-2015	98
Grafik 3.22	Laju Pertumbuhan Kabupaten Badung Tahun 2011-2014.....	101
Grafik 3.23	Persentase penurunan penyandang masalah sosial Tahun 2011-2015.....	103
Grafik 3.24	Capaian Indikator Persentase koperasi Sehat dan berkualitas dari tahun 2011-2015.....	109
Grafik 3.25	Nilai Ekspor UKM dan realisasi Tahun 2011-2015	111
Grafik 3.26	Tingkat Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)	116
Grafik 3.27	Jumlah populasi peternakan Tahun 2014-2015 di Kabupaten Badung	119
Grafik 3.28	Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung Tahun 2015 .	120
Grafik 3.29	Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2011-2015	126
Grafik 3.30	Capaian Indikator persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima Tahun 2011 s/d 2015	131
Grafik 3.31	Capaian Indikator Opini Pemeriksaan BPK Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung	135
Grafik 3.32	Capaian Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung.....	137
Grafik 3.33	Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung	140
Grafik 3.34	Target dan Realisasi Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	148
Grafik 3.35	Perkembangan capaian kinerja Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung,dari tahun 2011 – 2015.	154
Grafik 3.36	Capaian Indikator Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung.....	158

LKJIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Grafik 3.37	Capaian indikator persentase persimpangan yang terpasang traffic light Tahun 2011-2014 di Kabupaten Badung	160
Grafik 3.38	Kualitas Air Sungai (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	166
Grafik 3.39	Kualitas Air Sungai (COD) di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	168
Grafik 3.40	Kualitas Air Laut (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	171
Grafik 3.41	Kualitas Udara (NO2) di kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015	174
Grafik 3.42	Perusahaan yang menggunakan pengelolaan limbah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.....	177
Grafik 3.43	Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015	180

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 5
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung 11
Tabel 2.2	Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung 13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung 19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2015 26
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan..... 33
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 2
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja tujuan 1 Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti 42
Tabel 3.4	Analisis Capaian Sasaran Terwujudnya Kerukunan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat di Kabupaten Badung..... 43
Tabel 3.5	Pencapaian indikator jumlah konflik SARA di kabupaten Badung dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 45
Tabel 3.6	Capaian indikator tujuan 2 Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti..... 46
Tabel 3.7	Analisis Capaian Sasaran Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras. 47
Tabel 3.8	Pembinaan Sekaa teruna Tahun 2011-2015..... 50
Tabel 3.9	Realisasi akumulasi pencapaian indikator Sasaran Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh adat dan budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras sampai dengan tahun 2015 Dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD..... 51
Tabel 3.10	Capaian indikator kinerja tujuan 3 Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun 53

Tabel 3.11	Analisis Capaian Sasaran Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah.....	53
Tabel 3.12	Capaian Indikator sasaran Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun dan Angka melek huruf dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015	58
Tabel 3.13	Capaian indikator kinerja tujuan 4 Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/SMK.....	60
Tabel 3.14	Analisis capaian Sasaran Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.....	61
Tabel 3.15	Capaian Indikator sasaran Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015	62
Tabel 3.16	Capaian indikator kinerja Tujuan 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung.....	63
Tabel 3.17	Analisis capaian Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita pada Akhir RPJMD Tahun 2015	
Tabel 3.18	Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita pada Akhir RPJMD Tahun 2015	72
Tabel 3.19	Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terstandarisasi, Mulai Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, Dan Unit Layanan Kesehatan Lainnya Denga Biaya Pelayanan Yang Terjangkau Oleh Masyarakat Kabupaten Badung	72
Tabel 3.20	Pencapaian Indikator Sasaran Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan yang Prima Dan Terstandarisasi, Mulai Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, dan Unit Layanan Kesehatan Lainnya dengan Biaya Pelayanan yang Terjangkau oleh Masyarakat Kabupaten Badung pada Akhir RPJMD Tahun 2015	75
Tabel 3.21	Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	76
Tabel 3.22	Tingkat Kemandirian Posyandu Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2015.....	78
Tabel 3.23	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2015.....	81
Tabel 3.24	Cakupan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2015.....	83

Tabel 3.25	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Akhir RPJMD Tahun 2015	86
Tabel 3.26	Capaian indikator kinerja tujuan 6 Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu ..	87
Tabel 3.27	Analisis Capaian Sasaran 8 Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	88
Tabel 3.28	Tabel kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Badung tahun 2015.....	89
Tabel 3.29	perkembangan capaian kinerja Pelayanan Kartu Keluarga th 2011-2015.....	90
Tabel 3.30	Kepemilikan KTP di Kabupaten Badung tahun 2015.....	91
Tabel 3.31	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2011-2015.....	91
Tabel 3.32	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Badung tahun 2015.....	92
Tabel 3.33	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Akta Kelahiran Tahun 2011-2015`	92
Tabel 3.34	Jumlah kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Badung tahun 2015.....	93
Tabel 3.35	Pencapaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015	94
Tabel 3.36	Program Pendukung kegiatan dalam tahun 2015	95
Tabel 3.37	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 Tahun.....	96
Tabel 3.38	perkembangan Gen-Re dan PIK KRR dari tahun 2011-2015 ..	97
Tabel 3.39	Capaian Indikator Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Keluarga Berencana Yang Prima Bagi Seluruh Lapisan masyarakat Menuju Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera Bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Badung Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015	99
Tabel 3.40	Capaian indikator kinerja tujuan 7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin ,cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	101
Tabel 3.41	Analisis Capaian sasaran Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan	

	penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	102
Tabel 3.42	Perkembangan pemanfaatan bantuan UEP dari tahun 2011-2015	104
Tabel 3.43	Capaian Indikator Sasaran Persentase Penurunan Penyandang Masalah Sosial Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015	105
Tabel 3.44	Capaian indikator kinerja tujuan 8 Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.....	106
Tabel 3.45	Analisis capaian SasaranMeningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	107
Tabel 3.46	Pertumbuhan Koperasi Di Kabupaten Badung Per-Kecamatan / Pertahun (2011-2015).....	110
Tabel 3.47	Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD	112
Tabel 3.48	Capaian indikator kinerja tujuan 9 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.	113
Tabel 3.49	Meningkatnya kuantitas , kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan.....	114
Tabel 3.50	Capaian Sasaran Meningkatnya kuantitas,kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan pada akhir RPJMD Tahun 2015	117
Tabel 3.51	Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan.	117
Tabel 3.52	Populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015	120
Tabel 3.53	Populasi ternak	121
Tabel 3.54	Produksi Perikanan.....	122
Tabel 3.55	Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produksi Hasil Komoditi Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015	122
Tabel 3.56	Capaian indikator kinerja tujuan 10 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.....	124

LKJIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Tabel 3.57	Analisa Capaian Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Tahun 2013 – 2015	125
Tabel 3.58	Capaian Indikator Jumlah Pelanggaran kemandirian dan ketertiban Tahun 2011 s/d 2015	127
Tabel 3.59	Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Perda dan Perbup di Kabuapten Badung Tahun 2011-2015...	127
Tabel 3.60	Capaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Perda dan Perbup Tahun 2013-2015	130
Tabel 3.61	Capaian indikator kinerja tujuan 11 Terjaminnya terwujudnya good government and clean government.	133
Tabel 3.62	Analisis Capaian sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan daerah Yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu	133
Tabel 3.63	realisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2014-2015	137
Tabel 3.64	Perbandingan PAD Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Tahun 2015	138
Tabel 3.65	sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan daerah Yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015	138
Tabel 3.66	Analisis Capaian sasaran terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel.....	139
Tabel 3.67	Nilai Akuntabilitas Kabupaten Badung dari tahun 2011-2015 Beserta Bobot per masing-masing Indikator	142
Tabel 3.68	Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisien, Transparan, Profesional, Responsif Dan Akuntabel tahun 2014 Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015	143
Tabel 3.69	Capaian indikator kinerja tujuan 12 Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang.	144

Tabel 3.70	Analisi Pencapaian Sasaran 18 Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Yang Sesuai Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kawasan Strategis Kabupaten	145
Tabel 3.71	Saluran irigasi Kabupaten Badung	148
Tabel 3.72	Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Yang Sesuai Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kawasan Strategis Kabupaten Tahun 2014 Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015	149
Tabel 3.73	Capaian indikator kinerja tujuan 13 Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah..	150
Tabel 3.74	Analisis Capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Pelaku Pembangunan Lainnya Untuk Membangun Sesuai Dengan Rencanatata Ruang.....	152
Tabel 3.75	Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Pelaku Pembangunan Lainnya Untuk Membangun Sesuai Dengan Rencanatata Ruang.....	155
Tabel 3.76	Analisi pencapaian sasaran Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang seimbang antar wilayah	155
Tabel 3.77	Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Yang Seimbang, Berkelanjutan Dan Sinergisitas Keterpaduan Kebijakan Dan Program Pembangunan Akan Ditempuh Melalui Strategis Pembangunan Yang Seimbang Antar Wilayah Tahun 2015	161
Tabel 3.78	Capaian indikator kinerja tujuan 14 Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitaslingkungan hidup	162
Tabel 3.79	Analisis Capaian Sasaran 21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	163
Tabel.3.80	Perkembangan hasil pemantauan sumberdaya air sungai yang memenuhi baku mutu air di Kabupaten Badung dari tahun 2011-2015	165
Tabel.3.81	COD per sungai Tahun 2011-2015	167
Tabel.3.82	BOD per sungai Tahun 2011-2015	169
Tabel.3.83	Hasil Pemanataun Parameter BOD Air Laut di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	171

*LKjIP KABUPATEN BADUNG*TAHUN2015

Tabel.3.83	Parameter NO2 per wilayah di Kab Badung Tahun 2011-2015	173
Tabel.3.84	Realisasi akumulasi Program kegiatan Tahun 2011-2015	
Tabel.3.85	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelestarian Lingkungan Hidup Di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Menuju Badung Yang Bersih Dan Hijau Tahun 2014 Dibandingkan Target Rpjmd Tahun 2015.....	177
Tabel.3.86	Program Pendukung Indikator , Pagu Dan Realisasi.....	181

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 serta mengacu pada Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKjIP Tahun 2015 merupakan pelaporan kinerja di akhir periode RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung selama 5 (Lima) Tahun sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015.

Pencapaian target kinerja selama lima tahunan disajikan dengan informasi ketercapaian Tujuan serta pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Badung di akhir masa RPJMD Tahun 2010-2015 kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru.

Penyusunan LKjIP Tahun 2015 ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ;
10. Reviu Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.

1.2. Struktur Organisasi

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum diterbitkan Juknis dan Juklak maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah;
3. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum dan HAM
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Administrasi Perekonomian
 - c. Asisten Administrasi Umum membidangi :
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Umum
 - Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah
 - Bagian Humas dan Protokol
 - Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4. Lima Staf Ahli terdiri dari :
 - Bidang Hukum dan Politik;
 - Bidang Pemerintahan;
 - Bidang Pembangunan;
 - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Lima belas Dinas Daerah terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Dinas Kebudayaan;
 - Dinas Pariwisata;
 - Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - Dinas Cipta Karya;
 - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;
 - Dinas Pemadam Kebakaran;
 - Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

6. Sebelas Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - Badan Lingkungan Hidup;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Kantor Perpustakaan Daerah;
 - Kantor Arsip Daerah;
 - Kantor Pemberdayaan Perempuan;
 - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Inspektorat
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
10. Pengembangan
11. 6 Kecamatan terdiri dari :
 - Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Abiansemal;
 - Kecamatan Mengwi;
 - Kecamatan Kuta Utara;
 - Kecamatan Kuta;
 - Kecamatan Kuta Selatan;
12. 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading, Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedongan, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran.
13. 47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Cangu, Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana, Mengwitani, Pinarungan, Gulingan, Kekekan, Munggu, Sembung, Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba, Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh, Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan, Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan.
14. 2 Lembaga lain yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Prioritas Pembangunan Daerah.

Tema Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah : **“PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Tahun 2015 antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Peningkatan Perluasan Akses Layanan Kesehatan
3. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Peningkatan Kecakapan Hidup
4. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi, Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan
6. Peningkatan Mutu Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Revitalisasi Usaha Ekonomi Kreatif Skala Mikro, Kecil dan Menengah
8. Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Pemasaran Hasil Pertanian Dalam Arti Luas
9. Pengembangan Kepariwisata Berkualitas dan Pelestarian Budaya Bali

Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 telah sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang menetapkan 9 bidang Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2015 yang menetapkan 10 prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 1.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	2.	3.
1.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.
2.	Peningkatan Perluasan Akses Layanan Kesehatan	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita
		Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
		Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
		Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung

3.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Peningkatan Kecakapan Hidup	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.
		Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja
		Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.
4.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi, Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
		Meningkatnya peran pemerintahan daerah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
		Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu
		Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel
		Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perumusan kebijakan publik
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
		Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau
		Terwujudnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup
		Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM
6.	Peningkatan Mutu Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai

		dengan rencana tata ruang
7.	Revitalisasi Usaha Ekonomi Kreatif Skala Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung
8.	Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Pemasaran Hasil Pertanian Dalam Arti Luas	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung
9.	Pengembangan Kepariwisata Berkualitas dan Pelestarian Budaya Bali	<p>Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung</p> <p>Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras</p> <p>Terwujudnya kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan Sastra Agama Hindu yang dilandasi oleh Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat dalam melaksanakan kehidupan beragama</p>

1.4. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Akhir Periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Dengan melihat keberhasilan dari Tujuan RPJMD serta target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Kabupaten badung di akhir periode RPJMD Tahun 2010-2015. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan penekanan kepada aspek strategis, serta struktur organisasi ;
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas / ikhtisar perjanjian kinerja di tahun 2015 dan perjanjian kinerja dalam 5 (lima) tahun.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015,
 - A. Sub ini menyajikan tujuan yang ingin dicapai sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD 2010 – 2015 dan

menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tahunan dari Tahun 2011 – 2015 sesuai hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dan sasaran strategi yang terkandung didalamnya dilakukan analisa capaian kinerja sesuai dengan lampiran II pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup,
menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD 2010 – 2015 ;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna di mulai dari perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

2.1.1. Visi

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kabupaten Badung menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat kompleks dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan dan kesenjangan pembangunan Badung Utara dan Badung Selatan. Oleh karenanya untuk membangun Badung yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD Tahun 2010-2015 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Badung, maka **visi** yang ingin dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung adalah :

“Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah TRI HITA KARANA.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Badung “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA”, maka rumusan misi Kabupaten Badung sebagai penjawantahan dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Perhyangan:
 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.
2. Fungsi Pawongan:
 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.
 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.
 5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat.
 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Government*).
3. Fungsi Palemahan:
7. Memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah.
 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya.
 9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran (Obyektif) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 Kabupaten Badung**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA		
Misi ke-satu: Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.		
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung
2.	Meningkatnya pelestarian Adat dan	2. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten

	Budaya Bali.	Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras
Misi ke-dua: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.		
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.	3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	4. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.	5. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita
		6. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
		7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Misi ke-tiga: Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.		
6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.	8. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
		9. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	10. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.
Misi ke-empat: Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan		
8.	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	11. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	12. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan
		13. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan
Misi ke-lima: Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat		
10.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
		15. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
Misi ke –enam: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government)		

11.	Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government</i> .	16. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
		17. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel
Misi ke-tujuh: Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah		
Misi ke-delapan: Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya.		
12.	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.	18. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
13.	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	19. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang
		20. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.
Misi ke-semilan: Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup.		
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Badung tahun 2010–2015, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2
**Visi, Misi, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
 Kabupaten Badung**

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
Misi ke-satu: Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.			
1	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	Peningkatan pembinaan Agama guna pengembangan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai ajaran Agama, Adat dan Budaya Bali di masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan ajaran Agama Hindu, Adat, Budaya Bali dan kerukunan umat beragama dan penganut aliran kepercayaan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
2	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.	Penguatan pemahaman Adat dan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai Agama dan Adat Daerah. 2. Meningkatkan pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di masyarakat.
Misi ke-dua: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.			
3	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah	Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan. 2. Mewujudkan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. 4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat
4	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 3. Meningkatkan keberaksaraan
5	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar dan rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna terhadap ibu, bayi dan anak
6	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Badung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan RSUD. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
	lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung		3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
7	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Pengembangan Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
Misi ke-tiga: Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.			
8	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkungan sampai pemerintah kabupaten. 2. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif. 3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sector pembangunan. 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.
9	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung.	Peningkatan pembangunan kependudukan menuju keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 2. Meningkatkan keseimbangan sebaran penduduk antara wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
10	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro perdesaan terutama bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, dan korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro perdesaan. 2. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial, anak terlantar, lansia, penyandang cacat, bantuan korban bencana alam dan sosial. 3. Meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat termasuk masyarakat

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
			miskin, penyandang cacat dan sosial secara adil dan merata
			4. Penciptaan Lapangan Kerja yang bersifat labour intensive (Padat Karya).
Misi ke-empat: Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan			
11	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	Pemberdayaan pertanian, UMKM, dan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya	1. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata. 2. Meningkatkan daya saing UMKM, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya.
12	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	Pemberdayaan pertanian, perkebunan dan Kehutanan	1. Revitaliasasi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan
13	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	Pemberdayaan sektor peternakan, perikanan dan kelautan	1. Revitalisasi sektor peternakan, perikanan dan kelautan
Misi ke-lima: Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat			
14	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Mewujudkan system keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai denganketentuan undang-undang	1. Meningkatkan system keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin fungsinya system keamanan swakarsa serta system penegakan hokum sesuai dengan nilai-nilai local serta tetap menjamin hak asasi manusia.
15	Meningkatnya Pelayanan Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	Meningkatnya pelayanan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang	2. Meningkatkan system pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan pemerintah Daerah, Polri, dan TNI (atas permintaan) serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusakan massa dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
Misi keenam: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>Good Governance & Clean Government</i>)			
16	Terwujudnya tata kelola	Peningkatan tata kelola keuangan	1. Meningkatkan tata kelola dan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
	keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	daerah	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel, dan berkeadilan
17	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel.	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi
Misi ke-tujuh: Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah			
Misi ke-delapan: Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya.			
18	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawaskan kondisi lokal masyarakat)
19	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah	1. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure)
20	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang dan	Pembangunan yang seimbang antar wilayah	2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2.	3.	
Visi: Melangkah bersama membangun Badung yang Shanti dan Jagaditha berdasarkan TRI HITA KARANA			
	sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan, akan ditempuh melalui strategi pembangunan yang seimbang antar wilayah		
Misi kesembilan: Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup.			
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air hujan. 2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam aksi penyelamatan lingkungan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 yang memiliki focus stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung , sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Srada 2. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Bhakti	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA
2. Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.	1. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yg ditetapkan 2. 2Persentase sekaa teruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	3. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>
			3. Persentase sekaa teruna yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>
3. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.	1. Persentase anak usia sekolah yg tuntas wajib belajar 12 tahun	4. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
			5. Angka Melek Huruf
4. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat	1. Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/MA/SMK	5. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.			
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.	1. Angka kesakitan 2. Angka kematian 3. Persentase Balita Gizi buruk	6. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
			8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
			9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
		7. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO
			11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi
		8. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri
13. Cakupan desa siaga aktif			

			14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga
6. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.	1. Cakupan layanan administrasi kependudukan	9. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase keluarga yang memiliki KK; • Prosentase penduduk yang memiliki KTP; • Prosentase kepemilikan akte kelahiran; • Prosentase penduduk yang dilengkapi dengan akte kematian.
		10. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	1. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	11. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial
8. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	1. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung 2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	12. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas
			19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM
9. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan 2. Peningkatan populasi peternakan 3. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	13. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan
			21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)
		14. Meningkatnya kuantitas produksi hasil	22. Jumlah populasi peternakan

		komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan
1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban
		16. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima
1. Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government.</i>	1. Opini pemeriksaan BPK 2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	17. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK
		18. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta	27. Peningkatan pendapatan asli daerah 28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

		pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	
12. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.	1. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten 2. Persentase luas kawasan bebas banjir	19. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten
			30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik
13. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	1. Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	20. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung
			32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)
		21. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program	33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light

		pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	
14. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar 1. baku mutu 2. COD air sungai 3. BOD air sungai 4. BOD air laut	22. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air: <ul style="list-style-type: none"> • COD Air Sungai • BOD Air Sungai • BOD Air Laut
			35. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu
			36. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Badung telah membuat perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015 . Oleh karena itu Indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015.

Perjanjian Kinerja yang sebelumnya disebut Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2014 kemudian diadakan revisi yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2015 karena adanya Reviu Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	Konflik	0
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	3,278
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	0,736
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	%	100
		5. Angka Melek Huruf	%	100
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100
5.	Meningkatnya status kesehatan	7. Angka kematian ibu	kh	60/ 100.000

	ibu, bayi dan balita	melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	kh	4,5/ 1.000
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	kh	5/ 1.000
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	%	45
		11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	%	100
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	95
		13. Cakupan desa siaga aktif	%	100
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	%	70
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	%	100
		1. Prosentase keluarga yang memiliki KK		
		2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	%	100
		3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	100
		4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100

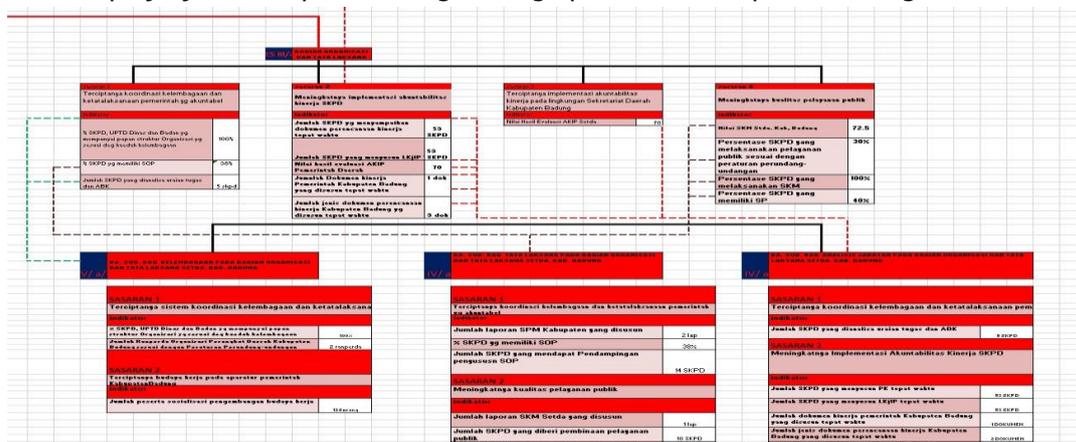
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.12
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	%	67.46
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	%	21.68
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$	120.152.926.503
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	TON	174.450
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	KW/HA	64
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Ekor	1.450.000
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	157.556,05
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Pelanggaran	2.500
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	%	75
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis	26. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	Wtp

	kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	27. Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp	2.302.169.811
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	70
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Dokumen	3
		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	%	94.68
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	%	60
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	(V/C ratio)	0.60
		33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	%	78.43
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	mg/lt	50
		• COD air sungai		
		• BOD air sungai	mg/lt	6
		• BOD air laut	mg/lt	10

		35. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	µg/m ³	400
		36. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	Perusahaan	80

2.4. Cascading Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 telah melaksanakan inovasi dalam hal perjanjian kinerja. Inovasi tersebut adalah penyusunan cascading di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Cascading yang memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan-tahapan didalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat dari pucuk pimpinan sampai staf teknis sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari pada masing-masing aparaturnya di Kabupaten Badung.



Dengan disusunnya cascading di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat mengetahui kegagalan dan keberhasilan dalam pencapaian kinerja SKPD di setiap level eselon.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupten Badung tahun 2010-2015, Visi Pemerintah Kabupaten Badung adalah : " Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana ", Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan posisi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi sebagai implementasi dari konsep Tri Hita Karana, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : Fungsi Prahyangan, Fungsi Pawongan dan Fungsi Palemahan. Dan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Badung, telah ditetapkan Tujuan dengan indikator tujuan serta penjabaran kedalam sasaran strategis dan indikator sasaran.

Pemerintah Kabupaten Badung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015.

Tahun 2015 merupakan masa berakhirnya pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 dan dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang disusun tahun 2016 melaporkan atas ketercapaian Tujuan serta penjabaran melalui alat ukur indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kemudian diadakan evaluasi. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. Dimana Laporan Kinerja setiap tahun sebelumnya memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat kinerja untuk kemudian diadakan evaluasi untuk mengetahui kegagalan dan keberhasilan setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2015 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 14 tujuan, 21 Sasaran dengan 36 indikator dan menetapkan Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai setiap tahun dari tahun 2011 – 2015.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Badung secara umum telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2010 – 2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung sampai tahun 2015 yang merupakan masa berakhirnya RPJMD 2010 – 2015 dilakukan dengan cara *membandingkan antara kondisi awal/kondisi akhir yang ingin dicapai dengan realisasinya, Serta membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dengan realisasinya.* Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja dalam 5 (lima) tahun yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Hasil pengukuran indikator capaian tujuan atas indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Badung

Tabel . 3.1
**Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
 Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai sesuai RPJMD	Capaian Kinerja	Kinerja
1	2	3	4		5	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti	1. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Srad	27 Upacara	117 Upacara	100%	100%
		2. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Bhakti	27 Kegiatan	117 Kegiatan	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 1 :				100%
2	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali	1. Persentase desa adat yang memenuhi tananan yg ditetapkan	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
		2. Persentase sekaa teruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	10.90 % (58 sekaa teruna)	14.66% (78 sekaa teruna)	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 2 :				
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak usia sekolah yg tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 3 :				100%
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jejang SMA/MA/SMK	81,30%	100%	99,37%	99,37%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 4 :				99,37%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	1. Angka kesakitan	634 per 100.000 penddk	200 per 100.000 penddk	353,34 per 100.000 penddk	23,33%

		2. Angka kematian	-	-	-	91,74%
		3. Persentase Balita Gizi buruk	0,47	0,4	0,2	150,0%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 5 :				89,71%
6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu	Cakupan layanan administrasi kependudukan	83.38%	98.75%	101.35%	103.00%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 6 :				103%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati	Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 RTS	(4.326 RTS) 32,54%	(4.326 RTS) 32,54%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 7 :				100%
8	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan	1. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung;	14.305 US\$ 106.017 .947,01	5.600 US\$ 590.140.1 52,668	5.534 US\$ 368.197.1 91,86	98,82% 62,39%
		2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM				
		Rata2 kinerja indikator tujuan 8 :				80,61%
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan	162.371 ,5 ton	174.450 ton	177.004 ton	109,01%
		2. Peningkatan populasi peternakan	1.607.9 98bekor	1.450.000 ekor	1.486.869 ekor	102,54 ekor
		3. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	1.607.9 98 ekor 31.228, 10 ton	1.450.000 ekor 157.556,5 0 ton	1.486.869 ekor 148.913,1 3 ton	102,54 % 94,51 %
		Rata2 kinerja indikator tujuan 9 :				
10	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	1.764	1.500	1.658	89,46%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 10 :				89,46%
11	Terjaminnya terwujudnya good government dan clean government	1. Opini pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	100%
		2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	35,72	70	75,89	108,41%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 11 :				104,21%

12	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang	1. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten	3 dok	30 dok	30 dok	100%
		2. Persentase luas kawasan bebas banjir	99,86%	99,92%	99,96%	100,03%
		Rata2 kinerja indikator Tujuan 12 :				100,02%
13	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah	1. Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45,82%	60,00%	65,01%	108,34%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 13 :				108,34%
14	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu COD air sungai	110,2 MG/L	<50	26,74	146,72
		BOD air sungai	5,2	<6	6,10	97,83
		BOD air laut	6,03	<10	8,6	116,80
		Rata2 kinerja indikator tujuan 14 :				120,45%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian tujuan yang dijabarkan melalui masing-masing indikator sasaran sebagai berikut

Tabel 3.2
**Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai	Target th 2015 /satuan	Realisasi th 2015	% Capaian Kinerja th 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	37. Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	100 %
	Rata-rata kinerja sasaran 1:		0	0	0	0	100%
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	38. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari	28 PEMBI NAAN	16,39% (20 ds adat)	3,27 (4)	3,27 (4)	100%

		39. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	3,68% (20 sekaa teruna)	0,73 (4)	0,73 (4)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 2 :						100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	40. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100	100	100	100%
		41. Angka Melek Huruf	92,92 %	100	100	95,71	95,71%
	Rata-rata kinerja sasaran 3 :						97,86%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	42. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	100	100	100	100	100%
		Rata-rata kinerja sasaran 4 :					
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	43. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	62.16	99.83	60/ 100.000	99.83	33,62%
		44. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6.71	3.87	4,5/ 1.000	3.87	114,00%
		45. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5.1	3.62	5/ 1.000	3.62	127,60%
	Rata-rata kinerja sasaran 5 :						91,74%
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya	46. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	0	46.15	45	46.15	102,56 %

	dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat KabupatenBadung.	47. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 6 :						101,28 %
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	48. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	98,08	97.74	95	97.74	102,88%
		49. Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100%
		50. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga		80.18	70	80.18	114,54%
	Rata-rata kinerja sasaran 7 :						105,81%
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	51. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	93.60	100	100	100	100%
		5. Prosentase keluarga yang memiliki KK					
		6. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	90.62	100	100	90.02	90.02%
		7. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	65.91	95	95	99.99	105.25%
		8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	100	100	115.39	115.39%
	Rata-rata kinerja sasaran 8 :						102,80%

9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	52. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.13	0.12	0.12	0.12	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 9 :						100%
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	53. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.29 4 rts	4.326 RTS (32,54%)	600 RTS (4,51%)	600 RTS (4,51 %)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 10 :						100%
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	54. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	88 kopera si)	100 %(332 Koperasi)	21.68% (72 Koperasi)	30.10% (100 Kopera si)	138,8 %
		55. Persentase peningkatan nilai eksport UKM	US\$ 106.0 17.49 7,01	US\$ 590.140. 152,668	US\$ 120.152. 926,503	US\$ 51.860 .534,1 6	43,16%
	Rata – rata kinerja sasaran 11 :						90,98%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	56. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	180.9 23	873.446	174.450	177.00 4	101,47%
		57. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	63.93 Kw/Ha	63,18 Kw/Ha	64Kw/Ha	63.18K w/Ha	98,72%
	Rata-rata kinerja sasaran 12 :						100,10%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	58. Jumlah populasi peternakan		1.486.08 1	1.450.00 0	1.486. 081	102,49%
		59. Jumlah produksi perikanan dan kelautan		149.766, 9	5.061,87	7.097, 59	140,22%
	Rata-rata kinerja sasaran 13 :						121,36
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	60. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	1764	3158	1.500	1.658	86,98%
	Rata-rata kinerja sasaran 14 :						86,98%

15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	61. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	25%	67.92%	65%	67.92 %	104,49%
	Rata-rata kinerja sasaran 15 :						104,49%
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	62. Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100%
		63. Peningkatan pendapatan asli daerah	936.8 87.97 5.37	2.990.9 65.598	2.302.1 69.811	2.990 .965. 598	129,92 %
	Rata-rata kinerja sasaran 16 :						114,96 %
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	64. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35.72	70,0	70,0	75.89	108,41 %
		Rata-rata kinerja sasaran 17 :					108,41 %
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	65. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	3	30	3	4	133,33 %
		66. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	89.14	94.58	94.68	94.72	100,04%
	Rata-rata kinerja sasaran 18 :						116,69%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguan lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	67. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW	45.82	65.01	60	65.01	108,34 %

		Kabupaten Badung					
	Rata-rata kinerja sasaran 19 :						108,34 %
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	68. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	31	0,64	0.60	0,61	98,3%
69. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light		56,86	80,39	78.43	80,39	102,5%	
Rata-rata kinerja sasaran 20 :							100,48 %
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	70. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	10.2	26.74	50	26,74	146,5%
• COD air sungai							
• BOD air sungai		5.2	6.1	6	6,1	97,83%	
• BOD air laut		6.03	10	10	8,6	116,8%	
Sub Rata-rata							120,38 %
71. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu		74,63	400	400	23.48	195,71 %	
72. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	216	240	316	131,67 %		
	Rata-rata kinerja sasaran 21 :						149,25 %

3.2. Analisis Capaian Kinerja.

Tahun 2015 merupakan masa berakhirnya pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015, sehingga Pelaporan Kinerja Instansi Kemerintah Kabupaten Badung tahun 2015 yang disusun tahun 2016 harus menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara substansi LKjIP Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2015 ini merupakan pelaporan kinerja sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015, yang menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan, IndikatorTujuan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memberikan informasi atas keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian sebuah tujuan, sasaran dan indikator yang mendukungnya melalui data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan.

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian Tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kabupaten Badung bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai 14 tujuan, 21 sasaran dan 37 indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabaran melalu alat ukur sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sesuai dengan tujuan 1. yang ingin dicapai yaitu meningkatnya srada dan bhakti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan sangat disadari sungguh sulit untuk mengukurnya. Namun srada dan bhakti yang dimaksud adalah sebatas pengukuran terhadap kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di kabupaten Badung.

Pengukuran terhadap pencapaian tujuan meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti diukur melalui peningkatan/jumlah pelaksanaan srada dan peningkatan /jumlah pelaksanaan Bhakti. Hasil capaian indicator tujuan masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja tujuan 1
Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan/JumlahpelaksanaanSrada	27 Upacara	117 Upacara	100%	100%
2	Peningkatan/Jumlahpelaksanaan Bhakti	27 Kegiatan	117 Kegiatan	100%	100%
	Rata-Rata Kinerja				100%

Peningkatan / Jumlah pelaksanaan srada dan bhakti Yang bisa diukur dari kegiatan upacara keagamaan yang dilaksanakan sebagai wujud dari pengamalan srada Peningkatan pelaksanaan srada akan sejalan dengan peningkatan Bhakti, karena srada dan bhakti merupakan dua indicator yang memiliki pemahaman serupa sehingga peningkatannya pun sejalan, dimana dalam kondisi awal pada tahun 2011 jumlah pelaksanaan srada dan bhakti mencapai 27 upacara namun pada kondisi akhir diharapkan mencapai 117 kegiatan upacara keagamaan yang dilaksanakan melalui APBD.

Capaian kinerja untuk tujuan 1 yaitu meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan dengan rata-rata kinerja sebesar 100%, berarti tujuan tersebut dapat dikatakan telah tercapai. Tercapainya tujuan tersebut karena meningkatnya pemahaman akan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang terimplementasi melalui kegiatan keagamaan dalam wujud upacara agama, yang bertujuan untuk memohon keselamatan alam semesta beserta segenap isinya, serta keharmonisan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang semua kegiatan tersebut tentu tercapai atas dukungan anggaran yang memadai

Tujuan 1 tersebut didukung oleh 2 sasaran yaitu terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung dan indikator jumlah konflik SARA. Secara umum tujuan meningkatnya pelaksanaan Srada da Bhakti sudah tercapai hal ini terbukti dari tidak adanya konflik SARA di kabupaten Badung.

Untuk lebih jelasnya rincian terhadap capaian sasaran dan indikator yang mendukung secara rinci dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

Sasaran : Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung .

Tabel 3.4

Analisis Capaian Sasaran Terwujudnya Kerukunan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat di Kabupaten Badung.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Jumlah konflik SARA	100%	100%	100%	0	0	100%	0	0	100%

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung ditempuh melalui strategi peningkatan keharmonisan dan kerukunan antar-umat dan sesama umat beragama di Kabupaten Badung. Strategi tersebut akan dilaksanakan dengan arah kebijakan umum meningkatkan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali.



Kondisi awal di Kabupaten Badung terhadap indikator kinerja jumlah konflik sara adalah 0% dan kondisi akhir yang ingin dicapai adalah 0%. Pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai (Shanti) melalui kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang salah satu aktivitasnya adanya melaksanakan perayaan bersama di hari raya besar keagamaan di Kabupaten Badung.

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama, seperti adanya perayaan hari raya besar agama yang dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dengan agama yang berbeda. Dengan pengamalan nilai-nilai luhur agama ini diharapkan adanya peningkatan kepedulian sosial masyarakat, sehingga dapat berbanding lurus dengan menurunnya bahkan membuat jumlah konflik sara di tatanan masyarakat Kabupaten Badung menjadi rendah bahkan tidak ada yang diakibatkan oleh makin banyaknya aktivitas dan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Salah satu untuk mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung adalah melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh para tokoh agama/ majelis agama dan tokoh masyarakat pada

tanggal 27 Desember 1999 dimana pada saat itu bernama Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB). Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama maka Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) berubah menjadi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) . Adapun tujuan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah sebagai sarana untuk melaksanakan dialog kerukunan umat beragama, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan ajaran Tat Twam Asi untuk menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita.

Pada Sasaran pertama yaitu Terwujudnya Kerukunan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat di Kabupaten Badung, berdasarkan Evaluasi terhadap 1 (satu) indikator sasaran yaitu Jumlah Konflik SARA, tahun 2015 capaian Kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu tidak adanya konflik SARA di Kabupaten Badung dengan presentase capaian kinerja sebesar 100%. Dalam kurun waktu 2011-2015, capaian kinerja mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan , Artinya di Kabupaten Badung sampai saat ini TIDAK ADA KONFLIK SARA.



Untuk mewujudkan kondisi di atas pemerintah kabupaten badung melalui kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung setiap tahun secara rutin menganggarkan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama untuk dapat terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis Santhi dan Jagatdhita melalui program Pengembangan

Nilai Budaya dengan kegiatan Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Badung dengan Pagu Anggaran pada Tahun 2011 sebesar Rp. 102.998.00 (seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) , Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 302.998.000 (Tiga ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) , pada Tahun 2013 sebesar Rp. 305.600.700 (Tiga ratus lima juta enam ratus ribu tujuh ratus rupiah) , pada tahun 2014 sebesar Rp. 653.528.600 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 225.386.100 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga total anggaran terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 1.497.813.200.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
**Pencapaian indikator jumlah konflik SARA di kabupaten Badung.
 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan	Capaian	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah konflik SARA	0 % (tidak ada konflik SARA)	0 % (tidak ada konflik SARA)	0% (tidak ada konflik SARA)	100 % (tidak ada konflik SARA)

Realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik. Dari 1 (satu) indikator telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 %.



Tujuan pembangunan ke 2 (dua) yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelestarian adat dan budaya bali. Dimana Desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh karena adanya karang desa (wilayah desa) , awig-awig desa(sistem) aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan adanya pura kahyangan tiga.

Dan untuk mencapai tujuan meningkatkan pelestarian adat dan budaya bali adalah terbatas pada pengukuran terhadap 2 (dua) indikator tujuan yaitu prosentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari) dan persentase sekaa taruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari).

Tabel 3.6
Capaian indikator tujuan 2
Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	% desa adat yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
2	% sekaa taruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	10.90 % (58 sekaa taruna)	14.66% (78 sekaa taruna)	100%	100%
	Rata-Rata Kinerja				100%

1. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan

Desa adat yang memenuhi tatanan adalah desa adat yang dianggap sudah lestari , karena telah dilaksanakannya pelestarian desa adat melalui pembinaan – pembinaan kepada desa adat, pembinaan pemahaman awig-awig dan lomba kepada 4 desa adat di kabupaten badung setiap tahunnya, sehingga presentase desa adat yang sudah memenuhi tatanan bila dihitung dari total desa adat yang terdapat di kabupaten badung yaitu 122 adalah sebesar 16,39 % yang sudah lestari terhitung dari 5 (lima) tahun RPJMD 2011 – 2015 , dan capaian kinerja telah 100 % sesuai dengan target yang diinginkan, bila dilihat kondisi awal RPJMD sampai dengan akhir RPJMD tahun 2011 – 2015 persentase desa adat yang sudah memenuhi tatanan dan sudah mendapatkan pembinaan adalah sebesar 63.93% atau 78 desa adat yang sudah dianggap dapat memenuhi tatanannya,

Grafik 3.1
Desa Adat Yang Memenuhi Tatanan Yang Ditetapkan



2. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan

Sekaa Teruna yang memenuhi tatanan adalah Sekaa Teruna yang dianggap sudah lestari, karena telah dilaksanakannya pelestarian Sekaa Teruna melalui pembinaan – pembinaan kepada Sekaa Teruna, dan lomba kepada 4 Sekaa Teruna di kabupaten badung setiap tahunnya, sehingga presentase Sekaa Teruna yang sudah memenuhi tatanan bila dihitung dari total Sekaa Teruna yang terdapat di kabupaten badung yaitu 532 adalah sebesar 3.75 % yang sudah lestari terhitung dari 5 (lima) tahun RPJMD 2011 – 2015, dan capaian kinerja telah 100 % sesuai dengan target yang diinginkan, bila dilihat kondisi awal RPJMD sampai dengan akhir RPJMD tahun 2011 – 2015 persentase Sekaa Teruna yang sudah memenuhi tatanan dan sudah mendapatkan pembinaan adalah sebesar 14.66% atau 78 Sekaa Teruna yang sudah di anggap dapat memenuhi tatanannya,

Secara umum tujuan meningkatnya pelestarian adat dan budaya bali telah mencapai target yang ditetapkan hal ini terlihat dari pencapaian indikator tujuan. dan penjabaran alat ukur sasaran dan analisis hasil terhadap masing-masing indikator setiap tahunnya, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Analisis Capaian Sasaran Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	100 %	100 %	100 %	3.27 %	3.27%	100%	3.27%	3.2%	100%
2	Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	100 %	100 %	100 %	0,73 %	0,73 %	100%	0,73 %	0,73 %	100%

**Indikator 1.
Persentase Desa Adat Yang Memenuhi Tatanan Yang Ditetapkan (Lestari)**

Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian Desa adat di Kabupaten Badung dengan melaksanakan pembinaan melalui Program Pengembangan Nilai Budaya dengan total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 15.675.871.405 Secara umum Desa adat yang ada pada kabupaten Badung sudah memenuhi tatanan yang di tetapkan atau sudah lestari. Maka tujuan dari diadakannya pembinaan kepada Desa adat adalah agar masyarakat (krama Desa adat) tetap dapat mempertahankan kelestarian adat dan budaya dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Bali.

Dalam RPJMD (2010-2015) ditargetkan untuk melakukan pembinaan terhadap 20 Desa adat untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kelestarian dan eksisitensi Desa adat. Sehingga pertahun ditargetkan untuk melakukan pembinaan sebanyak 4 Desa adat. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah melaksanakan pembinaan ke seluruh Desa adat di Kabupaten Badung berjumlah 20 Desa adat dalam target 5 (lima) tahun dan telah mencapai target sampai tahun ke-5 RPJMD. Presentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 sudah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan. Bila dilihat dari jumlah Desa adat yang terdapat di Kabupaten Badung yaitu berjumlah 122 Desa adat , maka terhadap peningkatan dalam melestarikan adat dan budaya pada Desa adat terealisasi (16,39 %)

Berdasarkan kriteria yang ada, Desa adat di kabupaten Badung pada dasarnya sudah memenuhi tatanan yang ditetapkan atau lestari sesuai dengan adat dan istiadat pada Desa adat itu sendiri. Adanya pembinaan kepada 20 Desa adat adalah untuk mempertahankan kelestarian Desa adat itu sendiri agar tidak punah . Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahunnya sampai pada akhirnya seluruh Desa adat yang ada mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas Desa adat itu sendiri agar tetap ajeg dan lestari.

Pembinaan Desa Adat di Kabupaten Badung



Indikator 2. Persentase Sekaa Teruna Yang Memenuhi Tataan Yang Ditetapkan (Lestari)

Sekaa Teruna adalah salah satu organisasi tradisional yang bernaung dibawah Desa adat sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas remaja selain itu Sekaa



Teruna juga diharapkan menjadi tempat untuk melestarikan seni, budaya dan adat serta sebagai wadah untuk persiapan regenerasi bagi keberlangsungan Sekaa Teruna karena setiap pemuda hindu Bali sebelum masuk menjadi warga (krama) Sekaa Teruna harus terlebih dahulu tercatat sebagai anggota sekaa teruna di salah satu

banjar setempat.

Ditengah gempuran arus globalisasi, modernisasi dan pengaruh budaya asing yang semakin kuat, keberadaan sekaa teruna sebagai generasi penerus dan pelestari adat dan budaya Bali perlu mendapat perhatian serius melalui pembinaan dan pemberdayaan secara intensif agar sekaa teruna dapat menjadi benteng yang kokoh dalam melestarikan adat dan budaya serta menjadi motor penggerak pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini jumlah sekaa teruna di Kabupaten Badung sebanyak 543 organisasi yang tersebar pada 122 Desa adat. Sama halnya seperti Sekaa Teruna, sekaa teruna perlu mendapat pembinaan agar tumbuh menjadi organisasi yang memenuhi tataan (lestari). Pembinaan sekaa teruna baru di mulai sejak tahun 2010 Sampai tahun 2015 ditargetkan 20 sekaa teruna mendapatkan pembinaan agar menjadi sekaa teruna yang memenuhi tataan lestari.

Dengan adanya regenerasi pada sekaa teruna maka akan terus adanya perubahan dan untuk dapat melestarikan dan mempertahankan sekaa teruna yang ada pada di Kabupaten Badung , maka di pandang perlu untuk dilakukannya pembinaan secara rutin kepada sekaa teruna yang ada pada Kabupaten Badung. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut diatas adalah dengan ikut berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sekaa teruna di Kabupaten Badung dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap Sekaa Teruna melalui melalui Program Pengembangan Nilai Budaya dengan total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun yang mendukung kegiatan sasaran kedua pada Indikator Sasaran 2 adalah sebesar **Rp.3.095.601.900**

Didalam RPJMD (2011-2015) ditargetkan melaksanakan pembinaan terhadap 20 sekaa teruna yang terdapat di Kabupaten Badung , bertujuan agar warga sekaa teruna dapat mempertahankan dan meningkatkan kelestarian adat dan budaya di banjar adatnya atau Sekaa Terunanya. Adapun nama-nama sekaa teruna yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2011 sampai dengan 2015 bukan yg dibina doharapkan disini tetapi brp Sekaa Teruna maupun sekee teruna yg memenuhi tatanan.

Tabel 3.8
Pembinaan Sekaa teruna Tahun 2011-2015

NO.	TAHUN	NAMA SEKAA TERUNA	KECAMATAN	PEMBINAAN
1	2011	- ST. Yowana Putra Pascima Desa Br. Pascima. Desa Adat Tanjung Bena	Kuta Selatan	Sudah
		- ST. Dharma Santosa Br. Gede, Desa Adat Anggungan	Mengwi	Sudah
		- ST. Widya Paramitha.Br. Dirgahayu Desa Adat Gerih	Petang	Sudah
		- ST. Parwata Kusuma Br. Adat Munduk Damping Desa Adat Munduk Damping	Abiansemal	Sudah
2	2012	- ST. Wressa Asti Br. Kayu tulang Desa Adat Canggu	Kuta Utara	Sudah
		- ST Dharma Yowana Br Adat Balangan Desa Adat Balangan	Mengwi	Sudah
		- ST. Bala Carya Mukti Br. Uma Anyar, Desa Adat Uma Anyar	Abiansemal	Sudah
		- ST. Pagar Wahana Br. Pelaga, Desa adat Pelaga	Petang	Sudah
3	2013	- ST. Sada Rana Dharma Br. PlazaDesa Adat kuta	Kuta	Sudah
		- ST. Setia Pertiwi, Br. Pengandengan, Desa Adat Beringkit	Mengwi	Sudah
		- ST. Waralaga Br. Senapan Desa Adat Carang Sari	Petanga	Sudah
		- ST. Tunas Harapan, Br. Tingas Desa Adat Tingas	Abiansemal	Sudah
4	2014	- ST. Satya Dharma Br. Adat Sawangan Desa Adat Peminge	Kuta Selatan	Sudah
		- ST. Shanti Bhuwana Br. Kekeeran, Desa Adat Kekeeran	Abiansemal	Sudah
		- ST. Abdi Yowana Praja Br. Selat, Desa adat Sobangan	Mengwi	Sudah
		- ST. Yowana Shanti Br. Sulangai, Desa Adat Sulangai	Petang	Sudah
5	2015	- ST. Jong Wanaa Rose Br. Adat Abianbase, Desa Adat Abianbase	Abiansemal	Sudah
		- ST. Dharma Sesana, Desa Adat Lipah	Petang	Sudah
		- ST. Sancita Dharma Desa Adat Ambengan	Abiansemal	Sudah
		- ST Yowana Eka Dharma Desa Adat Dalung	Kuta Utara	Sudah

Sehingga pertahun ditargetkan untuk melakukan pembinaan sebanyak 4 Sekaa Teruna di Kabupaten Badung. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pembinaan sudah dilaksanakan kepada 20 Sekaa Teruna dari 20 Sekaa Teruna yang ditargetkan sampai dengan tahun ke-5 renstra atau pada target yang ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2011-2015 . Presentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan sudah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100 % . Bila dilihat dari jumlah Sekaa Teruna yang terdapat di Kabupaten Badung yaitu

berjumlah 532 Sekaa Teruna maka dapat dikatakan bahwa baru 3,68% terealisasi terhadap peningkatan dalam melestarikan Sekaa Teruna tersebut.

Tabel 3.9

Realisasi akumulasi pencapaian indikator Sasaran Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh adat dan budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selarassampai dengan tahun 2015 Dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (0%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Sekaa Teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (<i>lestari</i>)	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
2	Persentase Sekaa Teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (<i>lestari</i>)	10.90 % (58 sekaa teruna)	14.66% (78 sekaa teruna)	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa Realisasi akumulasi pencapaian sasaran kedua pada indikator sasaran 2 sampai dengan tahun 2015 sudah tercapai 100 %, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan tahun ke 5 (lima) dalam RPJMD tahun 2011-2015 .



Tujuan 3. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun

Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun merupakan tujuan dari pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Badung, dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan program meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan, maka upaya-upaya perbaikan di bidang pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Untuk mencapainya diperlukan upaya, upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk menyeimbangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jika program wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka penduduk muda Kabupaten Badung akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa peluang yang sangat besar, ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja.

Upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan tuntas wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Badung bagi anak-anak usia sekolah, ditempuh melalui strategi peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Strategi tersebut dilaksanakan dengan arah kebijakan umum sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
- 2) Mewujudkan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 3) Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing
- 4) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

Untuk mengetahui ketercapaian Tujuan Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah diukur berdasarkan penjabaran atas 1 (satu) alat ukur indikator

tujuan yaitu persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/SMK. Hasil capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
**Capaian indikator kinerja tujuan 3
 Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun**

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan table diatas, tujuan 3 yaitu terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun sudah tercapai hal ini bisa dilihat pada analisa persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun capaian kinerja sudah tercapai 100%.

Bila dilihat capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Tuntasnya wajib belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah

Tabel 3.11
**Analisis Capaian Sasaran
 Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah.**

No .	Indikator kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase angka melek huruf	92,96 %	93,01%	93,93 %	100%	93,95 %	93,93	100%	95,71 %	95,71 %

Indikator 1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun .

Generasi muda yang disebut-sebut " generasi emas " harus diberi pendidikan yang lebih baik, dan kesempatan belajar hingga sekolah menengah. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menjadikan Kabupaten Badung sebagai Kabupaten yang mempunyai standar pendidikan berkualitas tinggi dan terkemuka di tingkat nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi antara lain adalah : peningkatan mutu pendidikan, peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan SDM pendidik, peningkatan sarana prasarana. Untuk lebih jelasnya ketercapaian masing –masing alat ukur secara rinci dapat dilihat pada tabel serta penjelasan analisis sebagai berikut :

Kondisi awal pada tahun 2010 usia sekolah di kabupaten Badung anak-anak usia sekolah terdapat 102.197 siswa yang terdiri dari 60.586 siswa SD, 24.955 siswa SMP, 16.656 siswa SMA/MA/SMK dan diharapkan tahun 2015 seluruh siswa di Kabupaten Badung tuntas wajib belajar.

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut diatas, terhadap indikator persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun bahwa pencapaian indikator sasaran tahun 2015 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tercapainya capaian kinerja ini karena adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara pendidikan , pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap perkembangan pendidikan anak.

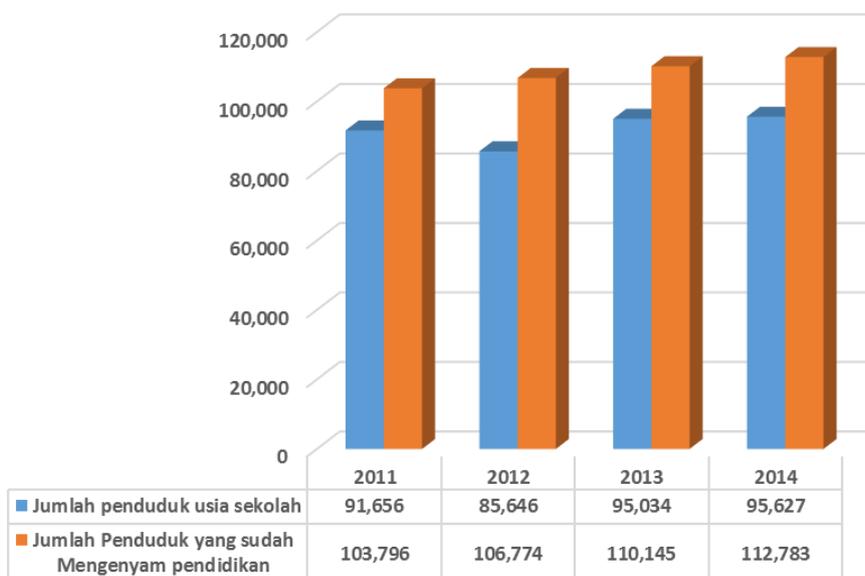
Apabila dilihat capaian indikator kinerja tahun 2011 sampai tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2011 jumlah penduduk usia sekolah mencapai 91.656 orang dan penduduk yang sudah mengenyam pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK berjumlah 103.796 siswa.

Tahun 2012 jumlah penduduk usia sekolah mencapai 85.646 orang dan penduduk yang sudah mengenyam pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK berjumlah 106.774 siswa.

Tahun 2013 jumlah penduduk usia sekolah mencapai 95.034 orang dan penduduk yang sudah mengenyam pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK berjumlah 110.145 siswa.

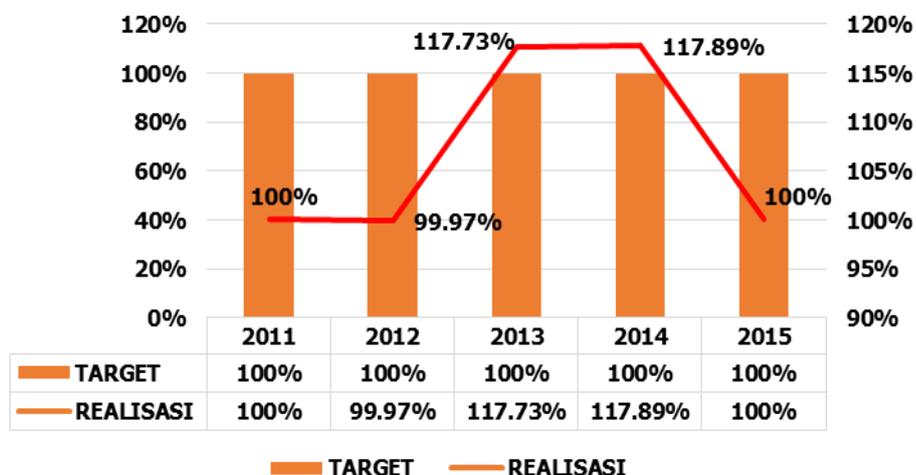
Dan tahun 2014 jumlah penduduk usia sekolah mencapai 95.627 orang dan penduduk yang sudah mengenyam pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK berjumlah 112.783 siswa, dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kabupaten Badung, hal ini karena terdapat siswa yang berusia diluar usia resmi sekolah dari luar Kabupaten yang ingin bersekolah di Kabupaten Badung, hal ini sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan.

Grafik 3.2
**jumlah penduduk usia sekolah dan
 penduduk yang sudah mengenyam pendidikan
 Tahun 2011-2014**



Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp.109.828.819.676,00 dan terrealisasi sebesar Rp.88.251.995.276,00, program pendidikan menengah dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.469.766.715,00 dan terrealisasi sebesar Rp.7.929.825.004,00, serta program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.668.509.900,00 dan terrealisasi sebesar Rp.2.438.282.500,00. Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa adanya sisa dari pagu anggaran yang telah ditetapkan disebabkan karena proses penawaran dari pihak ketiga atau proses pelelangan. Pemerintah Kabupaten Badung terus mengupayakan dan mendukung masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga konsekuensinya biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pula melalui program dan kegiatan inovasi seperti dana pendampingan BOS dari APBD. Sejak tahun 2005 Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran pendamping dana BOS untuk tingkat SD dan SMP sedangkan tingkat SMA /SMK mulai dilaksanakan pada tahun 2010.

Grafik 3.3
**Perkembangan capaian kinerja
 Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah
 tahun 2013 – 2015**



Indikator 2. Persentase angka melek huruf.

Capaian kinerja indikator persentase angka melek huruf tahun 2015 tercapai 95,71% dari target yang ditetapkan 100%. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak tertarik untuk belajar mengikuti program kejar paket karena alasan usia lanjut walaupun sudah melalui usaha jemput bola.

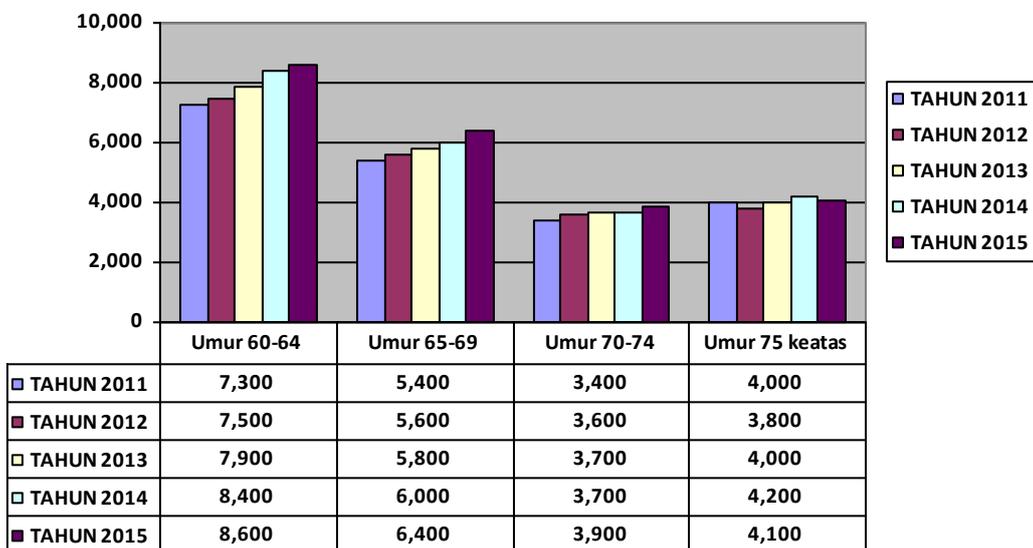
Sedangkan capaian kinerja tahun 2014 baru tercapai capai 93,95 dari yang target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi sebesar 93,95%. Apabila dilihat perkembangan capaian realisasi setiap tahunnya dari tahun 2011 realisasi 92,96%, tahun 2012 realisasi 93,01%, tahun 2013 realisasi 93,93%, sedangkan Tahun 2014 realisasi 93,95% mengalami peningkatan karena setiap tahun terus diadakan peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar mengajar di semua kecamatan. Sedangkan capaian kinerja persentase angka melek huruf belum memenuhi target 100%, hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak tertarik untuk belajar mengikuti program kejar paket karena alasan usia lanjut. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan tetap mengadakan pendekatan melalui pembinaan dan sosialisasi.

Bila dibandingkan angka melek huruf di Kabupaten Badung sebesar 93,93 tahun 2013 di Kota Denpasar mencapai 97.95% (data BPS Prov. Bali 2013). Program yang mendukung pelaksanaan indikator sasaran Angka Melek Huruf adalah program pendidikan non formal dengan total anggaran sebesar Rp.517.478.100,00 dengan realisasi sebesar 514.921.500,00. Pelayanan pendidikan formal maupun non formal dapat terpenuhi karena adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar terbebas dari buta aksara.

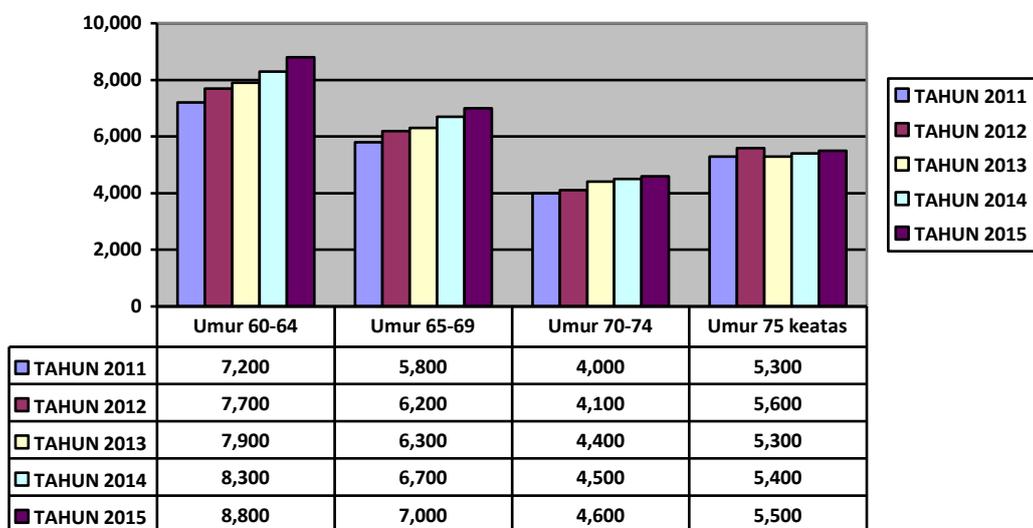
Tidak tercapainya capaian indikator kinerja Persentase angka melek huruf tersebut disebabkan karena penduduk usia lanjut yang tidak tertarik belajar mengikuti

program kejar paket karena alasan usia lanjut , menurut UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 60-75 tahun keatas dari tahun 2014-2015 sebagai berikut :

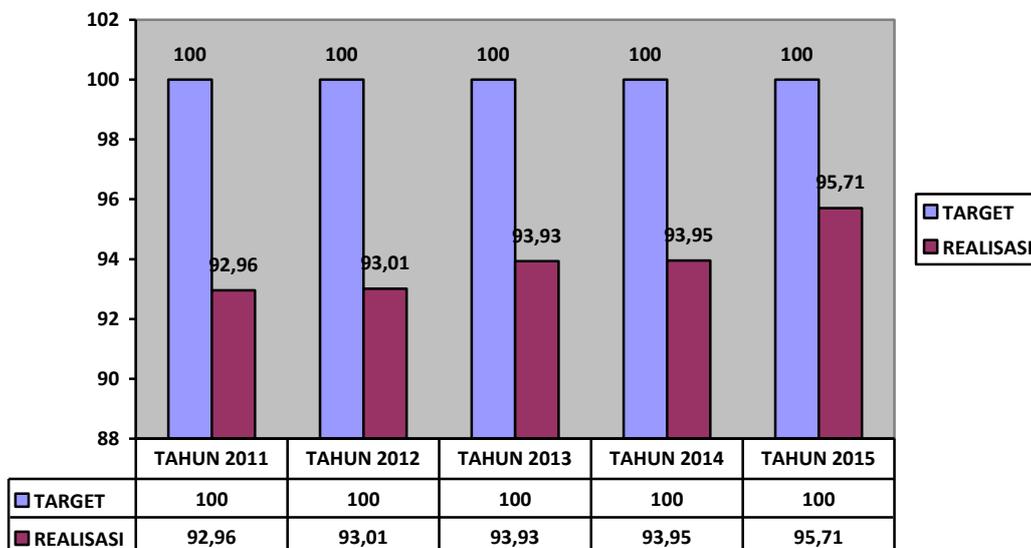
Grafik 3.4
**Perkembangan Penduduk Laki-Laki (Lanjut Usia)
 Di Kabupaten Badung tahun 2011-2015**



Grafik 3.5
**Perkembangan Penduduk Perempuan (Lanjut Usia)
 Di Kabupaten Badung tahun 2011-2015**



Grafik 3.6
**Realisasi Angka Melek Huruf di Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2015**



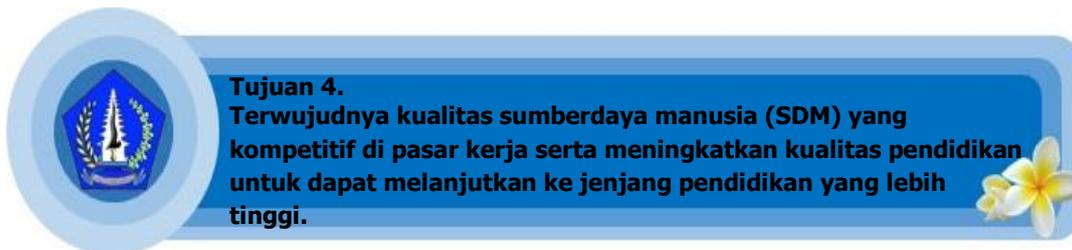
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2015 di bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
**Capaian Indikator sasaran Persentase anak usia sekolah
 yang tuntas wajib belajar 12 tahun dan Angka melek huruf dibandingkan
 Target RPJMD Tahun 2015**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100 %	100 %	100 %
2	Persentase angka melek huruf	92,92	100 %	95.71 %	95.71 %

Berdasarkan tabel 3.8, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam RPJMD menunjukkan angka

yang yang positif. Ini berarti penduduk usia 7–18 tahun sudah mengenyam pendidikan pada jenjangnya, sehingga wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dengan demikian target rintisan belajar 12 tahun oleh Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2009 yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2008–2009 maupun target pemerintah pusat yang mencanangkan Wajar 12 tahun mulai tahun 2012 yang di kenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal sudah terpenuhi. Realisasi indikator angka melek huruf sampai tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir dalam RPJMD belum tercapai dengan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 95,71%.



Dalam paradigma di era baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan peningkatan peran masyarakat mendapat perhatian utama. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Memasuki era globalisasi sekarang pemerintah ingin mewujudkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pengukuran terhadap pencapaian tujuan terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diukur melalui indikator tujuan persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/SMK.

. Hasil capaian indikator tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian indikator kinerja tujuan 4
Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/SMK

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase lulusan pendidikan dasar yg diterima di jenjang SMA/MA/SMK	81,30%	100%	99,37%	99,37%

Analisis atas capaian indikator kinerja tujuan 4 sama dengan indikator sasaran, sehingga analisa serta penjelasan secara rinci pada analisa sasaran sebagai berikut :

Sasaran Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi

Tabel 3.14

Analisis capaian Sasaran Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Ket
							Target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100 %	100 %	100 %	97,99%	100 %	100 %	100%	

Tahun 2015 indikator lulusan pendidikan yang diterima di jenjang pendidikan menengah menargetkan 100% dengan capaian realisasi sebesar 99,37%. Adapun pendukung dari keberhasilan indikator tersebut adalah angka lulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar (SMP) untuk tahun ajaran 2014/2015 angka kelulusan siswa menunjukkan angka yang positif, yaitu jumlah peserta ujian tingkat SMP berjumlah 8.693 peserta dan lulus 100% dan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 8.339 siswa, sedangkan lagi 0,63% siswa tamatan SMP tersebut melanjutkan ke luar daerah.

Grafik 3.7

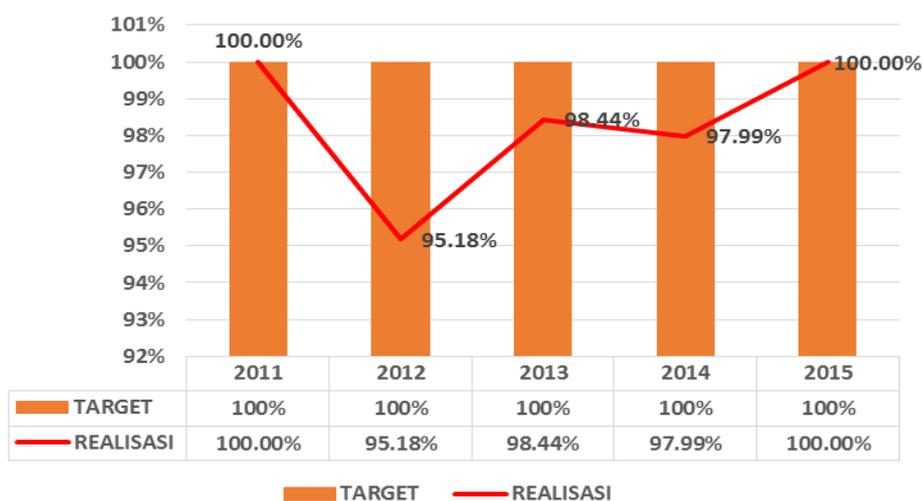
Angka lulusan siswa tahun ajaran 2014/2015 dan siswa baru tahun ajaran 2015/2016 di Kabupaten Badung



Untuk perkembangan capaian realisasi indikator lulusan pendidikan yang diterima di jenjang pendidikan menengah dari tahun 2011 s/d tahun 2014 adalah sebagai berikut : Target 2014 yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 96,99%, tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,44, tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 89,11%, sedangkan tahun 2011

target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 85,24%, sesungguhnya capaian kinerja yang tidak mencapai target bukan berarti tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akan tetapi siswa tamatan SMP tersebut melanjutkan ke luar daerah. Program yang mendukung capaian indikator ini adalah program pendidikan menengah dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 16.914.150.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.4.646.370.358,50.

Grafik 3.8
Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah tahun 2011 - 2015



Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Capaian Indikator sasaran terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	81,30%	100%	99,37 %	99,37%

Berdasarkan tabel di atas realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam RPJMD periode 2010-2015 persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah di Kabupaten Badung belum mencapai target yakni sebesar 100%, tidak tercapainya kinerja tersebut bukan berarti tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akan tetapi siswa tamatan SMP tersebut melanjutkan ke luar daerah



Tujuan 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung

Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dunia Internasional, konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa *Health is a fundamental right*, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Pengukuran terhadap capaian tujuan kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung diukur dengan tiga indikator tujuan yaitu Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Angka Balita Gizi Buruk. Hasil capaian ketiga indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.16

Capaian indikator kinerja Tujuan 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung

No	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir yg ingin dicapai (Target)	Capaian Kinerja	Kinerja (%)
1.	Angka Kematian				
	Angka Kematian Ibu Melahirkan	62.16 per 100.000 Kelahiran Hidup	60 per 100.000 Kelahiran Hidup	99,83 per 100.000 Kelahiran Hidup	33,62
	Angka Kematian Bayi	6.71 per 1.000 Kelahiran Hidup	4,5 per 1.000 Kelahiran Hidup	3,62 per 1.000 Kelahiran Hidup	114,00
	Angka Kematian Balita	3.03 per 1.000 Kelahiran Hidup	5 per 1.000 Kelahiran Hidup	3,87 per 1.000 Kelahiran Hidup	127,60
	<i>Rata-rata kinerja indikator angka kematian</i>				<i>91,74</i>
2.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	634 per 100.000 penduduk	200 per 100.000 penduduk	353.34 per 100.000 penduduk	23.33
3.	% Balita Gizi buruk	0.47%	0.4 %	0.2%	150.00
Rata-Rata Kinerja indikator derajat kesehatan masyarakat					89,71 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja tujuan 5 adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja untuk tujuan 5 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung yang diukur dengan tiga indikator (angka kematian, Angka kesakitan dan gizi buruk) dengan rata-rata kinerja sebesar 89,71%, berarti tujuan meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Badung telah tercapai.

Hasil capaian masing-masing indikator untuk mengukur derajat kesehatan seperti berikut :

1. Indikator tujuan 1 Angka kematian (Ibu, Bayi dan Balita)

Angka kematian diukur dengan tiga indikator yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian ballita dengan rata-rata kinerja sebesar 91,74%.

Capaian indikator angka kematin ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 sebesar 99,83 per 100.000 kelahiran hidup, berarti belum mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 60 per 100.000 kelahiran hidup atau kinerjanya sebesar 33,62%.

Capaian indikator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 3,87 per 1.000 kelahiran hidup, berarti telah mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 4,5 per 1.000 kelahiran hidup atau kinerjanya sebesar 114,00%.

Capaian indikator angka kematian balita per 1.000 Balita pada tahun 2015 sebesar 3,62 per 1.000 kelahiran hidup, berarti telah mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 5,0 per 1.000 kelahiran hidup atau kinerjanya sebesar 127,60%.

2. Indikator tujuan 2 Angka kesakitan (penyakit Demam Berdarah Dengue)

Angka kesakitan diukur dengan indikator angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan hasil capaian angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 353.34 per 100.000 penduduk, berarti belum mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 200 per 100.000 penduduk atau kinerjanya sebesar 23.33%

3. Indikator tujuan 3 Persentase Balita Gizi buruk

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor).

Hasil cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Badung Tahun 2015 sebesar 0.2%, berarti telah mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,4% atau kinerjanya sebesar 150%.

Bila dilihat capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara rinci dapat jelaskan sebagai berikut :

Sasaran
Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita

Tabel 3.17
Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	91.27%	86,23%	77,26%	61,00%	37,16	139,08%	60	99,83	33,62%
2	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	125.30%	156,4%	158,33%	5,50%	4,08	125,82%	4,5	3,62	114,00%
3	Menurunnya angka kematian balita per 1.000 Balita	100 %	140,38%	145,10%	5,10%	4,70	107,84%	5	3,87	127,60%

Pembangunan kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kunci yaitu standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan serta *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita dan menurunkan prevalensi gizi buruk pada balita.

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung digambarkan oleh status kesehatan ibu, bayi dan balita yang diukur melalui Angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, dan angka kesakitan beberapa penyakit yang ada di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja rata-rata 108,26%. Secara keseluruhan dari indikator tersebut merupakan indikator baru, untuk lebih jelasnya tingkat capaian masing – masing indikator dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :



INDKATOR 1.

Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator atas angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sebesar 99,83 per 100.000 kelahiran hidup atau 8 kasus kematian ibu selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas diantara 8.014 kelahiran hidup. Ini berarti hasil capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan (tidak mencapai target) pada tahun 2015 yaitu kurang dari 60,00 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga kinerjanya sebesar 33,62% termasuk kategori rendah.

Hasil capaian angka kematian ibu tahun 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2014 dengan hasil sebesar 37,16 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula hasil capaian AKI tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya periode tahun 2010 sampai 2014, berarti kinerja tahun 2015 paling rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

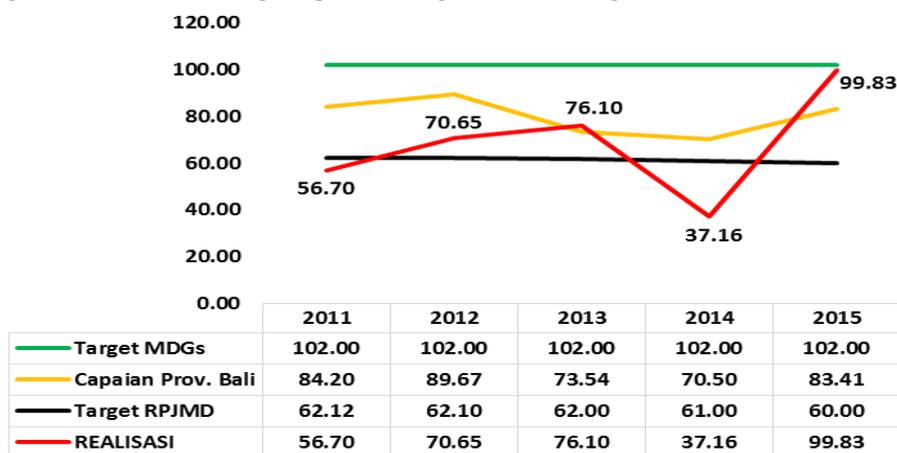
Hasil capaian indikator angka kematian ibu pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 60,00 per 100.000 kelahiran hidup.

Hasil capaian indikator angka kematian ibu di Kabupaten Badung tahun 2015 lebih tinggi, bila dibandingkan dengan hasil capaian angka kematian ibu di Provinsi Bali sebesar 83,41 per 100.000 kelahiran hidup.

Hasil capaian angka kematian ibu di Kabupaten Badung tahun 2015 lebih rendah atau telah mencapai target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target angka kematian ibu secara Nasional yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup serta telah mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik 1 berikut ini.

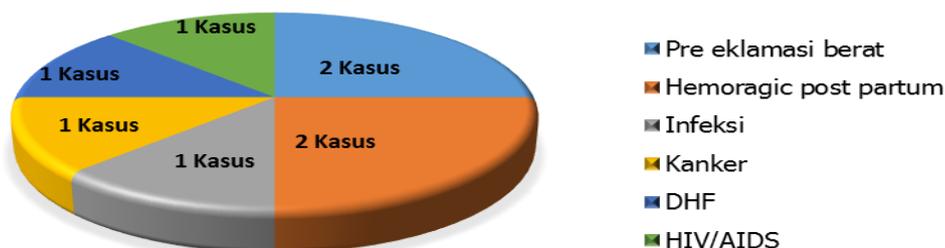
Grafik 3.9
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015



Adapun penyebab angka kematian ibu masih diatas target oleh karena jumlah kematian Ibu pada tahun 2015 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 8 kasus kematian ibu hamil/bersalin/nifas yang disebabkan karena komplikasi persalinaan dan nifas meliputi: (1) Pre Eklamsia berat, (2) perdarahan setelah persalinan (3) Infeksi (4) Ca/Kanker (5) DHF, dan (6) HIV-AIDS.

Grafik 3.10

**PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014 S/D 2015**



Program yang mendukung terhadap capaian indikator tersebut adalah program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dengan kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Optimalisasi dan Pemberdayaan Petugas Kesehatan dalam Upaya Penurunan AKI, Pelatihan PONEK dan Pelatihan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K). Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 1.029.580.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 812.698.000 (78,94%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Badung meliputi :

- Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung mengenai sasaran kematian ibu hamil di Kabupaten Badung
- Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk setiap terjadinya kasus kematian
- Pelatihan pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu
- Pelatihan PONEK untuk petugas medis dan paramedis di tingkat pelayanan dasar
- Pembinaan/ bintek KB
- Pengadaan buku penunjang kegiatan KB
- Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB

**Indikator 2 :
Menurunnya Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu wilayah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak

khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sebesar 3,62 per 1.000 kelahiran hidup atau 29 kasus kematian bayi diantara 8.014 kelahiran hidup. Ini berarti telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 4,50 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga kinerjanya sebesar 114,0% termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian angka kematian bayi tahun 2015 lebih baik (dibawah target yang ditetapkan) bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2014 dengan capaian sebesar 4,08 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula hasil capaian AKB tahun 2015 menunjukkan trend membaik atau capaian cenderung menurun dibawah target yang ditetapkan dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya periode tahun 2010 sampai 2014, ini berarti kinerja tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

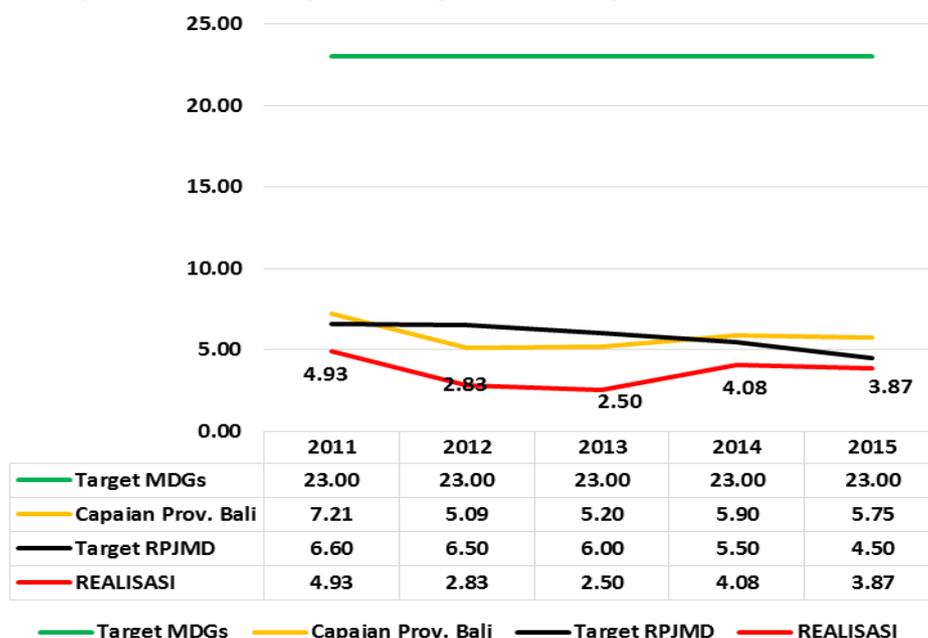
Hasil capaian indikator angka kematian bayi pada tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,50 per 1.000 kelahiran hidup.

Hasil capaian indikator angka kematian bayi di Kabupaten Badung tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan dengan hasil capaian angka kematian bayi di Provinsi Bali sebesar 5.75 per 1.000 kelahiran hidup.

Hasil capaian AKB di Kabupaten Badung tahun 2015 lebih rendah atau telah mencapai target yang telah ditetapkan, bila dibandingkan dengan target angka kematian bayi secara Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI) tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 24 per 1.000 KH dan telah mencapai target yang ditetapkan *Millenium Development Goals* (MDGs) sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir seperti pada Grafik berikut :

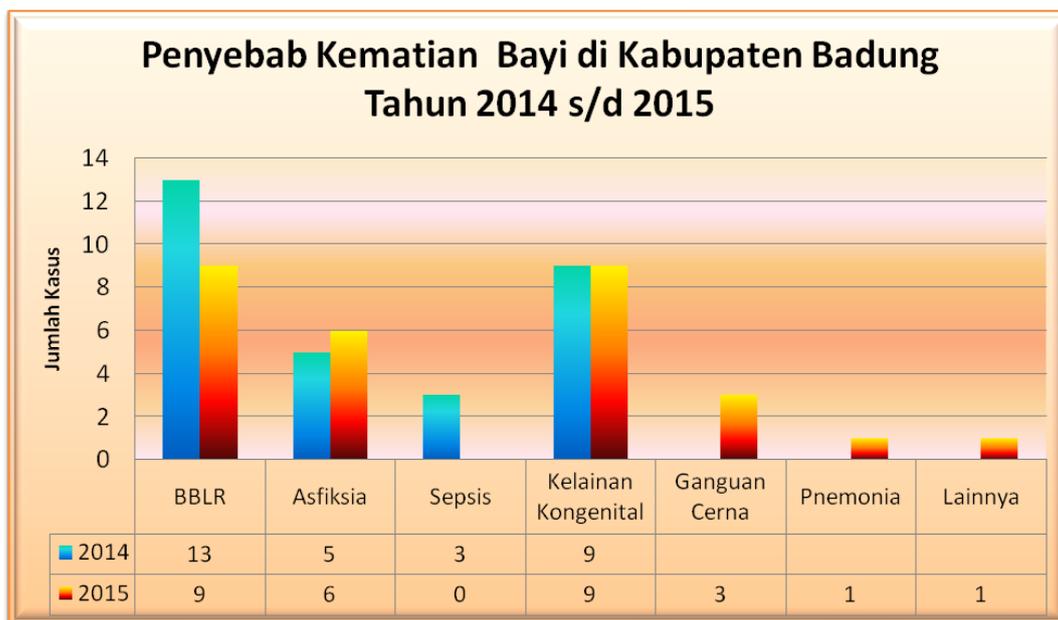
Grafik 3.11
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015



Adapun penyebab kematian bayi pada tahun 2015 sebanyak 29 kasus oleh beberapa faktor yaitu: (1) BBLR, (2) Asfiksia (3) Sepsis (4) Kelainan kongenital, masalah sepsis, gangguan cerna, pneumonia dan penyebab lainnya, selengkapnya seperti pada grafik 4 berikut:

Grafik 3.12

Penyebab Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2015



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator angka kematian bayi seperti berikut:

- a. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Adanya kesepakatan mengenai sasaran antara dinas kesehatan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Badung meliputi: Audit kematian maternal dan perinatal, pelayanan kesehatan bayi seperti imunisasi, MTBS/MTBM serta Pembinaan/ bintek PWS KIA

Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan Pelatihan penanganan obstetri dan neonatal. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 44.669.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.669.200,- (100%).

**Indikator 3 :
Menurunnya Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1.000 balita. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sebesar 3,87 per 1.000 kelahiran hidup atau 31 kasus kematian balita diantara 8.014 kelahiran hidup. Ini berarti telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 5,0 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga kinerjanya sebesar 127,60% termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian angka kematian balita tahun 2015 lebih baik (dibawah target yang ditetapkan), bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2014 dengan hasil sebesar 4,70 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula hasil capaian angka kematian balita tahun 2015 dibandingkan periode tahun sebelumnya 2010 sampai 2014 menunjukkan trend yang cenderung berfluktuatif, namun masih dibawah target yang ditetapkan.

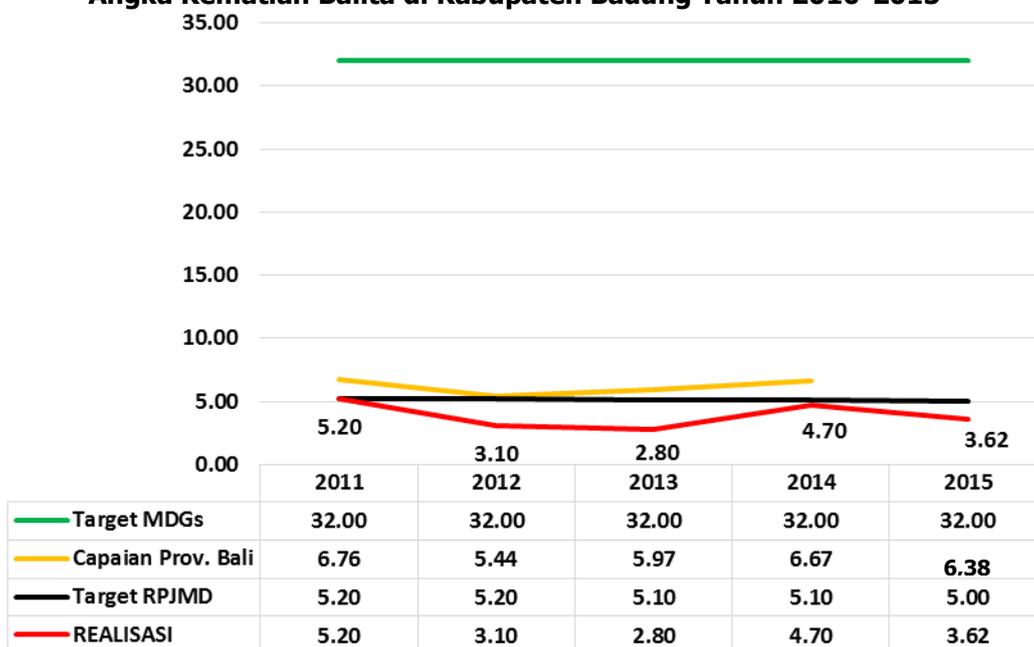
Hasil capaian indikator angka kematian balita pada tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,0 per 1.000 kelahiran hidup.

Hasil capaian angka kematian balita tahun 2015 di Kabupaten Badung lebih baik (dibawah target yang ditetapkan) dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI) tahun 2015 sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup dan telah mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung seperti pada grafik 5 berikut ini.

Grafik 3.13

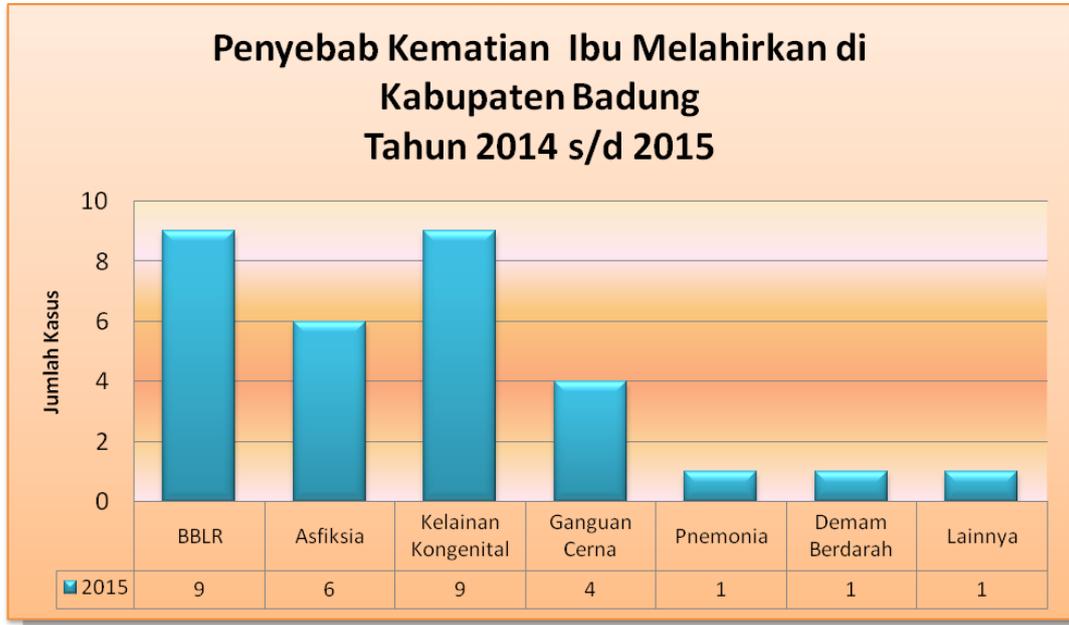
Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015



Berdasarkan grafik 3.5 di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung memiliki kecenderungan berfluktuasi dan Angka kematian balita pada tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014.

Jumlah kematian balita di Kabupaten Badung Tahun 2015 sebanyak 31 balita disebabkan oleh : (1) DHF dan Kelaianan Saluran Cerna. Untuk Tahun 2014 jumlah kematian balita sebanyak 38 orang, dengan penyebab kematian meliputi : (1) BBLR, (2) Asfiksia (3) Sepsis (4) Kelainan kongenital (5) masalah laktasi dan lain-lain.

Grafik 3.14



Faktor-faktor yang mendukung untuk keberhasilan pencapaian indikator angka kematian balita yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan balitanya ke posyandu dan sarana pelayanan kesehatan.
- b. Meningkatnya status gizi balita, yang ditunjukkan rendahnya gizi buruk.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Badung meliputi: Audit kematian maternal dan perinatal, serta Pembinaan/bintek PWS KIA, Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita melalui lomba balita sehat Indonesia, Pelatihan SDIDTKA untuk guru TK dan PAUD serta Penyediaan sarana ramah anak di tiap puskesmas.

Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui tingkat Kabupaten Badung, Pelatihan SDIDTKA (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh kembang anak, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga sadar gizi, Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kurang VitA dan kurang zat gizi mikro lainnya dan Sosialisasi gerakan keluarga sadar gizi. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 718.849.050,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 670.244.050 (93,24%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Tabel.3.18
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita pada Akhir RPJMD Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Kinerja s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	60	99.83	33,62
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	4.5	3.87	114,00
3	Menurunnya Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	5	3.62	127,60

Capaian indikator sasaran meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita yang diukur dengan tiga indikator menunjukkan indikator satu indikator yang belum mencapai target yaitu indikator menurunnya kematian ibu melahirkan dengan capaian 99.83 per 100.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 60 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan indikator menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka kematian balita telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

SASARAN 2.

Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terstandarisasi, Mulai Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, Dan Unit Layanan Kesehatan Lainnya Denga Biaya Pelayanan Yang Terjangkau Oleh Masyarakat Kabupaten Badung

Tabel 3.19
Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terstandarisasi, Mulai Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, Dan Unit Layanan Kesehatan Lainnya Denga Biaya Pelayanan Yang Terjangkau Oleh Masyarakat Kabupaten Badung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	2014			2015		
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2014	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cakupan pelayanan Puskesmas dengan standar ISO	%	0	0	100	30	30	100	45	46.15	102.56
2.	Cakupan pelayanan rumah sakit dengan standar terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR 1 .**Cakupan Pelayanan Puskesmas dengan Standar ISO**

ISO 9001: 2008 merupakan suatu standart internasional di bidang sistem manajemen mutu, yaitu sistim manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu. Perusahaan atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan pihak lain yang independen) ISO, berarti telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu dari produk atau jasa yang dihasilkannya sehingga nilai kompetensi dan imagenya akan semakin meningkat.

Puskesmas sebagai sebuah ujung tombak penyelenggara upaya kesehatan, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya. Sehingga dalam era globalisasi dalam persaingan yang bebas dan ketat ini, diperlukan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas agar memenuhi tuntutan standart internasional (ISO).

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dengan melaksanakan standarisasi puskesmas sesuai standart internasional (ISO 9001 : 2008). Sampai tahun 2015 sudah ada 6 puskesmas yang telah bersertifikat ISO 9001 : 2008 atau sebesar 46,15% dari 13 puskesmas yang ada di Kabupaten Badung. Ini berarti telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2015 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil capaian puskesmas dengan sertifikat ISO 9001 : 2008 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 sampai 2015 yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dimana target akhir RPJMD sebanyak 6 puskesmas bersertifikat ISO 9001 : 2008. Adapun puskesmas di Kabupaten Badung yang telah bersertifikat ISO 9001 : 2008 yaitu :

- a. Puskesmas Kuta I
- b. Puskesmas Kuta Utara
- c. Puskesmas Mengwi II
- d. Puskesmas Mengwi III
- e. Puskesmas Petang I
- f. Puskesmas Abiansemal I

Selanjutnya sisanya 7 (tujuh) puskesmas yang belum bersertifikat ISO 9001 : 2008 akan diselesaikan pada tahun 2016 melalui anggaran APBD. Adapun puskesmas di Kabupaten Badung yang belum bersertifikat ISO 9001 : 2008 yaitu :

- a. Puskesmas Kuta Selatan
- b. Puskesmas Kuta II
- c. Puskesmas Mengwi I
- d. Puskesmas Abiansemal II
- e. Puskesmas Abiansemal III
- f. Puskesmas Abiansemal IV
- g. Puskesmas Petang II

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian indikator ini meliputi: adanya dukungan dana, sumber daya manusia yang mencukupi serta komitmen dari semua pengambil kebijakan. Sedangkan faktor penghambat puskesmas sertifikasi ISO 9001 : 2008 yaitu keterbatasan beberapa tenaga dan peralatan.

Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan konsultasi pendampingan penerapan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008. Alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 629.868.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 514.536.900 (81,69%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Indikator 2. Cakupan Pelayanan Rumah Sakit dengan Standar Terakreditasi

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Standar akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses dimana suatu lembaga yang independen melakukan asesment terhadap rumah sakit. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Standar akreditasi sifatnya berupa suatu persyaratan yang optimal dan dapat dicapai. Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. Dengan demikian akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit, yang sekaligus berperan sebagai sarana manajemen.

Akreditasi Rumah Sakit merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (KARS), sebuah badan yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kesehatan telah mendorong semua rumah sakit di Kabupaten Badung untuk melakukan standar akreditasi.

Hasil capaian indikator cakupan Pelayanan Rumah Sakit dengan Standar Terakreditasi pada tahun 2015 sebesar 100% atau dari 7 (tujuh) rumah sakit yang ada telah semua terakreditasi sehingga capaiannya sebesar 100%. Ini berarti telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2015 sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian cakupan Pelayanan Rumah Sakit dengan Standar Terakreditasi pada tahun 2015 telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Adapun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Badung yang terakreditasi yaitu :

- a. RSUD Badung

- b. RSUD Siloam
- c. RSK Bedah BIMC Kuta
- d. RSK Bedah BIMC Nusa Dua
- e. RSUD Kasih Ibu Kedonganan
- f. RSUD Graha Asih
- g. RSUD Surya Husadha Nusa Dua

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian indikator ini meliputi: adanya dukungan dana, sumber daya manusia yang mencukupi serta komitmen dari semua pengambil kebijakan.

Program yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dan program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal dan Penerbitan Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 37.464.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.779.100 (87,49%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Tabel.3.20

Pencapaian Indikator Sasaran Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan yang Prima Dan Terstandarisasi, Mulai Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, dan Unit Layanan Kesehatan Lainnya dengan Biaya Pelayanan yang Terjangkau oleh Masyarakat Kabupaten Badung pada Akhir RPJMD Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Pelayanan Puskesmas dengan Standar ISO		45,00	46,15	102,56
2	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit dengan Standar Terakreditasi		100,00	100,00	100,00

Capaian indikator sasaran terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung yang diukur dengan dua indikator menunjukkan indikator cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO dan cakupan pelayanan rumah sakit dengan standar terakreditasi sampai tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

SASARAN 3. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat dengan tiga indikator capaian meliputi :

Tabel 3.21
Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2011	2012	2013	2014			2015		
				Kinerja	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	95.45	100	99.56	95	98,16	103,33	95	97,74	102.88
2	Persentase desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	%	74.49	119	111.43	65	79	121,54	70	80,18	114.54

INDIKATOR 1. Persentase kemandirian posyandu purnama dan mandiri

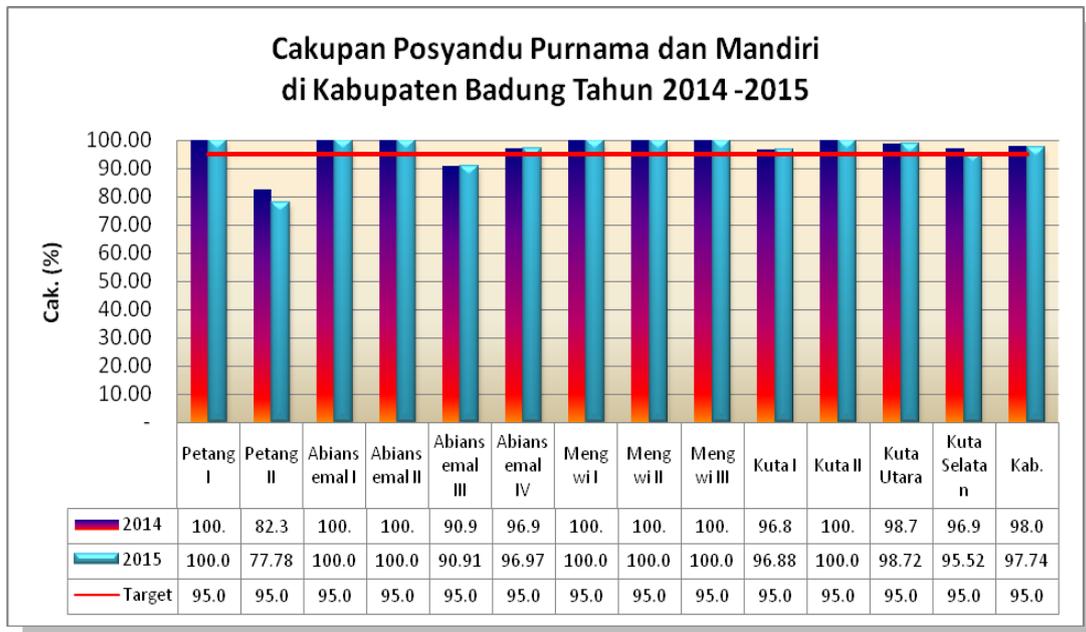


Posyandu merupakan jenis upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang mempunyai kegiatan prioritas yang meliputi KIA, KB, Gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Klasifikasi strata posyandu menjadi 5 tingkatan meliputi: Posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Adapun kriteria tingkatan posyandu berdasarkan kriteria meliputi pelayanan posyandu per tahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas, cakupan program utama (KIA, KB, Gizi, Imunisasi), program tambahan, serta cakupan dana sehat.

Hasil capaian cakupan kemandirian posyandu di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sebesar 97.74% atau sebanyak 562 posyandu dari seluruh posyandu yang ada sebanyak 575 posyandu. Hasil capaian cakupan kemandirian posyandu pada tahun 2015 telah melampaui dari target yang ditetapkan dalam renstra sebesar 95%, dengan demikian kinerjanya sebesar 102.88% termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian cakupan kemandirian posyandu tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 98,08% atau sebanyak 562 posyandu dari seluruh posyandu yang ada sebanyak 573 unit. Penurunan capaian cakupan kemandirian posyandu pada tahun 2015 disebabkan karena adanya penambahan dua posyandu baru dengan strata posyandu madya. Demikian pula hasil capaian cakupan kemandirian posyandu tahun 2015 dibandingkan periode tahun sebelumnya 2010 sampai 2014 menunjukkan trend kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi target yang ditetapkan. Secara rinci capaian kemandirian posyandu tahun 2014-2015 menurut puskesmas seperti grafik 3. berikut:

Grafik 3.15
**Tingkat Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung
 Tahun 2014 – 2015**



Distribusi pencapaian kemandirian posyandu menurut puskesmas tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa puskesmas yang mencapai target sebesar 95% sebanyak 11 puskesmas, sedangkan puskesmas yang masih dibawah target 95% sebanyak 2 puskesmas yaitu Puskesmas Petang II dan Puskesmas Abiansemal III.

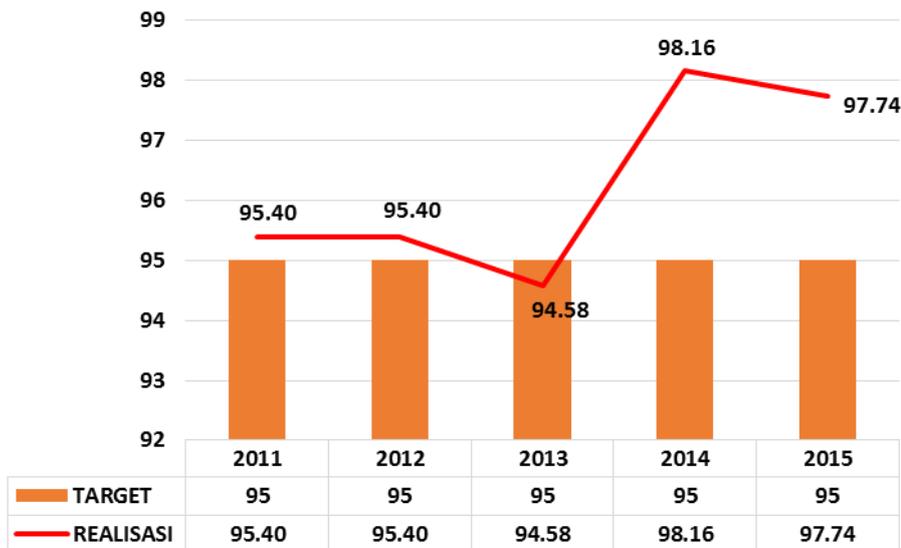
Distribusi tingkat kemandirian posyandu di Kabupaten Badung tahun 2015 yaitu posyandu madya sebanyak 13 unit (2,26%), posyandu purnama sebanyak 435 unit (75,65%) dan posyandu mandiri sebanyak 127 unit (22,09%).

Tabel 3.22
**Tingkat Kemandirian Posyandu Menurut Puskesmas
 di Kabupaten Badung Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								JML
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	
1	PETANG	PETANG I	0	0	0	0.00	28	90.32	3	9.68	31
		PETANG II	0	0	4	22.22	12	66.67	2	11.11	18
2	ABIANSEMAL	ABIANSEMAL I	0	0	0	0.00	31	93.94	2	6.06	33
		ABIANSEMAL II	0	0	0	0.00	25	83.33	5	16.67	30
		ABIANSEMAL III	0	0	3	9.09	28	84.85	2	6.06	33
		ABIANSEMAL IV	0	0	1	3.03	32	96.97	0	0.00	33
3	MENGWI I	MENGWI I	0	0	0	0.00	75	93.75	5	6.25	80
		MENGWI II	0	0	0	0.00	66	80.49	16	19.51	82
		MENGWI III	0	0	0	0.00	45	90.00	5	10.00	50
4	KUTA UTARA	KUTA UTARA	0	0	1	1.28	4	5.13	73	93.59	78
5	KUTA	KUTA I	0	0	1	3.13	28	87.50	3	9.38	32
		KUTA II	0	0	0	0.00	5	62.50	3	37.50	8
6	KUTA SELATAN	KUTA SELATAN	0	0	3	4.48	56	83.58	8	11.94	67
		JUMLAH KAB	0	0	13	2.26	435	75.65	127	22.09	575

Hasil capaian indikator cakupan kemandirian posyandu dengan strata purnama dan mandiri pada tahun 2015 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95% pada akhir RPJMD. Adapun tingkat Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung periode Tahun 2010 s/d 2015 seperti berikut:

Grafik 3.16
**Tingkat Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung
 Tahun 2010 s/d 2015**



Upaya yang dilakukan untuk pencapaian cakupan posyandu purnama dan mandiri antara lain :

- a. Pelatihan kader posyandu
- b. Pemberian insentif untuk semua kader posyandu (573 posyandu x 5 kader posyandu) dengan alokasi Rp 30.000 setiap bulan
- c. Pemberian makanan tambahan bagi balita, bumil dan lansia
- d. Pengadaan baju bagi kader posyandu
- e. Peralatan (timbangan) dan administrasi (sistim informasi posyandu).
- f. Pembinaan posyandu paripurna
- g. Lomba posyandu paripurna

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan terhadap capaian cakupan kemandirian posyandu dengan strata purnama dan mandiri yaitu :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan pada setiap jenjang pemerintahan terhadap keberadaan posyandu.
- b. Adanya dukungan anggaran untuk penguatan lembaga maupun operasional kegiatan posyandu.
- c. Adanya peran serta lintas program (PKK dan kepala Lingkungan/kelian dinas) dalam pengembangan posyandu.

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program upaya pelayanan kesehatan dengan kegiatan Pembinaan Posyandu, Pelatihan kader Posyandu, Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kec. Se- Kab.Badung, Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu, Pelatihan Revitalisasi Posyandu dan Lomba posyandu. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.514.327.425,- yang bersumber

dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.449.948.125,- (97,43%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

INIKATOR 2. Persentase Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga dikategorikan sebagai desa siaga aktif adalah desa yang memiliki pos kesehatan desa (poskesdes), atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kepedulian Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan.
2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari .
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, (b) surveilans berbasis masyarakat, (c) penyehatan lingkungan.
5. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha.
6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di desa atau kelurahan.

Berdasarkan delapan kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif maka pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif menjadi empat desa siaga yaitu: Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri.

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan siaga aktif strata pratama, madya, purnama dan mandiri dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk.

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan siaga aktif strata pertama, madya, purnama dan mandiri dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk. Hasil pencapaian cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 100% atau dari 62 desa yang ada di Kabupaten Badung telah semua desa dibentuk desa siaga aktif sehingga kinerjanya sebesar 100% atau termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian cakupan desa siaga aktif tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa capaian sama-sama 100% atau semua desa telah menjalankan program desa siaga aktif. Demikian pula hasil capaian cakupan desa siaga aktif tahun 2015 dibandingkan periode tahun sebelumnya 2010 sampai 2014 menunjukkan capaian cakupan desa siaga aktif setiap tahunnya telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

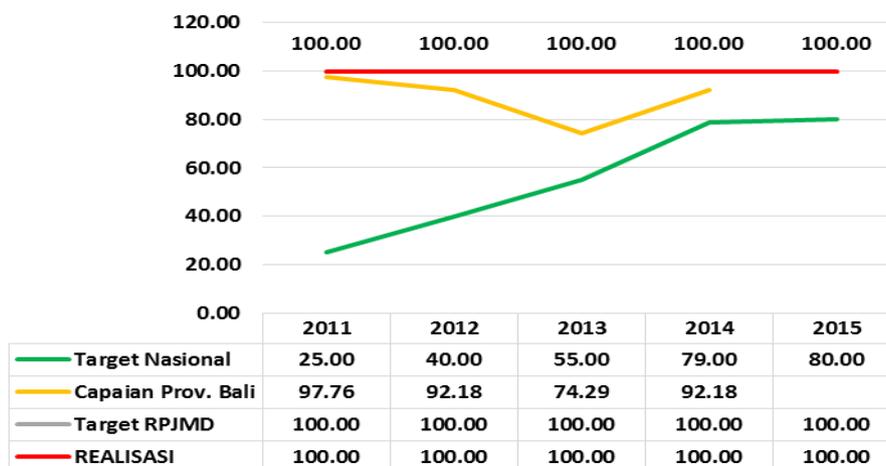
Hasil capaian cakupan kemandirian desa siaga aktif menurut stratanya menunjukkan bahwa desa siaga aktif di Kabupaten Badung lebih dominan kategori strata pertama sebanyak 59 desa dari 62 desa yang ada atau sebesar 95.16%. Secara rinci capaian kemandirian desa/kelurahan siaga aktif tahun 2010-2015 seperti tabel berikut:

Tabel 3.23
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN				JML	%
			PRATAM A	MADY A	PURNAM A	MANDIR I		
1	Petang	Petang I	5	0	0	0	5	100
		Petang II	2	0	0	0	2	100
2	Abiansemal	Abiansemal I	5	0	0	0	5	100
		Abiansemal II	5	0	0	0	5	100
		Abiansemal III	2	1	0	0	3	100
		Abiansemal IV	5	0	0	0	5	100
3	Mengwi	Mengwi I	8	1	0	0	9	100
		Mengwi II	6	1	0	0	7	100
		Mengwi III	4	0	0	0	4	100
4	Kuta Utara	Kuta Utara	6	0	0	0	6	100
5	Kuta	Kuta I	3	0	0	0	3	100
		Kuta II	2	0	0	0	2	100
6	Kuta Selatan	Kuta Selatan	6	0	0	0	6	100
JUMLAH KAB			59	3	0	0	62	100

Hasil capaian indikator cakupan desa siaga aktif pada tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 100%. Secara rinci capaian cakupan desa siaga aktif tahun 2010-2015 seperti grafik 3.8 berikut:

Grafik 3.17
**Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Badung
 Tahun 2010 s/d 2015**



Hasil capaian indikator cakupan desa siaga aktif pada tahun 2015 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI sebesar 80%.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya desa/kelurahan siaga aktif di Kabupaten Badung, meliputi:

- Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan desa siaga aktif.
- Adanya komitmen para pimpinan dengan pembentukan kelompok kerja operasional (POKJANAL) desa siaga tingkat kabupaten
- Adanya forum komunikasi antar desa/kelurahan siaga.
- Pemberian insentif kader desa siaga bagi 62 desa siaga.

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator tersebut adalah program upaya pelayanan kesehatan dengan kegiatan Pengembangan Desa Siaga. Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 52.581.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.351.300,- (99.98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran.

INDIKATOR 3. Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Penerapan PHBS ditujukan semua komponen di masyarakat, namun ada beberapa prioritas penerapannya yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat-tempat umum.

Kriteria yang digunakan untuk menilai penerapan PHBS di tatanan rumah tangga sebanyak 10 indikator terdiri dari Pertolongan persalinan oleh nakes, Balita diberi ASI eksklusif, Menimbang Balita Setiap Bulan, Menggunakan air bersih, Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, Menggunakan jamban sehat, Pemberantasan jentik, Makan buah dan sayur setiap hari, Melakukan aktifitas fisik setiap hari dan Tidak merokok di dalam rumah.

Hasil capaian indikator cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 80.16% atau sebanyak 10.437 rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat dari 13.020 rumah tangga yang dilakukan survey diseluruh Kabupaten Badung. Hasil capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 70% sehingga kinerjanya sebesar 114.54%, termasuk kategori sangat memuaskan.

Distribusi hasil capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga menurut puskesmas seperti grafik 3. berikut :

Tabel 3.24
Cakupan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	RUMAH TANGGA				
			JUMLAH RT	JUMLAH DIPANTAU	% DIPANTAU	JUMLAH BER-PHBS	% BER-PHBS
1	Petang	Petang I	9648	1050	10.88	850	80.95
		Petang II	5237	420	8.02	326	77.62
2	Abiansemal	Abiansemal I	8046	1050	13.05	808	76.95
		Abiansemal II	6876	1050	15.27	844	80.38
		Abiansemal III	7851	630	8.02	490	77.78
		Abiansemal IV	7532	1050	13.94	798	76.00
3	Mengwi	Mengwi I	14067	1890	13.44	1585	83.86
		Mengwi II	11423	1470	12.87	1224	83.27
		Mengwi III	10512	840	7.99	672	80.00
4	Kuta	Kuta I	12480	630	5.05	529	83.97
		Kuta II	10772	420	3.90	336	80.00
5	Kuta Utara	Kuta Utara	9671	1260	13.03	997	79.13
6	Kuta Selatan	Kuta Selatan	28366	1260	4.44	978	77.62
JUMLAH (KAB/KOTA)			142481	13020	9.14	10437	80.16

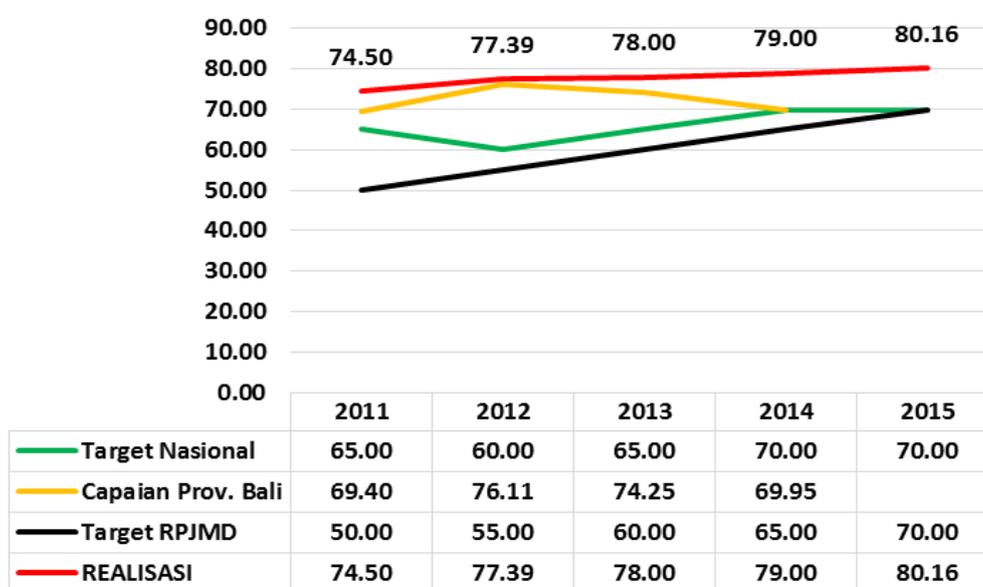
Hasil capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Badung tahun 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2014 sebesar 79,1%.

Hasil pencapaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Badung tahun 2015 melampaui dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 70%.

Hasil capaian indikator cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Badung selalu lebih tinggi setiap tahunnya bila dibandingkan dengan capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga Provinsi Bali.

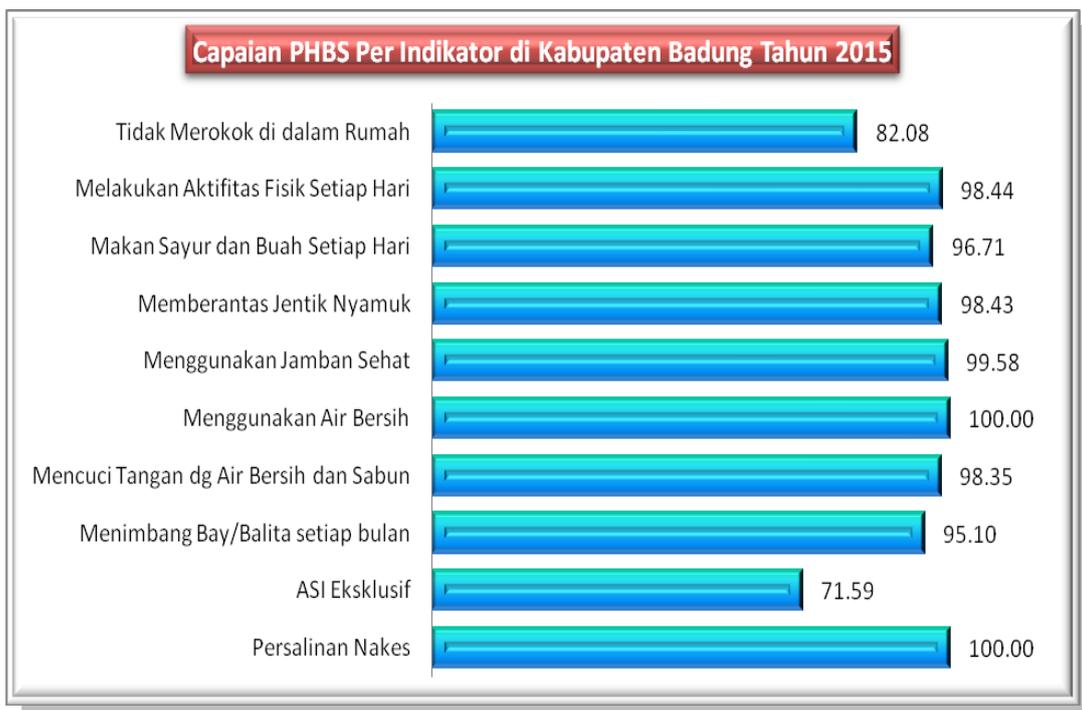
Hasil capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga tahun 2015 di Kabupaten Badung telah melampaui target yang telah ditetapkan secara Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI) tahun 2015 sebesar 70%. Secara rinci capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga tahun 2010-2015 seperti grafik 3.9 berikut:

Grafik 3.18
Cakupan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015



Sedangkan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk masing-masing indikator seperti grafik berikut :

Grafik 3.19
Capaian PHBS Per Indikator di Kabupaten Badung Tahun 2015



Upaya yang dilakukan untuk pencapaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga meliputi:

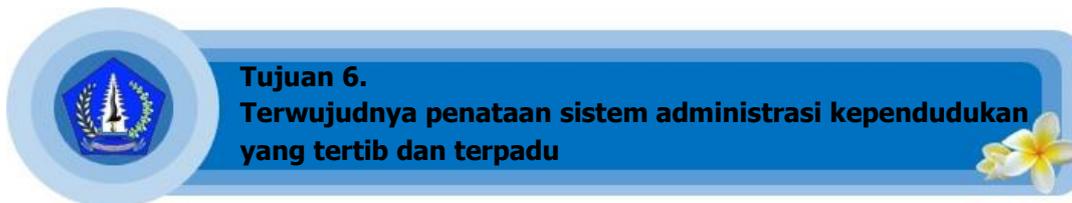
- a. Pengadaan form/kuesioner survey PHBS
- b. Pengadaan kartu, poster dan stiker PHBS tatanan rumah tangga
- c. Pengadaan buku pedoman pembinaan dan penilaian PHBS
- d. Pembinaan dalam rangka lomba desa PHBS
- e. Pelaksanaan survey PHBS oleh tenaga kesehatan dan kader
- f. Sosialisasi kawasan tanpa rokok (KTR)
- g. Pembuatan baliho kawasan tanpa rokok

Untuk pencapaian indikator cakupan PHBS pada tatanan rumah tangga dilaksanakan melalui program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar Rp. 41.137.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.862.900,- (92,04%), sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Tabel.3.25
**Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
 Akhir RPJMD Tahun 2015**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	Cakupan Kemandirian Posyandu Purnama dan Mandiri		95,00	97,74	102,88
2	Cakupan Desa Siaga Aktif		100,00	100,00	100,00
3	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Rumah Tangga	%	70,00	80,18	114,54

Capaian indikator sasaran meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat yang diukur dengan tiga indikator menunjukkan indikator cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri sampai akhir RPJMD telah tercapai. Capaian cakupan desa siaga aktif telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Sedangkan untuk capaian cakupan perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.



Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui karena merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin tinggi perhatian yang diperlukan dalam penyusunan suatu kebijakan pembangunan. Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan manca negara yang mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*Sosio Culture*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan sosial seperti tuntutan penyediaan lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Badung.

Berkenaan dengan kondisi tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Badung menata penduduknya melalui tujuan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 yaitu Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu. Untuk dapat mengetahui ketercapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator tujuan cakupan layanan administrasi kependudukan.

Hasil capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Capaian indikator kinerja tujuan 6 Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan layanan administrasi kependudukan	83,38 %	98,75 %	101,35%	103,00 %

Cakupan layanan administrasi kependudukan, disamping sebagai alat ukur indikator tujuan juga sebagai alat ukur pada indikator – indikator kinerja sasaran 1. cakupan layanan administrasi kependudukan meliputi : prosentase keluarga yang memiliki

KK, prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP, prosentase kepemilikan akta kelahiran dan prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian.

Secara umum terhadap tujuan 6 yaitu Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu sudah tercapai, karena efektifitas pelayanan telah dapat ditingkatkan baik melalui loket pelayanan, maupun jemput bola kelapangan. Disamping itu sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan telah memotivasi penduduk untuk mengurus dokumennya sehingga seperti gayung bersambut antara kebutuhan penduduk dengan layanan yang diberikan.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian analisis alat ukur sasaran, sebagai berikut :

SASARAN 1

Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.

Tabel.3.27
Analisis Capaian Sasaran 8
Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan layanan administrasi kependudukan									
	9. Prosentase keluarga yang memiliki KK	99,43%	99,50%	99,63%	99	100	101,01%	100,00	100,00	100,00%
	10. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	99,27%	99,37%	100,15%	99	98,20	99,19%	100	90,02	90,02%
	11. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	155,87%	105,35%	90,13%	92	92,10	100,10%	95	99,99	105,25%
	12. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	-	-	95	100	105,26%	100	115,39%	115,39%

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta

memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah.

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha-usaha pemerintah di bidang kependudukan, semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan pertumbuhan semakin berhasil. Dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 3.093 jiwa/km², sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan rata-rata paling rendah yaitu 267 jiwa/km². Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk pindah, dan penduduk datang.

Untuk mewujudkan sistem data kependudukan yang tertib dan terpadu diupayakan memberikan pelayanan diantaranya melalui Pelaksanaan program Penataan Administrasi Kependudukan

Terhadap sasaran terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu dimaksud adalah mencakup layanan KK, layanan KTP, layanan akte kelahiran dan akte kematian. Secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Cakupan Layanan Kartu Keluarga

Cakupan layanan Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Pada kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga.

Terhadap indikator sasaran cakupan layanan Kartu Keluarga di Kabupaten Badung dari Tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2015 ditargetkan 100 % (122.175) kepala keluarga memiliki kartu KK dan realisasi sebesar 122.175 (100%) sehingga capaian kinerja mencapai 100 %.

Secara terinci kepemilikan kartu keluarga masing-masing kecamatan seperti tabel berikut.

Tabel 3.28

Tabel kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Badung tahun 2015.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	YANG TELAH MEMILIKI KARTU KELUARGA
1	PETANG	8.740	8.740
2	ABIANSEMAL	25.752	25.752
3	MENGWI	30.080	30.080
4	KUTA UTARA	18.181	18.181
5	KUTA	13.882	13.882
6	KUTA SELATAN	25.540	25.540
	JUMLAH	122.175	122.175

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 tidak terjadi peningkatan namun target yang direncanakan tahun 2015 tercapai 100 %. Perkembangan capaian kinerja setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti tabel berikut.

Tabel 3.29
**perkembangan capaian kinerja
 Pelayanan Kartu Keluarga th 2011-2015**

No	Tahun	Capaian Kinerja
1	2011	99.43 %
2	2012	99.50 %
3	2013	99.63 %
4	2014	101.01 %
5	2015	100.00 %

Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja kepemilikan kartu keluarga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara prosentase memang mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kesadaran penduduk yang wajib memiliki KK untuk mengurusnya segera, karena untuk dapat menerbitkan dokumen kependudukan lainnya minimal harus sudah memiliki KK, sehingga dengan demikian sedikit dipaksa penduduk harus segera mengurus KK nya.

Cakupan layanan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk dan menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau mereka yang dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah, sehingga hal ini disebut penduduk wajib KTP.

Penduduk yang sudah wajib KTP belum semuanya memiliki dokumen kependudukan berupa KTP, karena masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP ketika belum dibutuhkan, kebiasaan tersebut terjadi sebelum tahun 2009, hal itu diakibatkan oleh Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK) yang diterapkan pada saat itu masih bersifat parsial yaitu masing-masing Kecamatan melayani secara otonom sehingga kondisi ini juga memberikan kontribusi kepada kurang tertibnya pengurusan Administrasi Kependudukan.

Kesadaran penduduk di Kabupaten Badung untuk memiliki KTP sudah ada peningkatan, hanya saja mulai 1 Januari 2015 KTP SIAK sudah tidak diberlakukan lagi yang mana capaian kinerjanya dalam tahun 2014 adalah sebesar 99.19 %. Namun posisi itu telah digantikan KTP elektronik yang prosesnya sedikit lebih panjang agak rumit, mengingat prosesnya harus diawali dengan perekaman terutama sidik jari dan eris mata. Kondisi ini tampaknya juga menjadi kendala dalam pencapaian target yang telah dirancang dalam tahun 2015. Disamping sempat terjadi kelangkaan blangko KTP-el karena terjadi

kelambatan pevelangan dipusat. Sehingga kalau dilihat capaian kinerja untuk kepemilikan KTP-el di Kabupaten Badung terjadi penurunan, yang mana hanya tercapai sebesar 90.02 % dari target 100 %. Perkembangan capaian kinerja kepemilikan KTP dalam tahun dari tahun 2015 seperti tabel berikut.

Tabel 3.30
Kepemilikan KTP di Kabupaten Badung tahun 2015.

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	YANG TELAH MEMILIKI KTP
1	PETANG	20.998	19.471
2	ABIANSEMAL	64.099	57.812
3	MENGWI	85.657	75.361
4	KUTA UTARA	41.419	38.300
5	KUTA	36.184	33.270
6	KUTA SELATAN	59.557	52.967

Tabel 3.31
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2011-2015

No	Tahun	Capaian Kinerja
1	2011	99.27 %
2	2012	99.37 %
3	2013	100.15 %
4	2014	99.19 %
5	2015	90.02 %

Perkembangan capaian kinerja pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2011 sampai tahun 2013 telah mengalami peningkatan, akan tetapi dalam tahun 2014 terjadi peralihan dari KTP SIAK menjadi KTP elektronik, sehingga dengan demikian capai kinerja untuk kepemilikan KTP SIAK tidak dapat tercapai secara optimal.

Cakupan layanan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini sianak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Di Kabupaten Badung penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2015 ditargetkan sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 99.99% sehingga capaian kinerja mencapai 105,25%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 5.15 % di tahun 2015. Perkembangan capaian kinerja setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 3.32
**Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Badung tahun 2015.**

NO	KECAMATAN	TARGET KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	YANG TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
1	PETANG	13.006	13.005
2	ABIANSEMAL	35.332	35.332
3	MENGWI	44.433	44.433
4	KUTA UTARA	12.706	12.705
5	KUTA	8.939	8.939
6	KUTA SELATAN	25.366	25.365

Tabel 3.33
**Perkembangan Capaian Kinerja
Pelayanan Akta Kelahiran Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Capaian Kinerja
1	2011	124.46 %
2	2012	105.35 %
3	2013	90.13 %
4	2014	100.10 %
5	2015	105.25 %

Perkembangan capaian kinerja pelayanan akta Kelahiran selama lima tahun yang lalu yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terjadi fluktuasi yang cukup tinggi terutama dalam tahun 2011 sampai mencapai 124,46 % dari target 70%. hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam tahun 2011 adalah batas akhir masa toleransi yang diberikan oleh kementerian Dalam Negeri tentang pemberlakuan ketentuan penetapan pengadilan bagi masyarakat yang melaporkan peristiwa kelahirannya melampaui batas waktu 1 tahun, sehingga masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan dimaksud untuk mencatatkan kelahirannya. Kemudian dalam tahun 2012 sudah mulai ada penurunan atau kondisinya mendekati normal kembali, namun dalam tahun 2013 terjadinya penurunan yang cukup drastis, karena salah satu persyaratan yang dilengkapi bagi masyarakat yang terlambat melebihi 1 tahun melaporkan pencatatan kelahirannya harus dengan penetapan pengadilan, sehingga dengan demikian, banyak masyarakat enggan untuk mengurus penetapan pengadilan ke Pengadilan Negeri. Namun mulai tahun 2014 sampai sekarang kondisi ini telah dianulir oleh ketentuan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

mengisyaratkan bahwa bagi masyarakat yang terlambat melaporkan pencatatan kelahirannya melebihi 1 tahun tidak perlu lagi mencari Penetapan Pengadilan.

Cakupan layanan Akta Kematian.

Akta kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan terutama didalam mengeluarkan data penduduk dari data base kependudukan. Mengingat system yang digunakan dalam aplikasi database kependudukan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Data Penduduk baru bisa dimutasi di database apabila menggunakan bukti kepemilikan akta catatan sipil. Misalnya penduduk yang telah meninggal akan dihapus di database kependudukan baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah memiliki akta kematian. Disamping itu pula kepemilikan akta kematian juga sering digunakan sebagai salah satu syarat untuk memproses Asuransi Kematian.

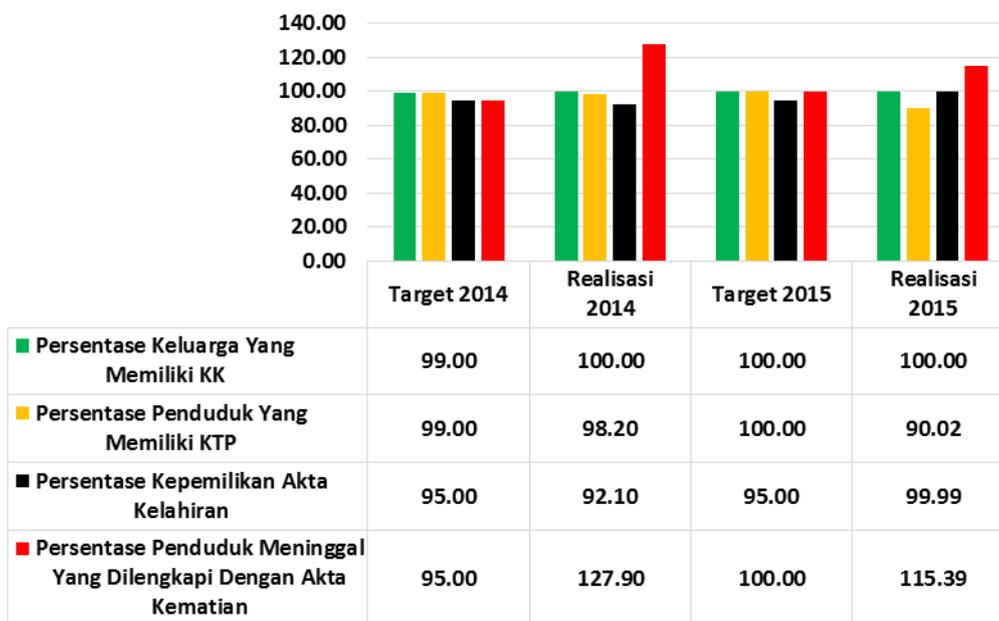
Sebelum tahun 2011, kesadaran penduduk untuk mengurus akta kematian sangat rendah, mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Badung mulai membuat terobosan yaitu memberikan santunan kematian kepada penduduk yang ber KTP Badung. Sehingga sejak tahun 2011 terjadi lonjakan pelaporan peristiwa kematian. Namun demikian laporan penerbitan akta kematian baru dijadikan Indikator Kinerja mulai tahun 2014 sampai sekarang. dalam tahun 2014 realisasi capaian kinerja 105,26 %, dan meningkat lagi dalam tahun 2015 dengan capaian kinerja 115,39%.

Sebagai gambaran kinerja indikator prosentase penduduk yang dilaporkan meninggal dilengkapi akta kematian tercapai 100% dari ditarget (100%) yang ditetapkan sehingga realisasi ini tercapai 115.39%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang dilaporkan meninggal sebanyak 2.526 orang dan seluruhnya telah dibuatkan akte kematian. Jumlah penduduk meninggal yang mendapatkan akte kematian per Kecamatan seperti pada tabel 3.25

Tabel. 3.34
**Jumlah kepemilikan Akta Kematian
di Kabupaten Badung tahun 2015.**

NO	KECAMATAN	LAPORAN MENINGGAL	YANG TELAH MEMILIKI AKTA KEMATIAN
1	PETANG	229	294
2	ABIANSEMAL	543	640
3	MENGWI	709	867
4	KUTA UTARA	357	401
5	KUTA	293	303
6	KUTA SELATAN	395	410

Grafik 3.20
Cakupan layanan administrasi kependudukan



Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35
Pencapaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2010	Kondisi akhir yg diharapkan	Capaian kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan layanan administrasi kependudukan				
	1. Prosentase keluarga yang memiliki KK	-	100,00%	100%	100%
	2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	-	90,02%	100%	90,02%
	3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	-	99,99%	95%	105,25%
	4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	115,39%	100%	115,39%

Dari tabel diatas, untuk kepemilikan Kartu keluarga masyarakat sudah sangat memahami arti penting pemenuhan administrasi kependudukan. Sehingga untuk kepemilikan KK yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan sudah dipenuhi oleh pasangan yang baru menikah. Demikian juga mengenai kepemilikan KTP, untuk kepemilikan KTP SIAK memang terjadi penurunan karena ada peralihan pemilikan dari KTP SIAK ke KTP elektronik. Untuk prosentase kepemilikan akta kelahiran dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi pencapaian, yang mana dalam tahun 2013 sempat tidak tercapai, namun dalam tahun 2014 dan tahun 2015 sudah tercapai. Kedepan untuk memastikan tercapainya target yang telah direncanakan, akan diambil langkah – langkah seperti jemput bola maupun gebyar. Untuk kepemilikan akta kematian, sangat terbantu dengan adanya kebijakan dari Kepala Daerah, memberikan santunan kematian kepada penduduk yang berKTP Badung. Dan kepemilikan akta kematian dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan santunan kematian. Tetapi akta kematian juga diterbitkan bagi mereka yang tidak menuntut santunan kematian, sepanjang yang bersangkutan melaporkan dan mencatatkan peristiwa kematiannya.

Cakupan pelayanan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian secara umum mengalami peningkatan, kecuali pelayanan KTP karena KTP saat ini dalam proses peralihan dari KTP SIAK ke KTP elektronik. Sedangkan Pelayanan KTP yang dihitung kinerjanya mulai tahun 2015 ini adalah pelayanan KTP elektronik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah dengan melaksanakan Penyuluhan ke masyarakat akan pentingnya administrasi Kependudukan, jemput bola, dan gebyar pelayanan akta catatan sipil.

Dari kegiatan tersebut diatas, didukung dengan dana APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Program Pendukung kegiatan dalam tahun 2015

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pemyediaan barang cetak perlengkapan administrasi kependudukan Pelayanan Akta Kelahiran	185.787.800,-
2	Pelayanan Akta Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak	86.380.300,-
3	Pelayanan Jemput bola catatan sipil	34.845.000,-
4	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	94.226.900,-
5		38.736.900,-
	Jumlah	439.976.900,-

SASARAN 2

Terpenuhinya pelayanan keluarga berencana Yang Prima Bagi seluruh Lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat kabupaten badung.

Tabel 3.37

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	133,00	136,00	133,00	0,15	0,13	113,33	0.12	0.12	100,00



Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan sasaran Terpenuhinya pelayanan keluarga berencana Yang Prima Bagi seluruh Lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat kabupaten badung dengan indikator Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun untuk menekan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan menetapkan target kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten badung Tahun 2010-2015. Adapun analisis capaian kinerja dapat dilaporkan sebagai berikut:

Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun , maksudnya adalah dalam perkawinan pertama, umur istri tidak dianjurkan kurang dari 20 tahun atau minimal 20 tahun. Bila usia kawin pertama, istri kurang dari 20 tahun akan menyebabkan beberapa kemungkinan antara lain waktu untuk melahirkan lebih panjang sehingga kemungkinan mempunyai anak akan lebih banyak, menurut ilmu kesehatan wanita umur dibawah 20 tahun alat reproduksinya belum siap sehingga saat persalinan akan beresiko tinggi baik untuk keselamatan ibu maupun bayi. Tahun 2010 di Kabupaten Badung pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun 0,31 dari jumlah pasangan usia subur yang ada ,dan akhir tahun 2015 direncanakan mengalami penurunan menjadi 0,12.

Berdasarkan tabel 3.29 yang didukung oleh indikator sasaran cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun , tahun 2015 telah mencapai capaian kinerja sebesar 0,12 (100 %) dari target yang ditetapkan sebesar 0,12 dan terealisasi sebesar 0,12 . Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dari target yang ditetapkan sebesar 0,15, terealisasi 0,13 dengan capaian kinerja tercapai 133,33 , sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan sebesar 13,33. Hal ini terjadi karena pemasangan target tahun 2014 lebih tinggi sebesar 0,03 di bandingkan dengan tahun 2015.

Bila dilihat capaian kinerja setiap tahunnya selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal karena adanya Komunikasi Informasi dan Edukasi, tentang kesehatan reproduksi remaja kepada remaja melalui beberapa kegiatan seperti Ajang Kreatifitas, Pendirian PIK KRR di tingkat sekolah, sosialisasi yang melibatkan tokoh – tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Semakin kecil angka kawin pertama usia kurang dari 20 tahun semakin baik, artinya perkawinan dini berhasil ditekan.

Dan bila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya, tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar 0,30 terealisasi sebesar 0,20 sehingga kinerja tercapai 133,00. Tercapainya kinerja tersebut karena didukung oleh kegiatan generasi berencana (Gen-Re) melalui media tradisional dengan sasaran setiap kecamatan setiap tahunnya mengirim 1 sekolah , disamping juga mendirikan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK KRR) di sekolah dan sekaa teruna. Setiap tahunnya menysasar ke sekolah – sekolah di wilayah Kabupaten Badung.

Tahun 2012 kinerja tercapai 136 ,00 melebihi dari target yang ditetapkan , hal terjadi karena disamping melaksanakan kegiatan Gen-Re, pendirian PIK-KRR mulai melaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan tahun 2013 ada inovasi kembali yakni melaksanakan ajang kreatifitas remaja, sehingga kinerja setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

Tabel 3.38
perkembangan Gen-Re dan PIK KRR dari tahun 2011-2015

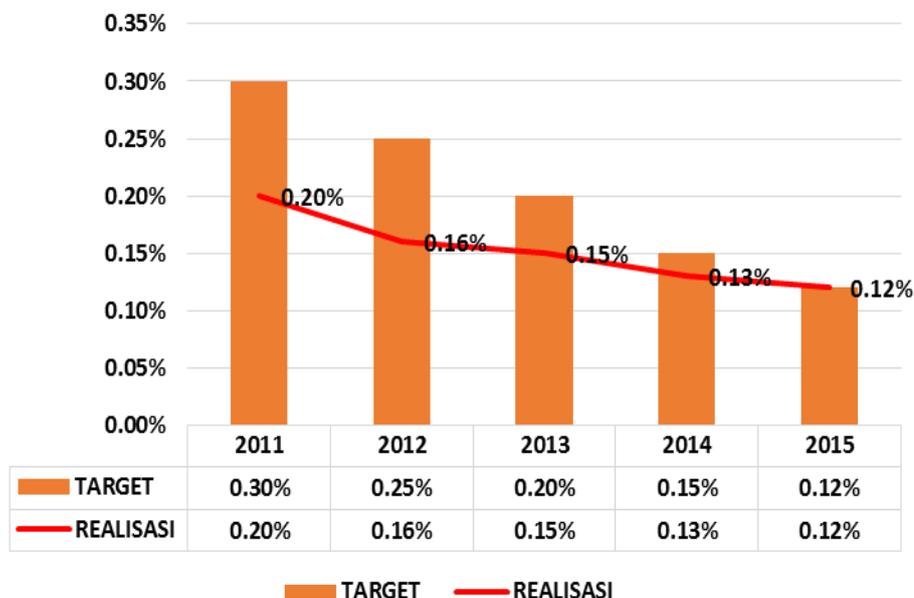
NO	TAHUN	Jml GEN- RE		Jml PIK - KRR	
		KECAMATAN	SEKOLAH	KECAMATAN	SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1	2011	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	10 5 2 6 8 7	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	Akbid Bali Wisnu Dharma SMPN 2 Abiansemal
2	2012	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	10 5 2 6 8 7	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	SMAN 1 Mengwi SMAN 1Kuta Selatan

3	2013	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	10 5 2 6 8 7	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	SMPN 1 Petang SMPN 1 Kuta SMPN 2 Kuta utara
4	2014	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	10 5 2 6 8 7	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	SMPN 1 Mengwi SMPN 1 Abiansemal SMPN 1 Kuta Selatan
5	2015	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	11 5 2 6 9 8	MENGWI ABIANSEMAL PETANG KUTA KUTA UTARA KUTA SELATAN	SMAN 4 Abiansemal SMPN 3 Petang, SMAN 1 Petang SMPN 2 Kuta SMPN 1 Kuta Utara SMPN 2 Kuta Selatan.

Adapaun program yang mendukung terhadap keberhasilan indikator cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun adalah program keluarga berencana dan program kesehatan dan reproduksi remaja dengan total pagu anggaran sampai tahun 2015 Rp. 827.196.505,00 dan terealisasi Rp. 768.878.789,00 Sisa anggaran Rp. 58.245.716,00

Grafik 3.21

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun



Analisa sesuai realisasi akumulasi sampai tahun 2015 dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD di tahun 2015 .

Tabel 3.39

**CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TERPENUHINYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA YANG PRIMA BAGI
SELURUH LAPISAN MASYARAKAT MENUJU KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN
SEJAHTERA BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG TAHUN
2014 DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (0%)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dbawah usia 20 tahun	0,31	0,12	0,12	100 %

Berdasarkan tabel 3.29, diketahui bahwa analisa akumulasi capaian indikator sasaran cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja 100% sesuai target yang ditetapkan.



TUJUAN 7

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.



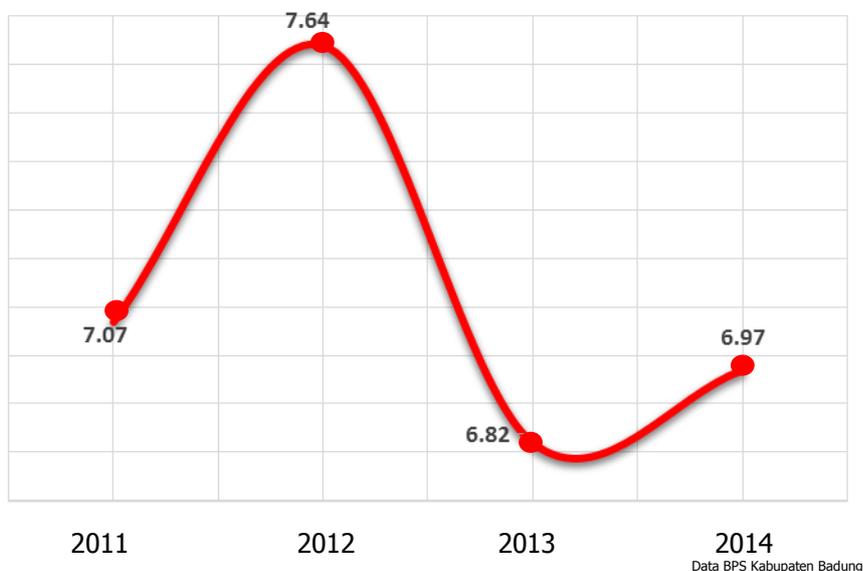
Kabupaten Badung merupakan daerah pusat Pariwisata sekaligus merupakan pusat aktivitas perekonomian dan daerah tujuan para urban. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, ditandai dengan pembangunan pemukiman, pusat-pusat perekonomian, perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, akan membawa dampak sosial baik yang bersifat positif maupun negatif. Kesenjangan sosial yang semakin nyata merupakan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek pemerataan. Pembangunan yang kurang merata cenderung mengakibatkan ketimpangan dalam kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan merupakan fungsi dari investasi yang dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ini selanjutnya menumbuhkan iklim yang mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena masih kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang berdampak pada munculnya permasalahan sosial dengan demikian kemiskinan dan keterbelakangan tersebut harus diupayakan pemecahan masalahnya secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Bertitik tolak pada hal tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan mencantumkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang tertuang pada RPJMD tahun 2010 – 2015 yaitu ingin **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang diukur melalui 1 (satu) indikator tujuan yaitu Persentase penurunan penyandang masalah sosial.**

Grafik 3.22

Laju Pertumbuhan Kabupaten Badung Tahun 2011-2014



Pengukuran terhadap capaian tujuan 7 (ketujuh) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas masyarakat terutama oleh masyarakat miskin , cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Hasil capaian indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.40

**Capaian indikator kinerja tujuan 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan
sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh
masyarakat miskin ,cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya.**

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyandang masalah sosial	13.294	4.326 RTS (32,54%)	4.326 RTS (32,54%)	100%

Indikator tujuan sama dengan indikator sasaran , sehingga indikator tujuan tidak diulas dan secara terinci dijelaskan pada analisa indikator sasaran sebagai berikut.

Analisis capaian indikator kinerja pada indikator sasaran ini secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN
Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

Tabel . 3.41
Analisis Capaian sasaran
Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

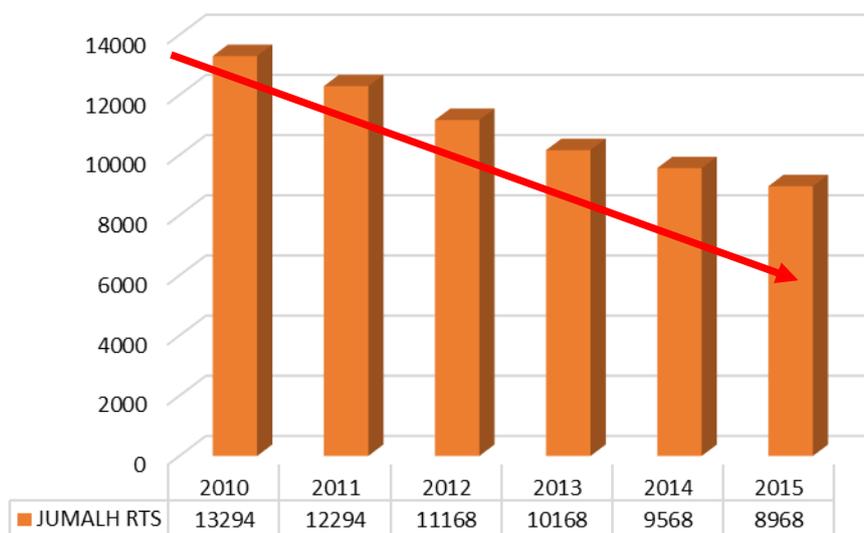
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
						Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penyandang masalah social	%	(1.000 RTS) 100%	(1.126 RTS) 100%	(1.000 RTS) 100%	(600 RTS) 4,51%	(600 RTS) 4,51%	100%	(600 RTS) 4,51%	(600 RTS) 4,51%	100%

Lebih jelasnya ketercapaian alat ukur indicator sasaran tersebut secara rinci dapat diuraikan pada analisis sebagai berikut :

Sasaran **“Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka”** yang akan **disasar dengan indikator** Persentase penyandang masalah social sebatas pada pengukuran rumah tangga miskin atau rumah tangga yang tidak memiliki ketidakberdayaan ekonomi yang sekarang disebut RTS atau rumah tangga sasaran. Dimana pada Tahun 2010 (dengan kondisi awal tahun 2011) terdapat sebanyak 13.294 RTS , dulu disebut sebagai Rumah Tangga Miskin atau Rumah tangga yang tidak memiliki ketidakberdayaan ekonomi yang merupakan masalah social di Kabupaten Badung dan dalam 5 (lima) tahun akan diturunkan menjadi 8.968 RTS. Lebih jelasnya ketercapaian alat ukur indicator sasaran tersebut secara rinci dapat diuraikan pada analisis sebagai berikut :

Penurunan RTS di Kabupaten Badung pada tahun 2011 - 2015 dapat dilihat sesuai grafik 3.14 berikut:

Grafik 3.23
penurunan penyandang masalah sosial Tahun 2011-2015



Ketercapaian alat ukur indicator sasaran tersebut secara rinci dapat diuraikan pada analisis sebagai berikut :

Berdasarkan table 3,32 dapat dijelaskan bahwa terhadap indicator persentase penyandang masalah social pada tahun 2015 ditargetkan 600 RTS (4,51 %) dan terealisasi sebesar 600 RTS (4,51 %) dengan bantuan masing-masing Rp.20.000.000 sehingga dapat dikatakan capaian kinerja tercapai 100% .Bila kita lihat pada awal tahun 2011 masih ada 13294 RTS dan yang ditangani 1000 RTS(7,52%) terealisasi sebesar 7,52% sehingga capaian kinerja 100%, dengan bantuan masing-masing Rp.5.000.000, kemudian ditahun 2012 ditangani 1126 RTS (8,47%) teralisasi sebesar 8,47% dengan capaian kinerja 100%, dengan bantuan masing-masing Rp.7.500.000 dan ditahun 2013 juga ditangani 1000 RTS (7,52%) terealisasi 7,52% sehingga capaian kinerjanya 100% dengan bantuan masing-masing Rp.12.000.000,tahun 2014 ditangani 600 RTS (4,51%) dan realisasinya juga 600 RTS (4,51%),capaian kenerja 100% bantuan masing-masing Rp.20.000.000. Adapun bantuan ini dipergunakan kegiatan perbaikan rumah meliputi : atap,dinding dan lantai. Tercapainya capaian kinerja ini karena secara rutin dan kontinyu dilaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan peningkatan kualitas rumah. Disamping itu 600 RTS penerima bantuan tersebut diberikan bantuan berupa usaha ekonomi produktif (UEP) masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,00. Adapun yang dimaksud dengan UEP adalah serangkain kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, meningkatkan produktifitas, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Usaha yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan berupa beternak , dagang , kerajinan/perukangan dan pertanian.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sama dengan dengan tahun 2015, akan tetapi ada peningkatan nilai bantuan UEP, dimana tahun 2014 bantuan UEP masing-masing sebesar Rp, 4.000.000,00. Pada tahun 2011 bantuan yang diberikan masing-masing Rp.2.500.000 ,tahun 2012 bantuannya Rp.2.500.000 dan tahun 2013 bantuannya Rp.2.500.000.Untuk lebih jelasnya pemanfaatan bantuan UEP seperti table sebagai berikut :

Tabel 3.42
**Perkembangan pemanfaatan
 bantuan UEP dari tahun 2011-2015**

No	Bentuk UEP	TAHUN					KETERANGAN
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	BETERNAK	78%	76,95%	74,72%	66%	69,18%	SAPI,BABI,ITIK AYAM & KAMBING
2	DAGANG	20%	20,49%	19,32%	27,3%	23,30%	CANANG,KOPI, CAMILAN JAJAN,BAMBU
3	KERAJINAN/ PERTUKANGAN	1,5%	1,17%	5,11%	6,7%	8,60%	KATIK SATE, JANUR (TAMAS,BEDOGAN) ALAT PERTUKANGAN
4	PERTANIAN	0,5%	1,39%	0,85%	0%	0%	ALAT-ALAT PERTANIAN SPT ALAT POTONG RUMPUT DAN TRAKTOR

Tahun 2011 bantuan UEP yang diberikan kepada 1000 RTS sebesar 780 RTS (78%) dari penerima bantuan menggunakan untuk kegiatan beternak,200 RTS (20%) untuk kegiatan dagang , untuk kegiatan kerajinan/pertukangan sebanyak 15 RTS (1,5%) dan pertanian 5 RTS (0,5%).Tahun 2012 Bantuan diberikan kepada 1126 RTS sebesar 866 RTS (76,95%),231 RTS (20,49%), untuk kegiatan dagang,untuk kegiatan kerajinan/pertukangan 13RTS (11,17%),dan pertanian 16 RTS (1,39%).Tahun 2013 bantuan diberikan 1000 RTS,yang mempergunakan untuk kegiatan beternak 747 RTS (74,72%),kegiatan dagang 193 RTS (19,32%),untuk kegiatan kerajinan/pertukangan 51 RTS (5,11%),sedangkan untuk kegiatan pertanian 9 RTS (0,86%).Tahun 2014 sebanyak 600 RTS yang menerima bantuan,396 RTS mempergunakan untuk kegiatan beternak (66%),164 RTS (27,3%) yang mempergunakan untuk kegiatan dagang,kemudian 40 RTS (6,7%) yang mepergunakan untuk kegiatan kerajinan/pertukangan,pertanian tidak ada.Di tahun 2015 yang mendapat bantuan sebanyak 600 RTS,415 RTS (69,10%) yang mempergunakan untuk kegiatan beternak,134 RTS (22,30%) yang mempergunakan untuk kegiatan dagang,51 RTS (8,60%) yang mempergunakan untuk kerajinan/pertukangan.

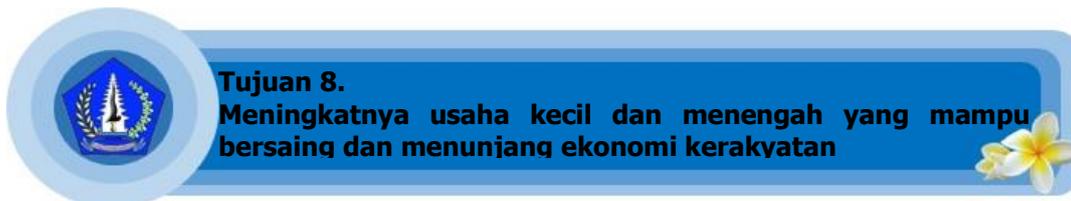
Realisasi akumulasi sampai tahun 2015 dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD di tahun 2015 seperti tabel berikut :

Tabel. 3.43

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENURUNAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s /d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (0%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyandang masalah sosial	13.294 RTS	4.326 RTS (32,54%)	4.326 RTS (32,54%)	100 %

Berdasarkan tabel 3.32, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun ke 5 tahun 2015 pada indikator persentase penyandang masalah sosial sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 32,54% atau sebesar 4326 RTS . Sehingga dapat dikatakan kinerja sudah mencapai kinerja 100 %.

**Tujuan 8.****Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan**

Sebagai wadah kegiatan bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan mampu dan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, dan sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan. Sementara itu UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Berlandaskan pada keinginan pemerintah kabupaten badung untuk menunjang ekonomi kerakyatan sehingga salah satu tujuan pemerintah daerah kabupaten badung adalah meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan yang dijabarkan melalui 2 (dua) indikator tujuan Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung dan Persentase peningkatan nilai ekspor UKM.

Pengukuran terhadap capaian tujuan 8 (delapan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44

**Capaian indikator kinerja tujuan 8
Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan
menunjang ekonomi kerakyatan.**

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung	14.305	5.600 UKM	5.534 UKM	98,82%
2.	Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.017.497,01	US\$.590.140.152,668	368.197.191,86	62.39%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja tujuan 8 adalah sebagai berikut :

Indikator Tujuan 1. Jumlah Pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung

Kondisi awal jumlah UKM di Kabupaten Badung sebanyak 14.305 UKM dan direncanakan dalam lima tahun sesuai target RPJMD tahun 2010-2015 pertumbuhan

sebesar 5.600 UKM atau menjadi 19.905 UKM . Tahun 2015 pertumbuhan sebesar 5.534 atau menjadi 19.839 UKM , dan capaian kinerja baru tercapai 98,82%. Sehingga dapat dikatakan capaian kinerja indikator jumlah pertumbuhan UKM dapat dikatakan tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena terbatasnya modal dari masyarakat untuk mendirikan usaha kecil dan menengah.

Indikator Tujuan 2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM

Kondisi awal nilai ekspor UKM adalah sebesar US\$ 106.017.497,01 dan ditargetkan dalam 5 (lima) sesuai RPJMD tahun 2010-2015 sebesar US\$ US\$.590.140.152,668. Tahun 2015 terealisasi sebesar US\$ sebesar 368.197.191,68 sehingga capaian kinerja baru tercapai sebesar 62,39%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Belum tercapainya tujuan tersebut karena keterbatasan modal masyarakat untuk membuat usaha, krisis global, pelaku usaha belum menemukan daerah tujuan baru yang potensial, adanya kewajiban sertifikasi kayu untuk produk bahan dasar kayu dan kurangnya daya saing produk. Kiranya bisa dilanjutkan periode berikutnya.

Bila dilihat capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung.

Tabel 3.45
**Analisis capaian Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
dalam sistem perekonomian masyarakat Badung .**

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase koperasi sehat dan berkualitas	100%	100%	100%	21,68 %	21,07 %	97,22%	21,68 %	30,10 %	138,8%
2	Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	113,87 %	53,24%	49,0%	118.963.293.568 US\$	63.675.447,62 US\$	53,52%	120.152.926.503US\$	51.860.534,16	43,16%

Indikator 1. Persentase koperasi sehat dan berkualitas--.

Koperasi dan UKM merupakan lembaga usaha bersama yang sangat strategis dapat mempercepat meningkatnya taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan mampu dan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisien ekonomi rakyat, dan sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan.

Sementara itu UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ditempuh dengan memberdayakan Koperasi dan UMKM serta didukung oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial.

Indikator sasaran persentase koperasi sehat dan berkualitas yang dimaksud adalah, dimana koperasi sehat berdasarkan Permen Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 berdasarkan skor nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian . Untuk penilaian skor 80 – 100 termasuk dalam predikat " SEHAT " , sedangkan "BERKUALITAS " dimaksud adalah apabila jumlah penilaian 340 sampai dengan 419 hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007.

Berdasarkan standar koperasi sehat dan berkualitas tersebut diatas, di Kabupaten Badung terdapat 464 koperasi, yang termasuk katagori sehat dan berkualitas baru sebanyak 88 koperasi, dan sisanya sebanyak 376 belum berkondisi baik dan berkualitas dan direncanakan 332 koperasi di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sehat dan berkualitas.

Berdasarkan tabel 3.33 diatas, hasil pencapaian indikator persentase koperasi sehat dan berkualitas tahun 2015 di target sebesar 21,68 % (72 koperasi) dan terealisasi sebesar 30.10 % (100 koperasi) sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 138.8 %, Terjadi peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan karena:

1. Manajemen koperasi yang dinilai jumlahnya 33 kriteria sudah dilengkapi
2. Pinjaman yang berisiko persentasenya kecil
3. Rasio modal sendiri terhadap Total Asset berkisar antara 20% - 80%
4. Volume pinjaman pada anggota lebih besar dari Non Anggota (60% lebih)
5. SHU setiap tahunnya bertambah besar
6. Likuiditas (Kemampuan Koperasi membayar utang jangk pendek)

Apabila Rasio Kas + Bank terhadap kewajiban jangka pendek antara 10% - 20% Tahun 2014 indikator persentase koperasi sehat dan berkualitas di targetkan sebesar 21,68 % (72 koperasi) dan terealisasi sebesar 21,07 % (70 Koperasi) capaian kinerja tidak tercapai , yang disebabkan karena rendahnya modal sendiri pada koperasi

bersangkutan, pemberian kredit kepada pihak ke tiga atau non anggota terlalu banyak, pinjaman modal lebih besar dibandingkan dengan modal koperasi.

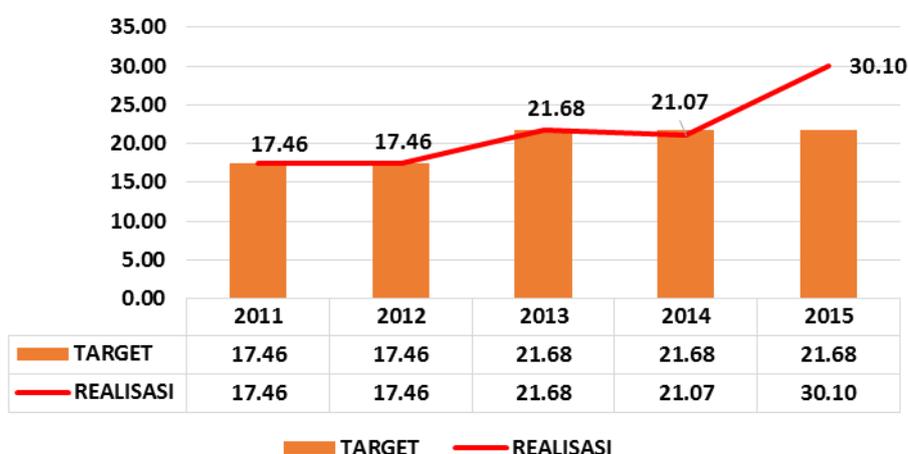
Langkah-langkah yang dilakukan agar koperasi yang kurang sehat menjadi sehat antara lain dengan melaksanakan pelatihan pendampingan dan pembinaan, meningkatkan modal penyertaan dari anggota, mengurangi pinjaman dari pihak luar, mengurangi pemberian pinjaman kepada non anggota serta meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi.

Tahun 2013 dari target yang ditetapkan 21.68% (72 koperasi), terealisasi 21.68% dan capaian kinerja 100 %. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2014 sebesar 2,8%. Tahun 2012 dari target yang ditetapkan 17,48% (58 koperasi) terealisasi 17,48 % dan capaian kinerja tercapai 100%. Tahun 2011 ditargetkan 17,48% (58 koperasi) terealisasi sebesar 17,48 (58 koperasi) dan capaian kinerja tercapai 100%.

Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja dalam setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat adanya perkembangan yang cukup bagus karena telah tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Tercapainya capaian kinerja ini didukung oleh program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan pagu anggaran Rp.414.039.600 di tahun 2015 dan realisasi sebesar 378.580.240. Sedangkan pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 966.220.700. dan realisasi sebesar Rp. 901.346.590. Bila dibandingkan dengan Kota Denpasar jumlah koperasi sehat berkualitas dimana kota Denpasar melaksanakan penilaian terhadap 160 koperasi, sebanyak 146 (91.25%) kategori sehat dan 14 (8.75%) kategori kurang sehat, Kabupaten Badung melaksanakan penilaian terhadap 100 koperasi dengan kategori 100 (100%) koperasi sehat. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi yang sehat dan berkualitas setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3.24

Capaian Indikator Persentase koperasi Sehat dan berkualitas dari tahun 2011-2015.



Selain mewujudkan koperasi di Kabupaten Badung yang sehat dan berkualitas, setiap tahun telah berhasil menumbuhkan koperasi baru, dan sampai tahun 2015 telah berhasil menumbuhkan koperasi baru sebanyak 114 buah koperasi, dan sebaran pertumbuhan koperasi baru di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 3.46
**PERTUMBUHAN KOPERASI DI KABUPATEN BADUNG
PER-KECAMATAN / PERTAHUN (2011-2015)**

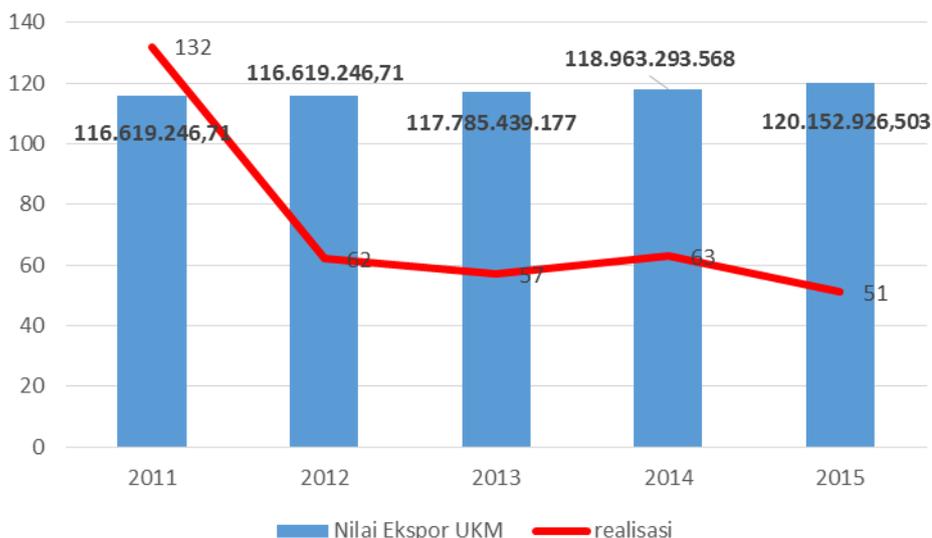
NO	KECAMATAN	2011	2012	2013	2014	2015	JUMLAH PER KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	7
1	PETANG	-	2	1	2	-	5
2	ABIANSEMAL	5	4	4	5	4	22
3	MENGWI	7	7	3	10	9	36
4	KUTA	-	1	-	1	4	6
5	KUTA UTARA	5	6	3	4	6	24
6	KUTA SELATAN	3	7	2	3	6	21
	TOTAL	20	27	13	25	29	114

Indikator 2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM

Dalam era globalisasi perdagangan luar negeri khususnya ekspor mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penambahan devisa suatu daerah. Penetrasi produk ke pasar luar negeri merupakan usaha untuk memperluas pasar dengan tujuan menumbuhkan dunia usaha. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mencapai target ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Adapun produk usaha unggulan ekspor dari Kabupaten Badung pada tahun 2015 didominasi oleh komoditi seperti produk tekstil, kerajinan kayu, kerajinan bambu, kerajinan furniture, kerajinan logam, kerajinan plastik, ikan hias hidup, ikan tuna, kerajinan kulit dan lain-lain.

Berdasarkan Tabel diatas, tahun 2015 menargetkan Nilai Ekspor UKM, US\$ 120.152.926,503 dan terealisasi sebesar US\$ 51.860.534,16 dan capaian kinerja baru tercapai 43,16%, sehingga capaian kinerja belum tercapai. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014 menargetkan Nilai Ekspor UKM, US\$ 118.963.293.568, dan terealisasi sebesar US\$ 63.675.447,62 dan capaian kinerja sebesar 53,52 %, sehingga capaian kinerja belum tercapai. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013, ditargetkan US\$ 117.785.439.177 dan terealisasi sebesar US\$ 57.770.469,90 dan capaian kinerja baru tercapai 49,05 %, Sehingga capaian kinerja belum tercapai. Tetapi bila dibandingkan realisasi, terjadi peningkatan realisasi tahun 2014. Tahun 2012 target US\$ 116.619.246,71 realisasi US\$ 62.094.645,50 dengan capaian kinerja 53,24 %, Tahun 2011 target US\$ 116.619.246,71 realisasi US\$ 132.796.094,68 dengan capaian kinerja 113,87 %

Grafik 3.25
Nilai Ekspor UKM dan realisasi Tahun 2011-2015



Tidak tercapainya capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa factor Antara lain :

1. Krisis global yang pernah dialami negara tujuan ekspor belum pulih, sehingga daya beli masyarakat di tempat tujuan ekspor masih rendah dan lebih mengutamakan membeli kebutuhan primer. Sedangkan produk unggulan ekspor dari Kabupaten Badung dan Bali bukan kebutuhan primer.
2. Pelaku usaha belum menemukan negara tujuan yang baru yang potensial dapat menerima produk dari Kabupaten Badung dan Bali.
3. Tahun 2012 persyaratan ekspor produk yang berbahan dasar dari hasil hutan mulai dketatkan dan diwajibkan melengkapi sertifikat legalitas kayu, persyaratan ini sangat memberatkan pelaku usaha di Kabupaten Badung karena biaya sertifikat legalitas kayu sangat tinggi.
4. Daya saing produk dan pelaku usaha di Kabupaten Badung dan Bali khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan desain produk belum dapat meningkat dan cenderung di kalahkan daerah lain.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten Gianyar realisasi Peningkatan Nilai Ekspor UKM tahun 2015 adalah US\$ 18.853.203,05, dan bila dibandingkan dengan Provinsi Bali realisasi eksport adalah US\$ 481.402.783,80.

Indikator kinerja Persentase peningkatan nilai eksport UKM ini didukung oleh program efisiensi perdagangan dalam negeri dengan pagu anggaran di tahun 2015 sebesar Rp. 1.034.762.100 dengan realisasi sebesar Rp.867.595.132 Sedangkan pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 3.561.436.250. dan realisasi sebesar Rp. 3.072.141.552

Tabel 3.47

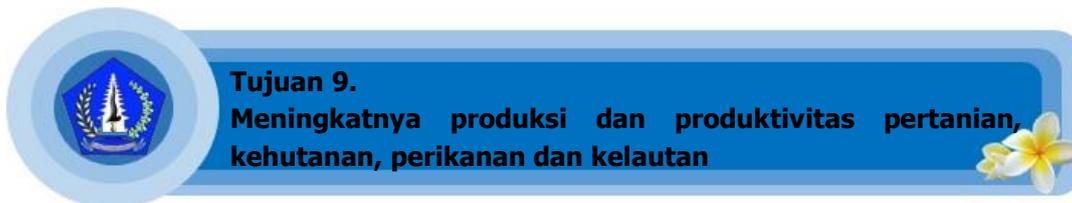
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s /d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (0%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase koperasi sehat dan berkualitas	88	332	358	107,8 %
2	Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.017.497,01	US\$ 590.140.152,66	US\$ 368.197.191,86	62,39 %

Berdasarkan tabel 3.35, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun 2015 untuk indikator persentase kodenoperasi sehat dan berkualitas sudah mencapai target yang ditetapkan di tahun ke 5. karena beberapa hal seperti krisis global, pelaku usaha belum menemukan daerah tujuan baru yang potensial, adanya kewajiban sertifikakasi kayu untuk produk bahan dasar kayu mulai tahun 2012 dan kurangnya daya saing pruduk.

degan rincian capaian kinerja sebagai berikut : tahun 2011 target 17,48 % (58 koperasi) realisasi 17,48 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 target 17,48 % (58 koperasi) realisasi 17,48 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % , tahun 2013 target 21,68 % (72 koperasi) realisasi 21,68 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % , tahun 2014 target 21,68% (72 koperasi) realisasi 21,07 % (70 koperasi) dengan capaian kinerja sebesar 97,22 % dan tahun 2015 target 21,68 % (72 koperasi) realisasi 30,10 % (100 koperasi) dengan capaian kinerja sebesar 138,8 % sehingga sampai akhir RPJMD tahun 2015 target 332 koperasi (100%) realisasi 358 koperasi dengan capaian kinerja 107,8 % .

Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan nilai ekspor UKM sampai tahun 2015 tidak mencapai target, dengan target capaian setiap tahun naik turun(fluktuatif) dengan rincian sebagai berikut : tahun 2011 target US\$ 116.619.246,71 realisasi US\$ 132.796.094,68 dengan capaian kinerja 113,87 %, tahun 2012 target US\$ 116.619.246,71 realisasi US\$ 62.094.645,50 dengan capaian kinerja 53,24 %, tahun 2013 target US\$ 117.785.439,177 realisasi US\$ 57.770.469,90 dengan capaian kinerja 49 %, Tahun 2014 Target US\$ 118.963.293,568 realisasi US\$ 63.675.447,62 dengan capaian kinerja 53,52 % dan tahun 2015 target US\$ 120.152.926, 503 realisasi US\$ 51.860.534,16 dengan capaian kinerja 43,16%. Selama 5 tahun RPJMD (2011-2015) realisasinya sebesar US\$ 368.197.191,86 dari target US\$ 590.140.152,66 dengan capaian kinerja 62,39 % . Ini disebabkan karena beberapa hal seperti krisis global, pelaku usaha belum menemukan daerah tujuan baru yang potensial, adanya kewajiban sertifikakasi kayu untuk produk bahan dasar kayu mulai tahun 2012 dan kurangnya daya saing pruduk.



Tujuan 9.
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan

Pertanian dalam arti luas didalamnya mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan pekerjaan, untuk pelestarian sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup. Walaupun kecenderungan generasi muda yang mau menekuni pekerjaan sektor pertanian sudah menurun, nampaknya tetap harus diakui bahwa pembangunan pertanian dalam arti luas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis antara lain untuk menciptakan ketahanan/ketersediaan pangan, memberikan sumbangan /kontribusi terhadap PDRB, dan sebagai penyedia lapangan kerja. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Badung, disamping untuk memenuhi produksi dan tingkat konsumsi masyarakat, juga diharapkan mendukung kawasan hijau, kawasan konservasi, dan kawasan resapan air yang sangat berguna bagi kawasan di bagian hilirnya.

Berlandaskan tersebut diatas sehingga Pemerintah Kabupaten Badung ingin mewujudkannya melalui sebuah tujuan yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Pengukuran terhadap capaian tujuan 9 (sembilan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. Hasil capaian indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.48

Capaian indikator kinerja tujuan 9
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	162.371,5 ton	174.450 ton	177.004 ton	109,01%
2	Peningkatan produktivitas bahan pangan utama pangan	62,88 kw/ha	64 kw/ha	63,18 kw/ha	100,47 kw/ha
3.	Peningkatan Populasi Peternakan (Ekor)	1.607.998	1.450.000	1.486.869	102,54
4.	Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan (Ton)	192.725	157.556,5	148.913,13	94,51

Analisis atas capaian indikator tujuan 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan, kehutanan, sama dengan analisis pada sasaran sebagai berikut :

Namun demikian dapat disimpulkan tujuan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan belum tercapai karena ada salah indikator tujuan yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 157.556,5 ton dan terealisasi sebesar 148.913,13 ton , sehingga capaian kinerja tercapai 94,51%. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena drastisnya penurunan produksi pada rumput laut, akibat dari adanya pergeseran peruntukan di desa kutuh yang dulunya merupakan sentra pengembangan rumput laut berubah menjadi pengembangan pariwisata sehingga banyak pembudidaya rumput laut berpindah profesi ke sektor pariwisata.

Capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kuantitas, Kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, Perkebunan dan kehutanan.

Tabel 3.49

Meningkatnya kuantitas , kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan.

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4			5	6	7	8	9	10
1	Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	99,8	110,9	90,68 % Ton	174.370	194.930	111,71	174.45	177.004	111,71
2	Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	103,9	101,9	102,56 % Kw/Ton	63,5	62,91	99,07	64	63,18 kw/ha	99,07

Saat ini perkembangan pembangunan pertanian sudah mulai adanya pergeseran yakni dari hanya sekedar menghasilkan produksi semata, mulai memperhatikan sisi bisnis (agrobisnis) dan nilai tambah yang mungkin bisa diharapkan dari usaha tani yang masih ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Badung. Dengan demikian sudah seyogyanya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sehingga masyarakat di Kabupaten Badung dapat menunjang pendapatan untuk kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa untuk sasaran meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas tidak diukur tetapi baru sebatas pengukuran meningkatnya produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di dukung oleh oleh 2 (dua) indikator.

Analisis masing-masing indikator sasaran 1 (satu) dijelaskan sebagai berikut:

Indikator 1. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan.

Komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan yang dimaksud adalah komoditi sebagai bahan pangan utama nabati yang terdiri dari : komoditi padi, palawija dan hortikultura, komoditi perkebunan yang dimaksud adalah komoditi produksi kopi, coklat dan kelapa yang merupakan komoditi sebagai komoditi peningkatan kualitas kesejahteraan petani.

Sedangkan komoditi kehutanan khususnya di kabupaten badung tidak menjadikan yang utama karena tidak memiliki hutan produksi namun hanya sebagai hutan lindung saja. Capaian kinerja masing-masing indikator secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2015, capaian kinerja terhadap indikator sasaran jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan dari target yang ditetapkan sebesar 174.450 ton dan terealisasi sebesar 177.004 ton sehingga capaian kinerja tercapai 108,83 %. Produksi tersebut ditopang oleh produksi dari padi sebanyak 106.181 ton, kemudian dilanjutkan dengan produksi Hortikultura sebanyak 54.935 ton dan produksi tanaman Palawija 14.791 ton. Untuk produksi perkebunan sebesar 1097 ton, sehingga total produksi mencapai 177.004 ton. Tercapainya capaian kinerja ini karena perbaikan pola dan metode tanam legowo 2 : 1 (metode pengaturan kolom, dalam satu kelompok setiap barisan berjarak 20 cm dan antar kolom berjarak 40 cm), subsidi pupuk dan pendampingan tenaga lapangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. Namun bila dibandingkan dengan produksi tahun 2014 terjadi penurunan di tahun 2015, diakibatkan karena musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2015,

Tahun 2014 menetapkan target sebesar 174.370 Ton dan terealisasi sebesar 194.930 Ton sehingga capaian kinerja tercapai 111,71%. Realisasi total produksi tersebut tertinggi disokong oleh produksi padi sebesar 108.759 ton, kemudian produksi palawija 19.524 ton dan diikuti produksi hortikultura 65.708 Ton. Hal ini terjadi karena sebagian besar luas tanaman sumber pangan berupa pangan utama nabati berproduksi dengan baik dan saling bersubstitusi antara beberapa komoditi bahan pangan utama.

Produksi tanaman perkebunan tahun 2014 sebesar 1003 ton, angka ini dapat dicapai karena sebagian besar luas tanaman perkebunan dapat berproduksi dengan baik. Dukungan cuaca dan perlakuan teknis petani terhadap komoditi perkebunan memberikan kontribusi tingkat produksi yang baik untuk peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mendukung indikator ini di dukung dana sebesar Rp. 28.781.360.909,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.833.626.439,00 (75,86 %).

Bila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 produksinya cukup fluktuatif namun masih dapat memenuhi target tahunan dengan trend meningkat.

Program kegiatan Tahun 2015 yang mendukung indikator tersebut adalah Program Ketahanan Pangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 24.726.137.650. Dan program

kegiatan untuk mendukung pencapaian target tersebut mencapai total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun Rp,74.684.784.034

**Indikator 2.
Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)**

Capaian kinerja indikator tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi) tahun 2015 tercapai 63,18kw/Ha dari target yang ditetapkan sebesar 64 Kw/Ha dan telah terealisasi sebesar 98,71 %. Capaian kinerja ini masih kurang sedikit dari target karena beberapa perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan tahun 2015 dan tekanan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga masih kurangnya jumlah air optimal yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Namun dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan produktivitas 0,44 % di tahun 2015.

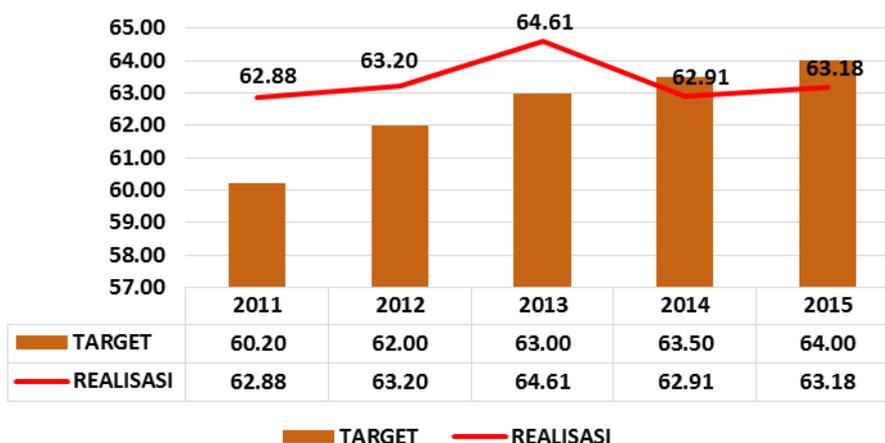
Tahun 2014 capaian kinerjanya tercapai sebesar 99,07 % dari target yang ditetapkan sebesar 63,5 Kw/Ha dan terealisasi sebesar 62,91kw/Ha. Angka Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini karena pemerintah Kabupaten Badung secara intensif melakukan pembangunan dan perbaikan sejumlah saluran irigasi pertanian menjadi irigasi yang permanen. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan luas penanaman padi dan melakukan intensifikasi lahan dengan tanaman palawija yang memerlukan lebih sedikit penggunaan air. Namun penurunan produksi padi dapat diimbangi dengan peningkatan produksi tanaman palawija, sehingga lahan pertanian tetap dapat dikelola dengan baik dan produktif.

Tahun 2011 dan tahun 2012 target produktivitas tercapai karena adanya dukungan subsidi pupuk dan peralatan. Tahun 2013 melebihi target cukup signifikan dengan pendampingan optimalisasi lahan sawah. Pencapaian kinerja untuk produktivitas padi dari tahun 2011 sampai 2015 cukup fluktuatif, tetapi masih dalam tren positif yang tetap memerlukan upaya optimal untuk mencapai tren produktivitas yang lebih baik.

Pada Tahun 2015 untuk mendukung indikator tersebut didukung oleh program peningkatan produksi pertanian/perkebunandan dengan total anggaran sebesar Rp2.203.333.300 dan total anggaran dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp. 9.605.212.050

Grafik 3.26

Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)



Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.50
Capaian Sasaran Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan pada akhir RPJMD Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Kinerja s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan Kehutanan	Ton	858.350	873.446	101,7
2	Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	Kw/Ha	64 Kw/Ha	63,18	98,71

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan indikator jumlah Produksi hasil komoditi pertanian, Perkebunan dan kehutanan sesuai target pada RPJMD tahun 2010-2015 belum tercapai , karena ada salah satu indikator yaitu indikator tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi) belum tercapai, dan baru tercapai 98,71%. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut karena perubahan iklim global yang mempengaruhi pergeseran musim regional.

Sasaran 2 Meningkatnya produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan.

Tabel. 3.51
**Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan.**

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah populasi peternakan	100 %	100%	76,36	1.395.000	1.476.035	105,81 %	1.450.000	1.486.869	102,54%
2	Jumlah produksi perikanan dan kelautan	103,08%	96,50%	76,28	5.002,03	6.596,18	131,87 %	5.061,87	6.760,62	133,56%

Berdasarkan tabel 3.37, sasaran meningkatnya produksi hasil komoditi peternakan , perikanan dan kelautan didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu indikator sasaran jumlah populasi peternakan dan indikator jumlah produksi perikanan dan kelautan, dan secara terinci masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator sasaran 1 Jumlah populasi peternakan.

Perkembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk pemenuhan terhadap kebutuhan protein hewani. Pemerintah Kabupaten Badung terus mengembangkan usaha peternakan tradisional kearah komersial melalui pembinaan teknis, bantuan sarana prasarana dan permodalan sehingga pendapatan peternak dapat ditingkatkan.

Jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan sangat fluktuatif. Perubahan-perubahan pada jumlah populasi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kelahiran, kematian, pemasukan dan pengeluaran (mutasi) ternak baik antar kabupaten maupun antara pulau. Pada tahun 2011 Jumlah populasi ternak ditargetkan sebanyak 1.661.692 ekor dan terealisasi 100%. Pada tahun 2012 jumlah populasi ternak juga terealisasi 100 % dari target yang ditetapkan, Namun jumlah populasi secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah populasi tahun 2011 yaitu menjadi 1.357.001 ekor atau menurun sekitar 18,34 %. Penurunan jumlah populasi terutama terjadi pada ternak babi dan ayam. Fluktuatifnya harga babi dan meningkatnya harga pakan ternak ayam membuat minat peternak berkurang dalam pengembangan usaha ternak babi dan ayam.

Pada Tahun 2013 Jumlah populasi ternak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 meskipun peningkatannya belum signifikan sebesar 0,66 % yaitu dari 1,357.001 ekor menjadi 1.366.005 ekor. Peningkatan jumlah populasi ini terutama terjadi pada komoditas ternak Unggas dan babi. Sementara jumlah populasi ternak sapi potong mengalami penurunan cukup besar.

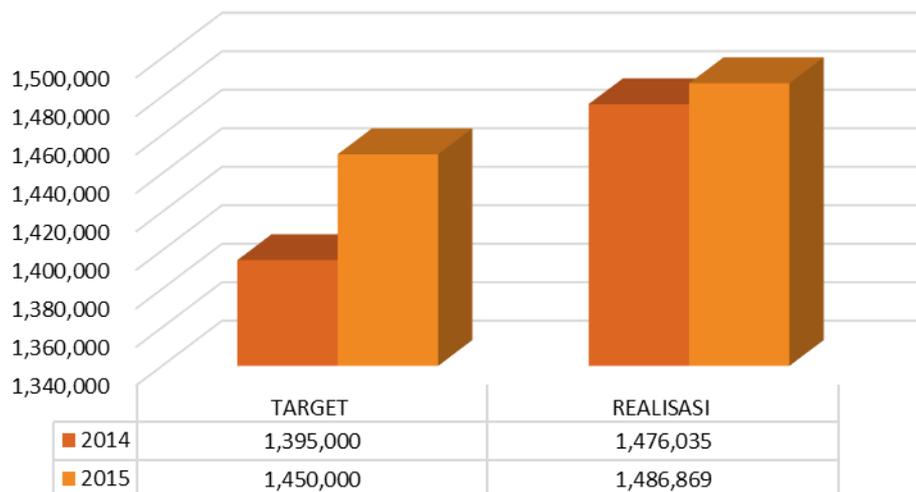
Dengan terjadinya fluktuasi pada jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung, dimana terjadi penurunan jumlah populasi jika dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun awal yaitu tahun 2010, maka pada tahun 2014 dilakukan revisi terhadap target capaian untuk indikator Jumlah populasi ternak. Revisi ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian target akibat adanya penurunan jumlah populasi ternak terutama ternak sapi potong sebagai dampak dari kebijakan Gubernur Bali tahun 2011 yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 46 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Tata Cara Pengeluaran Bibit Sapi Bali, sehingga banyak bibit Sapi Bali yang dikirim keluar Pulau Bali yang berdampak terhadap turunnya populasi ternak sapi bibit di Kabupaten Badung. Target jumlah populasi ternak tahun 2014 mengalami revisi target awal sebesar 1.860.789 ekor direvisi menjadi 1.395.000 ekor dan target jumlah populasi ternak tahun 2015 diubah dari 1.938.806 menjadi 1.450.000 ekor.

Sesuai dengan target populasi ternak tahun 2015 sebesar 1.450.000, terealisasi sebesar 1.486.869 sehingga capaian kinerja mencapai 102,54 % dari target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap indikator sasaran tersebut sudah melampaui dari target yang ditetapkan. Tingkat capaian jumlah populasi ternak sebesar 1.486.869 ekor tidak terlepas dari berbagai program yang dilaksanakan antara lain program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi peternakan dan program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Pelaksanaan program-program dan kegiatan tersebut di atas dengan didukung anggaran sebesar Rp. 5.339.594.874,- bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015, disamping juga didukung anggaran yang bersumber dari dana APBN yang dikelola oleh Provinsi Bali.

Pada tahun 2015 jumlah populasi ternak di Provinsi Bali secara keseluruhan berjumlah 21.214.249 ekor, sedangkan populasi ternak nasional berjumlah 2.035.609.000 ekor. Jika dilihat dari jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Badung tahun 2015 yaitu sebesar 1.486.869 ekor, maka kontribusi Kabupaten Badung dalam mendukung populasi ternak di provinsi baru sebesar 7,01% dan secara nasional baru 0,073%.

Bila dibandingkan dengan Jumlah populasi peternakan tahun 2014, maka tahun 2015 jumlah populasi mengalami peningkatan sebesar 0,73 % yaitu dari 1.476.035 ekor tahun 2014 menjadi 1.486.869 ekor pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya perkembangan populasi ternak tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3.27
**Jumlah populasi peternakan
 Tahun 2014-2015 di Kabupaten Badung**



Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah populasi tahun 2015 mencapai 102,54 % dari target yang ditetapkan. Sementara tahun 2014 realisasi mencapai 105,81 % dari target populasi yang ditetapkan.

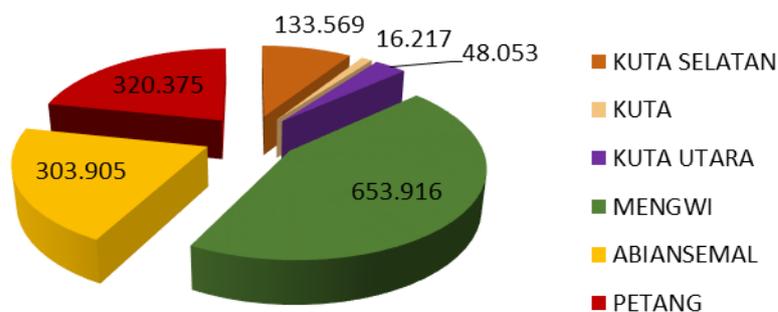
Untuk 2015 tingkat populasi ternak Kecamatan Mengwi memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung sebesar 43,98 %. Sedangkan Kecamatan yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung adalah Kecamatan Kuta sebesar 1,09 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.52
Populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015

NO	KECAMATAN	POPULASI TERNAK (EKOR) tahun 2015							
		SAPI	KUDA	KERBAU	BABI	KAMBING/DO MBA	UNGGA S	ANEKA TERNAK	JUMLAH
1	KUTA SELATAN	9.378	-	-	5.100	20	132.682	12.534	133.569
2	KUTA	231	-	-	37	-	103	4.218	16.217
3	KUTA UTARA	1.508	-	-	3.707	128	27.207	12.940	48.053
4	MENGWI	4.880	-	-	28.310	85	585.399	18.040	653.916
5	ABIANSEMAL	4.912	-	-	29.359	256	260.159	13.258	303.905
6	PETANG	9.862	-	-	10.484	404	293.992	17.666	320.375
JUMLAH 2015		30.771	0	0	76.997	893	1.299.552	78.656	1.486.869
JUMLAH 2014		37.862	0	0	82.479	807	1.294.797	60.090	1.476.035
JUMLAH 2013		38.128	14	2	84.771	720	1.195.121	47.249	1.366.005

Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2015 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar pie dibawah ini:

Grafik 3.18
Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung Tahun 2015.



Secara keseluruhan data target dan realisasi jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.53
Populasi ternak

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (realisasi Th. 2010)	Tahun	Target	Realisasi
Populasi Ternak	1.607.998	2011	1.661.692	1.661.692
		2012	1.357.001	1.357.001
		2013	1.366.005	1.366.005
		2014	1.395.000	1.476.035
		2015	1.450.000	1.486.869

Indikator sasaran 2 Jumlah produksi perikanan dan kelautan.

Kabupaten Badung mempunyai garis pantai sekitar 82 km, sehingga mempunyai potensi sumberdaya perikanan dan kelautan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang dan biota laut lainnya. Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Tahun 2015 Produksi perikanan di Kabupaten Badung sebesar 6.760,62 ton, atau terealisasi sebesar 133,56 % dari target yang ditetapkan yaitu 5.061,87 ton. Realisasi produksi perikanan tahun 2015 terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6.113,81 ton dan produksi perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar (kolam air tenang, saluran irigasi dan sawah) sebesar 274,92 ton dan budidaya laut (rumput laut) sebesar 311,89 ton. Realisasi produksi perikanan tahun 2015, melampaui target yang ditetapkan antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dilaksanakannya berbagai program di sub-sektor kelautan dan perikanan seperti program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan budidaya perikanan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir serta program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2014, tingkat capaian produksi perikanan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar yaitu 2,49 % dari 6.596,18 ton pada tahun 2014 menjadi 6.760,62 ton pada tahun 2015.

Pada tahun 2011 capaian kinerja untuk indikator jumlah produksi perikanan terealisasi sebesar 103,08 %, yaitu dari target sebesar 37.239,4 ton terealisasi sebesar 38.386,3 ton. Sementara pada tahun 2012 dan tahun 2013 capaian kinerja untuk indikator jumlah produksi perikanan belum dapat terealisasi 100 %, dimana pada tahun 2012 dari target sebesar 50.323,8 ton hanya terealisasi sebesar 48.564 ton atau 96,50 %. Dan Tahun 2013 realisasi produksi perikanan dari target 59.929,32 ton hanya mampu terealisasi sebesar 49.099,32 ton atau 81,93 %. Tidak tercapainya target produksi perikanan dalam dua tahun ini disebabkan oleh terjadinya penurunan yang drastis pada

produksi rumput laut. Hal inilah yang menyebabkan pada tahun 2014 dilakukan revisi terhadap target capaian produksi perikanan.

Secara keseluruhan produksi perikanan di Kabupaten Badung tahun 2015 yaitu sebesar 6.760,62 ton, jika dibandingkan dengan produksi perikanan di Provinsi Bali sebesar 228.873,4 ton, maka kontribusi Kabupaten Badung terhadap tingkat produksi perikanan di Provinsi Bali baru mencapai 2,95%.

Secara keseluruhan data target dan realisasi jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (realisasi Th. 2010)	Tahun	Target	Realisasi
Produksi Perikanan	31.228,10	2011	37.239,4	38.386,3
		2012	50.323,8	48.564,0
		2013	59.929,4	49.099,32
		2014	5.002,03	6.619,5
		2015	5.061,87	6.760,62

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

Tabel. 3. 55
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN MENINGKATNYA KUANTITAS, KUALITAS DAN KONTINYUITAS PRODUKSI HASIL KOMODITI PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah populasi peternakan	ekor	1.450.000	1.486.869	102,54 %
	Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	157.556,50	148.913,13	94,51 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja terhadap indikator jumlah populasi peternakan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah terealisasi sesuai target. Namun untuk indikator jumlah produksi perikanan dan kelautan, sesuai target pada RPJMD di Kabupaten tahun dari tahun 2011 sampai 2015 (Tahun) belum tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 94,51 % dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan yang cukup drastis pada produksi budidaya rumput

laut yang ada di Kecamatan Kuta Selatan terutama pada tahun 2014 dan 2015 akibat adanya pergeseran peruntukan khususnya di Desa Kutuh, yang dulunya merupakan sentra produksi rumput laut berubah menjadi destinasi pariwisata yang berdampak pada pengurangan jumlah petani rumput laut dari 5 kelompok menjadi 1 kelompok sehingga sangat berpengaruh terhadap penurunan produksi rumput laut.



Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan tulang punggung penjaga ketentraman dan ketertiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Badung.

Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Badung merupakan merupakan salah satu tujuan pembangunan di pemerintah daerah kabupaten Badung, dimana sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan melalui 2 (dua) indikator tujuan yaitu indikator jumlah pelanggaran perda yang ditemukan dan indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan analisa pengukuran dapat disimpulkan bahwa tujuan terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat pada wilayah Kabupaten Badung sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015. Untuk lebih jelasnya terinci pada masing-masing alat ukur diuraikan sebagai berikut :

Pengukuran terhadap capaian tujuan 10 (sepuluh) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil capaian indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.56
**Capaian indikator kinerja tujuan 10
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	1.764 pelanggaran	1.500 pelanggaran	1.658 pelanggaran	89,46%

Analisis atas capaian tujuan 10 terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, sama dengan analisis pada sasaran.

Namun demikian terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat belum tercapai karena ada salah satu indikator tujuan yaitu jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.500 pelanggaran dan terealisasi sebesar 1.658 pelanggaran, sehingga capaian kinerja tercapai 89,46 %. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung meningkat dari yang telah ditetapkan yang diakibatkan semakin

meningkatnya tingkat investasi, migrasi penduduk, alih fungsi lahan, dll sebagai dampak perkembangan pariwisata dimana para pengusaha atau investor tidak berpedoman pada Perda yang berlaku sehingga tingkat pelanggaran yang ditemukan dilapangan sangat tinggi. Disamping itu juga disebabkan regulasi berupa Perda keberadaannya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pariwisata yang sangat pesat sehingga SKPD penginisiasi Perda seharusnya melakukan revisi Perda untuk meminimalisir tingkat pelanggaran.

Analisa capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 3.57
Analisa Capaian Sasaran
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Tahun 2013 – 2015

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	72,48 %	83,01 %	83,39 %	1.560	1.763	86,98 %	1.500	1.658	89,46 %

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan daerah perlu didukung kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan pengukuran terhadap jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung, dimana merupakan salah satu indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Badung dengan target dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

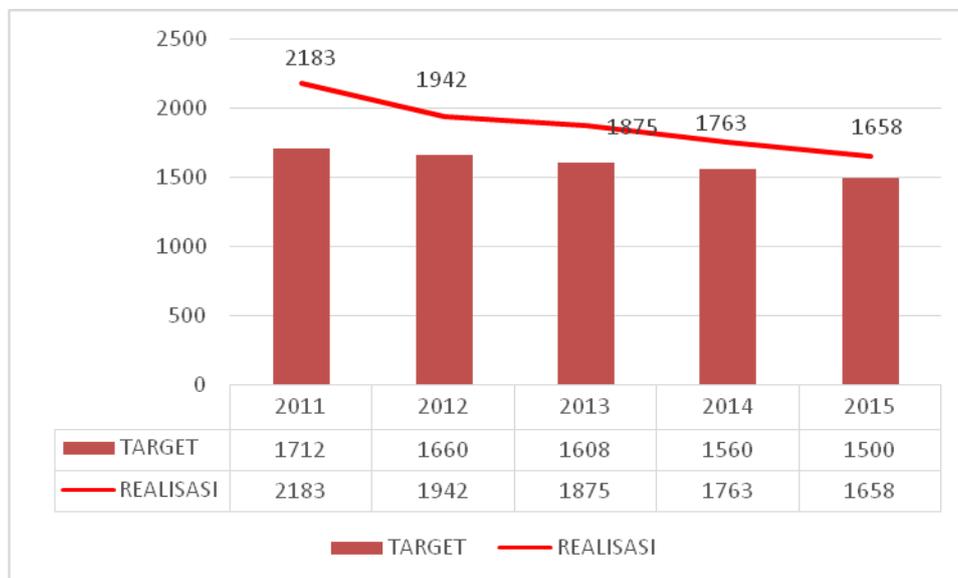
Secara menyeluruh tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung meningkat dari yang telah ditetapkan. Bukan berarti satuan polisi pamong praja tidak maksimal melaksanakan tugasnya melainkan karena diakibatkan semakin meningkatnya tingkat investasi di Kabupaten Badung dimana para pengusaha atau perusahaan yang melaksanakan usahanya tidak berpedoman pada PERDA yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan cara lebih mengoptimalkan petugas patroli untuk melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran keamanan dan ketertiban umum serta menindaklanjuti semua laporan,

pengaduan dan perintah khusus untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda.

Grafik. 3.29

JUMLAH PELANGGARAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2011-2015



Hasil analisa terhadap pengukuran indikator kinerja jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban dapat dijelaskan bahwa tahun 2015 dari target yang ditetapkan 1.500 pelanggaran terealisasi 1.658 pelanggaran sehingga capaian kinerja tercapai 89,46 %. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena diakibatkan semakin meningkatnya tingkat pelanggaran yang ditemukan dilapangan sangat tinggi diakibatkan para pengusaha atau investor tidak berpedoman pada Perda yang berlaku di Kabupaten Badung. Tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 1.560 pelanggaran terealisasi sebesar 1.763 pelanggaran dan capaian kinerja tercapai 86,98 %. Bila dibandingkan terjadi penurunan pelanggaran di Tahun 2015 sebesar 5,9 %.

Tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 1.712 pelanggaran terealisasi sebesar 2.183 pelanggaran dan capaian kinerja tercapai 72,48 %. Tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 1.660 pelanggaran terealisasi sebesar 1942 pelanggaran dan capaian kinerja tercapai 83,01 %. Tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 1.608 pelanggaran terealisasi sebesar 1.875 pelanggaran dan capaian kinerja tercapai 83,39 %. Bila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban mengalami penurunan memenuhi target tahunan dengan trend capaian kinerja meningkat.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.58
**Capaian Indikator Jumlah Pelanggaran keamanan dan ketertiban
Tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja 2015 (%)
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	1764 pelanggaran	1.712	1.660	1.608	1.560	1.500	2.183	1.942	1.875	1.763	1.658	86,98

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban dengan kondisi awal 1764 pelanggaran. Tahun 2011 rencana kinerja 1.712 pelanggaran dengan realisasi 2.183 dan capaian kinerja 72,48%. Tahun 2012 rencana kinerja 1.660 pelanggaran dengan realisasi 1.942 dan capaian kinerja 83,01%. Tahun 2013 rencana kinerja 1.608 pelanggaran dengan realisasi 1.875 dan capaian kinerja 83,39%. Tahun 2014 rencana kinerja 1.560 pelanggaran dengan realisasi 1.763 dan capaian kinerja 86,98%. Tahun 2015 rencana kinerja 1.500 pelanggaran dengan realisasi 1.658 dan capaian kinerja 89,46%.

Realisasi jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban terhadap Perda dan Perbup yang ditemukan di lapangan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan tren pencapaian yang meningkat sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015.

Tabel 3.59
**Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Perda dan Perbup
di Kabupten Badung Tahun 2011-2015**

No.	Perda Yang Dilanggar	No. Perda/ Perbup/SK Bupati	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Larangan Mendirikan Bangun-bangunan pada Daerah Jalur Hijau / Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan	Perda No. 3 Tahun 1992 / Perda No. 27 Tahun 2013	1298	1259	1342	1317	1320
2.	Kebersihan dan Ketertiban Umum	Perda No. 4 Tahun 2001	64	24	55	69	12
3.	Penataan Pembangunan dan Pengoprasian Menara Telekomunikasi Terpadu	Perda No. 6 Tahun 2008	4	-	11	11	6
4.	Izin Gangguan	Perda No. 9 Tahun	220	207	137	155	161

		2010					
5.	Pajak Air Tanah	Perda No. 1 Tahun 2011	7	3	-	1	1
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda No. 20 Tahun 2011	7	-	10	5	5
7.	Kepariwisata	Perda No. 2 Tahun 2012	559	443	296	189	148
8.	Pengaturan Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	Perbup No. 36 Tahun 2005	9	6	24	13	4
9.	Valuta Asing	Keputusan Bupati No. 1052 Tahun 2002	15	-	-	3	1
Jumlah :			2183	1942	1875	1763	1658

Berdasarkan Tabel 3.58 dan 3.59 tersebut diatas, diketahui bahwa Indikator sasaran jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban dengan kondisi awal 1764 pelanggaran. Tahun 2011 rencana kinerja 1712 pelanggaran dengan realisasi 2.183 dan capaian kinerja 72,48%. Tahun 2012 rencana kinerja 1660 pelanggaran dengan realisasi 1945 dan capaian kinerja 83,01%. Tahun 2013 rencana kinerja 1608 pelanggaran dengan realisasi 1875 dan capaian kinerja 83,39%. Tahun 2014 rencana kinerja 1560 pelanggaran dengan realisasi 1763 dan capaian kinerja 86,98%. Tahun 2015 rencana kinerja 1500 pelanggaran dengan realisasi 1658 dan capaian kinerja 89,46%.

Realisasi jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban terhadap Perda dan Perbup yang ditemukan di lapangan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan tren pencapaian yang meningkat sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun 2011-2015 melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Anggaran Rp. 2.755.508.200 dan Realisasi sebesar Rp. 2.510.125.200. Tahun 2010 dengan Pagu Anggaran Rp. 175.362.000 dan Realisasi sebesar Rp. 166.062.000 Tahun 2011 dengan Pagu Anggaran Rp.341.202.500 dan Realisasi sebesar Rp. 328.152.500. Tahun 2012 dengan Pagu Anggaran Rp. 294.099.500 dan Realisasi sebesar Rp. 282.647.000. Tahun 2013 dengan Pagu Anggaran Rp. 858.344.500 dan Realisasi sebesar Rp. 707.144.500. Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 843.663.900 dan Realisasi sebesar Rp. 843.513.900. Tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 242.835.800 dan Realisasi sebesar Rp. 182.605.300.

Sasaran 2. Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

Peran merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dimana peran dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat. Hanya dengan

menjalankan peran, seseorang akan memperlihatkan kedudukan sosialnya dalam suatu lingkungan kehidupan. Peran yang ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Peran merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya. Pada prinsipnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah untuk tidak keburu membesar. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah merespon dengan cepat setiap laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Badung. Dimana keberhasilan dan kegagalan terhadap indikator Kinerja Sasaran Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima dilaksanakan dengan menetapkan target-target yang telah ditetapkan selama lima tahun dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 30%, tahun 2012 ditargetkan sebesar 40%, di tahun 2013 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2014 ditargetkan 60 % dan di tahun 2015 sebesar 65%.

Adapun laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima Tahun 2011 dengan target kinerja 30%, dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 2.183 pelanggaran dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu hari sebanyak 689 pelanggaran dengan realisasi capaian kinerja 31,57%. Tahun 2012 dengan target kinerja 40%, dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 1.942 pelanggaran dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu hari sebanyak 881 pelanggaran dengan realisasi capaian kinerja

45,37%. Tahun 2013 dengan target kinerja 50%, dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 1875 pelanggaran dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu hari sebanyak 984 pelanggaran dengan realisasi capaian kinerja 52,48%. Tahun 2014 dengan target kinerja 60%, dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 1763 pelanggaran dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu hari sebanyak 1124 pelanggaran dengan realisasi capaian kinerja 63,75%. Tahun 2015 dengan target kinerja 65% dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 1658 pelanggaran dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu hari sebanyak pelanggaran dengan realisasi capaian kinerja 67,91%.

Tabel. 3.60
Analisis capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

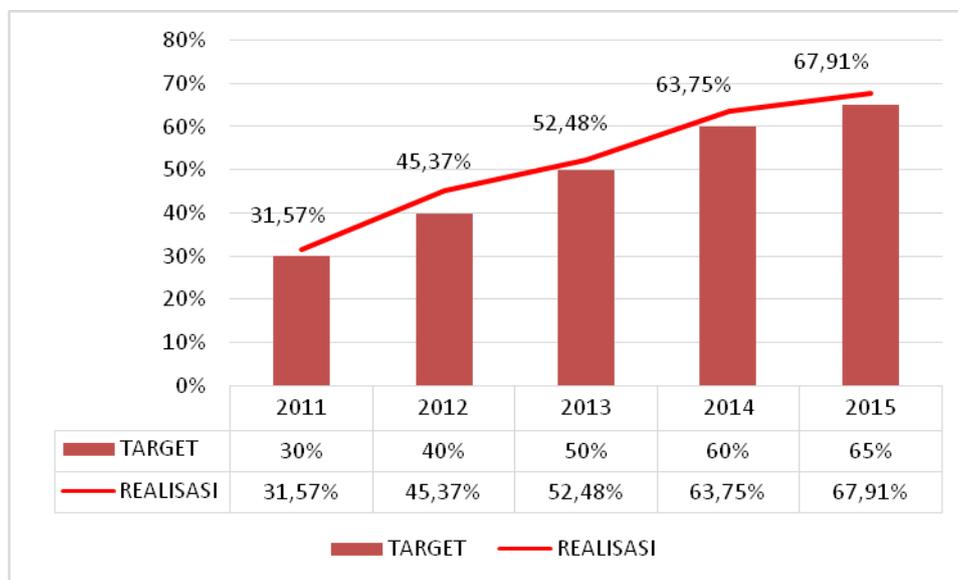
No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1	Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima.	105,23%	113,43%	104,96%	60%	63,75%	106,25%	65%	67,91%	104,48%

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan petugas patroli untuk melakukan pemanggilan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan proses pemeriksaan dan selanjutnya penindakan terhadap semua pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum khususnya Perda dan Perbup dan menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Peraturan Bupati.

Perkembangan capaian kinerja indikator jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan pencapaian yang meningkat sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara rinci capaian persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima seperti table berikut.

Tabel 3.30

Capaian Indikator persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima Tahun 2011 s/d 2015





Tujuan 11.
Terjaminnya terwujudnya *good government and clean government*.

Good and Clean Government dapat diartikan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari Good and clean government adalah terwujudnya Good Governance. Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "alignement" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep "good governance" dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Pemerintah kabupaten akan berusaha menghadapi tantangan tersebut dengan mengangkat tujuan terjaminnya terwujudnya good government dan clean government yang dijabarkan melalui alat ukur sasaran 1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dengan 2 indikator kinerja , sasaran 2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma standar, standar prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusa pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel dengan 1 indikator kinerja.

Secara umum terhadap tujuan 11. yaitu terjaminnya terwujudnya good government dan clean government sudah tercapai optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015 yakni terbukti dari tercapainya masing-masing alat ukur pada masing-masing indikator opini pemeriksaan BPK memperoleh WTP , peningkatan pendapatan capaian kinerja tercapai 100% dan bahkan ada peningkatan dari target yang ditetapkan serta nilai akuntabilitas tercapai 100 % dan terjadi peningkatan 5,89% dari target yang ditetapkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 75,89.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pada masing-masing alat ukur , secara rinci dijelaskan melalui analisis sebagai berikut :

Pengukuran terhadap capaian tujuan 11 (sebelas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu Terjaminnya terwujudnya good government and clean government yang didukung oleh 2 (dua) indikator tujuan yaitu indikator opini pemeriksaan BPK dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil capaian indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.61
Capaian indikator kinerja tujuan 11
Terjaminnya terwujudnya good government and clean government.

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Opini pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	100%
2.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	35,72	70	75,89	108,41

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja tujuan 11 tidak dijelaskan sehubungan indikator tujuan sama dengan indikator kinerja sasaran. Dan secara umum dapat disampaikan bahwa tujuan 11 sudah mencapai target yang ditetapkan. Bila dilihat capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

Tabel 3.62
Analisis Capaian sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan daerah
Yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Opini Pemeriksaan BPK	75%	100%	100%	100	50%	50	100%	100%	100%
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan)	140,57 %	174,85 %	112,32 %	2.197.959.212	2.720.082.776	123,75 %	2.302.169.811	2.997.052.221	130,18 %

Berdasarkan tabel di atas pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu didukung oleh dua indikator sasaran yaitu indikator Opini Pemeriksaan BPK dan indikator Pendapatan Asli Daerah secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1. Opini pemeriksaan BPK

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan kalangan swasta. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan atas kinerja pemerintahan serta meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

Terhadap indikator Opini pemeriksaan BPK, Tahun 2015 Kabupaten Badung menargetkan WTP dan terealisasi WTP, tercapainya capaian kinerja ini adanya komitmen pimpinan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari aparat pemeriksa untuk selalu tat pada aturan dan ketentuan pengelolaan keuangan dan barang yang berlaku.

Jika dilihat capaian kinerja tahun 2011 capaian kinerja tercapai 75%. dengan opini WDP karena masih ditemukan adanya kelemahan berupa penganggaran dan realisasi belanja hibah berupa BOS kepada SDN dan SMP tidak tepat, dan mutasi aset tetappada Disdikpora belum dapat dijelaskan. Serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih ditemukan adanya pendapatan dari kali JKBM pada puskesmas se-Kabupaten Badung dalam tahun anggaran 2010 diwujudkan langsung tanpa melalui mekanisme APBD.

Tahun 2012 capaian kinerja mencapai 100%, dengan opini WTP dengan paragraf penjelasan. Tercapainya capaian kinerja ini karena ditemukan dalam sistem pengendalian intern masih ditemukan adanya penghapusan inventaris barang daerah belum sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan barang daerah.

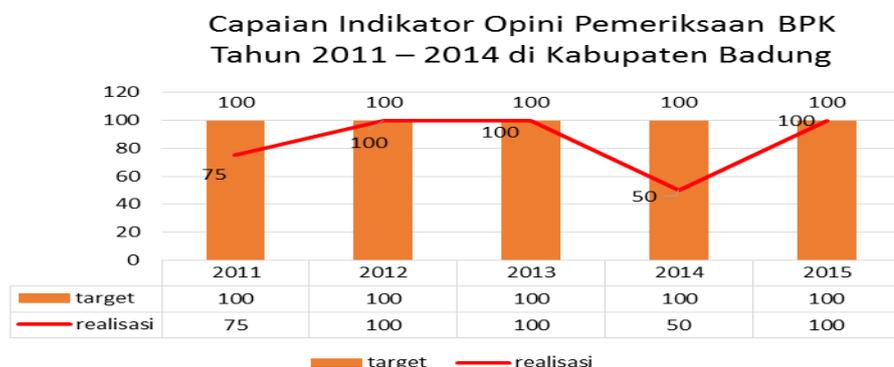
Tahun 2013 capaian kinerja mencapai 100% yaitu dengan opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana dalam aspek SPI masih ditemukan adanya kelemahan yaitu adanya asset tetap hasil pengadaan dana BOS reguler belum dicatat dalam kartu inventaris barang.

Capaian Kinerja tahun 2014 mencapai 50 % dengan opini Tidak Wajar (TW) tidak mencapai target yang ditetapkan, tidak tercapainya capaian kinerja ini karena pemerintah kabupaten Badung belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap secara komprehensif dan menyeluruh.

Program dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut ada 3 program yaitu Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan sebanyak 38 buah dengan total pagu anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kinerja tersebut adalah Rp. 2.607.438.841,00.

Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian kinerja setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.31
**Capaian Indikator Opini Pemeriksaan BPK
 Tahun 2011 – 2014 di Kabupaten Badung**



Indikator 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow functions*, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tujuan otonomi itu sendiri.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat di wilayah bersangkutan yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa capaian kinerja terhadap indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.302.169.811 dan realisasi sebesar Rp.2.997.052.221 sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 130,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.2.197.959.212 terealisasi sebesar Rp.2.720.082.776.745,93 dan capaian kinerja tercapai sebesar 123,75%, sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja di tahun 2015 sebesar 6,43%.

Tercapainya capaian kinerja ini karena tingginya komitmen pemerintah untuk meningkatkan PAD, sehingga terus berupaya yakni melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terkait Penerimaan pembayaran pajak daerah dan pemindahbukuan penerimaan pajak daerah ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Badung yang diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 446 Tahun 2012/ 0350.107.110.2012.2 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Ke Kas Daerah Secara Elektronik, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan, Menerapkan sistem online pajak daerah dalam memantau transaksi wajib pajak, dalam pemungutan pajak air tanah untuk meningkatkan akurasi pendataan menggunakan alat dan sistem aplikasi *barcode*, pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak baru lebih diintensifkan agar mampu menggali potensi-potensi Pajak Daerah baru dan melakukan pembaruan data terhadap wajib pajak.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah siap untuk melaksanakan Pemungutan PBB-P2 di Tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung maka telah dibentuk UPT PBB P2 dan BPHTB Badung Utara dan Badung Selatan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap pemungutan PBB P2 dan BPHTB di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung telah melaksanakan Pemungutan PBB P2 lebih awal dari tenggang waktu akhir yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yaitu paling lambat tahun 2014 PBB P2 harus sudah dialihkan pemungutannya dari Pajak Pusat menjadi pajak Daerah.

Capaian kinerja tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.1.068.867.054 terealisasi sebesar Rp.1.868.996.893 atau 174,85 %. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan penerapan sanksi administratif yang diterapkan oleh Pemerintah daerah dan Pengalihan penerimaan pembayaran yang semula dipungut oleh Petugas Pemungut Pajak Daerah dialihkan kepada Bank Persepsi dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Bali untuk mengurangi sentuhan langsung antara aparatur dan Wajib Pajak.

Capaian kinerja tahun 2011 dari target sebesar Rp.1.000.811.849 terealisasi sebesar Rp. 1.406.835.182 atau 140,57 %. Capaian ini merupakan awal dari penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dimana di Tahun 2011 ada pengalihan kewenangan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan realisasi. PAD Tahun 2011 sebesar Rp.1.406.835.182, tahun 2012 Rp.1.868.996.893, tahun 2013 Rp.2.279.053.294, tahun 2014 Rp. 2.720.082.776.745,93 dan Tahun 2015 Rp.2.997.052.221 capaian kinerja pada tahun 2015 ini telah mencapai 130,18% lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2014 sebesar 123,75 %. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah (dalam ribuan) dari target sebesar Rp.2.487.460.318 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.598.759.044 (104,47 %)
2. Retribusi Daerah (dalam ribuan) dari target sebesar Rp. 93.910.097,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 96.000.197,78 (102,22%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (dalam ribuan) dari target sebesar Rp.142.703.761 dapat direalisasikan sebesar Rp. 139.724.642 (97,91%)

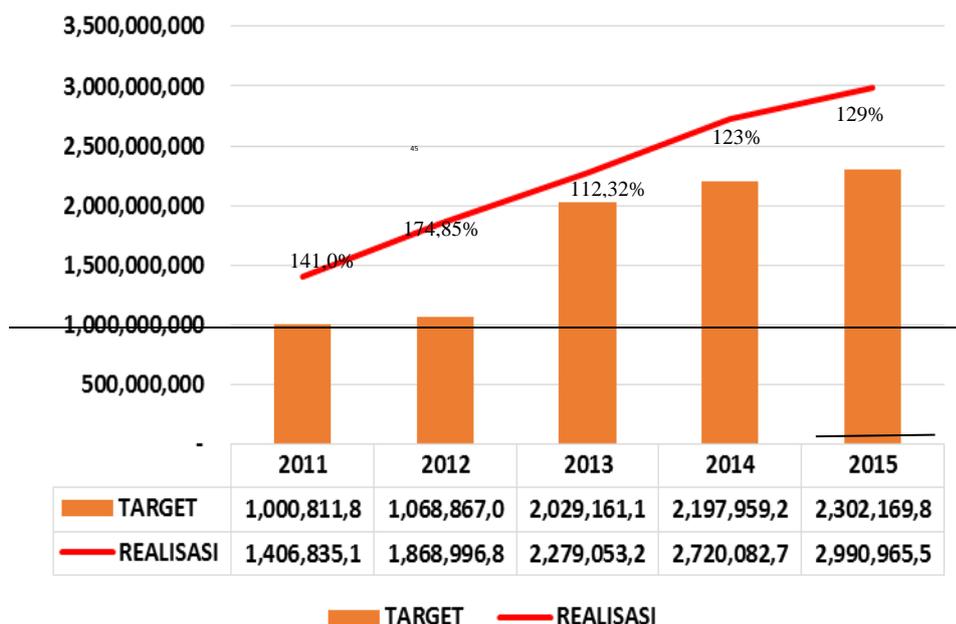
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (dalam ribuan) dari target sebesar Rp.107.959.902 dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.481.713 (144,94 %)

Tabel 3.63
realisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2014-2015

No	PAD	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)	Target Induk APBD 2015	Target Perubahan APBD 2015	Realisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	PAD (dalam ribuan)	2,197,959,212	2,720,082,776	2,302,169,811	2,581,898,768	2,832,034,078	2,997,052,221
2	Pajak Daerah	1,986,068,718	2,339,852,467.0	2,080,233,073	2,302,810,000	2,487,460,318	2,598,762,809
3	Retribusi Daerah	75,687,000	119,485,800.0	79,275,505	75,244,748	93,910,097	96,041,768.00
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	77,554,931	125,339,003.0	81,231,999	111,812,395	142,703,761	142,995,660.00
5	Lain-lain PAD yang sah	58,648,562	135,405,506.0	61,429,233	92,031,625	107,959,902	159,251,982.00

Perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dapat dilihat seperti grafik sebagai berikut :

Grafik 3.32
Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan pendapatan asli daerah Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung



Tabel 3.64
**Perbandingan PAD Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar
 Tahun 2015**

No	PAD	KOTA DENPASAR		KAB. BADUNG	
		Target 2015	Realisasi 2015	Target 2015	Realisasi 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	PAD (dalam ribuan)	724,497,965	776,176,266	2,302,169,811	2,997,052,221
2	Pajak Daerah	525,454,412	549,362,947	2,080,233,073	2,598,762,809
3	Retribusi Daerah	47,853,560	59,243,426	79,275,505	96,041,768.00
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	35,289,993	35,341,143	81,231,999	142,995,660.00
5	Lain-lain PAD yang sah	115,900,000	132,228,748	61,429,233	159,251,982.00

PAD Kota Denpasar s.d Desember TA 2015

Kabupaten Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar diantara Kabupaten/Kota di Bali yang disusul oleh Denpasar. Apabila dibandingkan dengan Realisasi PAD Kota Denpasar maka Target PAD Kabupaten Badung memiliki selisih lebih besar yaitu Rp.2.214.789.332. Apabila dibandingkan terhadap capaian kinerja Tahun 2015 maka Kabupaten Badung memiliki Capaian Kinerja sebesar 130,18% sedangkan Kota Denpasar dengan Capaian Kinerja sebesar 107,13%.

Pencapaian realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang memuaskan diharapkan mampu memberikan imbas positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung, dengan kemandirian fiskal yang baik maka diharapkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Badung dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum RPJMD yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.65
**sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan daerah
 Yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu
 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015.**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s/d. Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Opini pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	100%
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan)	Rp.936.887.975,37	Rp. 2,302,169,811	Rp. 2.997.052.211	130.18 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa secara akumulasi pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat

guna dan tepat waktu dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sudah seluruh indikator mencapai capaian kinerja.

Sasaran 2.

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel.

Tabel 3.66

Analisis Capaian sasaran terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2014
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda	76.15 %	110,62 %	109 %	67	69,12	103,16 %	70	75.89	108.41 %



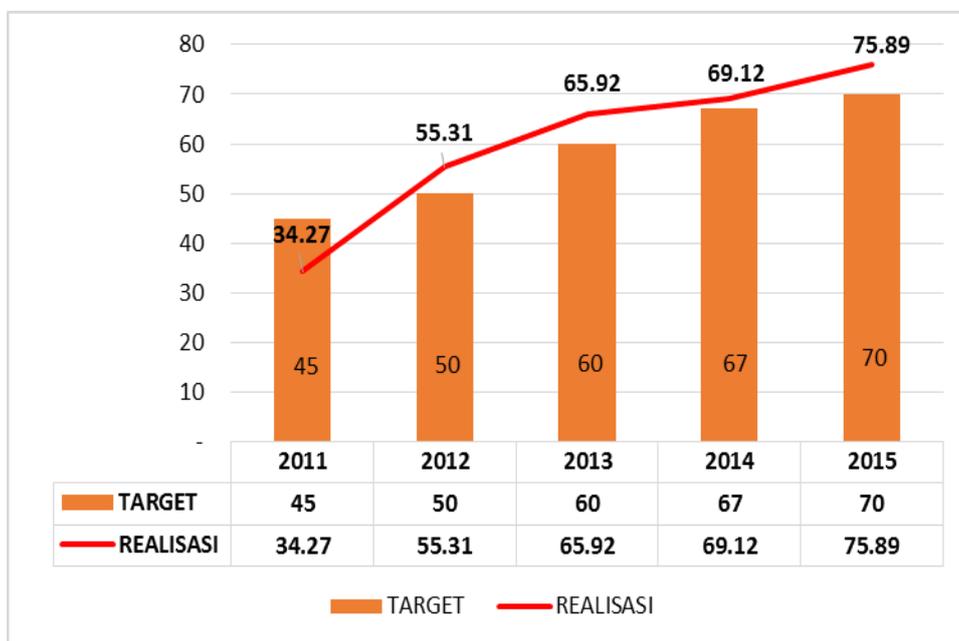
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di buat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah .

SAKIP bagi instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPOR bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas.

Setiap instansi jajaran Pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan dan kinerja. Laporan keuangan secara umum mencakup laporan keuangan dan aset yang melahirkan opini (disclaimer/WDP/WTP) sedangkan penilaian terhadap pelaporan kinerja instansi pemerintah meliputi seluruh aspek pencapaian sasaran,tujuan dan target yang

tercantum dalam RPJMD. Perkembangan Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten badung dari tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Grafik 3.33
**Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung**



Kondisi awal dimana sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau lebih populer dikenal dengan LAKIP, kewajiban melaporkan kinerja melalui LAKIP hanya sebatas formalitas karena kurangnya pemahaman akibat masih lemahnya komitmen pimpinan. Sosialisasi/Bimtek biasanya hanya staf dan LAKIP menjadi tanggung jawab staf sehingga laporan kinerja yang dibuat belum mampu memberikan gambaran kinerja menyangkut



kegagalan/keberhasilan SKPD menjabarkan target kinerja yang diperjanjikan. Dan keberadaan RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015 kondisinya belum optimal dalam penetapan tujuan, penetapan sasaran belum mengacu pada hasil, belum memiliki IKU, penetapan indikator kinerja belum terukur, penetapan target kinerja tidak mengacu pada capaian kinerja out come serta penetapan program dan kegiatan tidak selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan analisa terhadap sasaran ini dengan penjabarannya melalui indikator sasaran nilai hasil evaluasi AKIP Pemda, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja tahun 2015 tercapai 108,41% dari target yang ditetapkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 75,89. Bila dilihat perkembangan setiap tahun, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. Tercapainya peningkatan capaian kinerja tiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 diakibatkan karena keseriusan Pemerintah Daerah untuk membangun komitmen bersama karena sistem akuntabilitas kinerja tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh adanya komitmen pimpinan maupun staf. sehingga langkah awal untuk membangun komitmen bersama menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Perkembangan capaian kinerja dan upaya yang dilakukan setiap tahunnya dapat diulas sebagai berikut :

- Tahun 2011 mulai membangun komitmen mulai dari pimpinan sampai dengan staf, mengoptimalkan program sosialisasi SAKIP, membuat IKU pemerintah daerah dan IKU SKPD, Renstra SKPD yang menggambarkan kinerja serta bisa diukur. Sehingga tahun 2012 nilai Akip Pemda ditargetkan 50 terealisasi 55, 31 capaian kinerja tercapai 110,62%.
- Begitu selanjutnya mengalami perkembangan tahun-tahun selanjutnya tahun 2013, tahun 2014 capaian kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena terus mengadakan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB ,diantaranya membentuk Tim Pengembangan SAKIP Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 119/01/Hk/2013 Tentang pembentukan tim pengembangan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten badung, membuat petunjuk teknis penyusunan LAKIP, melakukan revisi-revisi terhadap dokumen SAKIP baik terhadap sasaran maupun indikator kinerja yang kurang berkualitas serta revisi target indikator yang terlalu tinggi sehingga akan menyulitkan mencapainya ataupun target yang sudah tercapai sehingga perlu dinaikkan kualitas targetnya.
- Merevisi RPJMD tahun 2010-2015 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, target kinerja, menetapkan indikator kinerja utama yang bias menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

- Penerapan e-Performance (e-musren, e-Planing dan e-SAKIP) guna meningkatkan fungsi monitoring serta pengendalian terhadap capaian kinerja SKPD di Kabupaten Badung, Membangun budaya kinerja dimana dalam tahap akhir ini merupakan tahap "brain washing" aparatur yang terbiasa dengan orientasi output menjadi berorientasi hasil atau kinerja.
- Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Badung mengembangkan sistem aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi sehingga data kinerja yang disajikan dalam LKjIP dapat lebih diandalkan dan dapat dimonitor capaiannya secara berkala dan membuat perjanjian kinerja yang sebelumnya dilaksanakan antara Kepala SKPD dengan Bupati .Tahun 2015 telah dikembangkan sampai staf (casscade), sehingga melalui upaya ini seluruh aparatur dituntut semakin semakin memahami tugas pokok dan fungsinya, ikut bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan, serta membuat rencana aksi.

Program kegiatan yang mendukung kinerja tersebut antara lain program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan total anggaran selama lima tahun sebesar 1.276.715.000,00

Tabel. 3.67

Nilai Akuntabilitas Kabupaten Badung dari tahun 2011-2015 berdasarkan bobot pada masing-masing indikator.

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT NILAI 2009-2014	BOBOT NILAI 2015	Nilai evaluasi tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Perencanaan Kinerja	35	30	10,31	19,45	23,05	25,19	24,92
2.	Pengukuran Kinerja	20	25	2,93	10,42	13,46	13,96	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	15	15	7,63	8,48	9,75	10,93	11,08
4.	Evaluasi Kinerja	10	10	1,02	4,96	6,22	5,80	6,57
5.	Capaian Kinerja	20	20	12,39	11,99	13,44	13,24	14,34
NILAI EVALUASI		100	100	34,27	55,31	65,92	69,12	75,89
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		C	C	CC	B	B	BB	

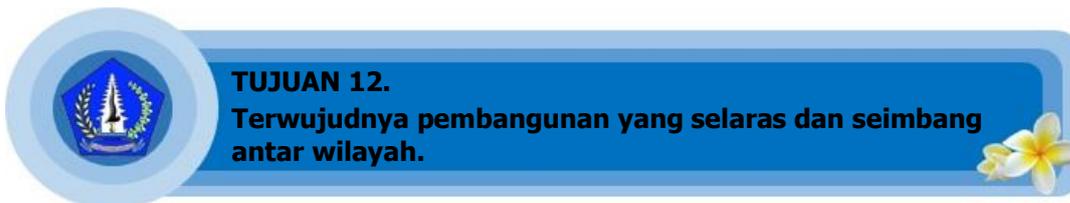
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.68

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBINAAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN, KONSULTASI, SUPERVISI, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, PROFESIONAL, RESPONSIF DAN AKUNTABELTAHUN 2014 DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana kinerja s/d. Tahun 2015	Realisasi kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35,72	70	75,89	108,41%

Berdasarkan tabel diatas, nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Badung pada saat ini memperoleh nilai 75.89 , melebihi dari target yang ditetapkan sesuai RPJMD tahun 2010-2015.



Kabupaten Badung dalam Membangun Wilayahnya berlandaskan Konsep "Tiga Pilar Pembangunan/ Tri hita Karana." Kondisi ini telah mendorong untuk bersikap berhati-hati dan bijaksana dalam merencanakan pengembangan wilayahnya. Kabupaten Badung dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan yaitu: Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan.

Masing-masing wilayah memiliki perbedaan karakteristik fisik lingkungan yang mencolok dan saling memiliki keterikatan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga adanya kesesuaian terhadap rencana tata ruang yang sesuai dengan peruntukan wilayah karena Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah kunjungan pariwisata dunia yang dipandang perlu untuk menyeimbangkan antara pembangunan sektor Pertanian yang merupakan pendukung sektor pariwisata serta merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung. Pelayanan dibidang penataan ruang diarahkan pada upaya mendorong tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah, terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat terhadap proses penyusunan tata ruang, terlayannya izin pemanfaatan ruang, terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang tata ruang serta tersedianya ruang terbuka hijau.

Pengukuran terhadap capaian tujuan 12 (sepuluh) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah di ukur melalui 2 alat ukur yaitu Indikator perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW dan Indikator persentase luas kawasan bebas banjir. Capaian kinerja pada masing-masing indikator seperti tabel sebagai berikut.

Tabel 3.69
Capaian indikator kinerja tujuan 12
Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang.

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW	3 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%
2	Persentase luas kawasan bebas banjir	99,86	99,92	99,96	100,03

Analisis atas capaian masing-masing indikator tujuan 10 adalah sebagai berikut :
Indikator tujuan 1. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW

Perencanaan tata ruang pada kawasan strategi Kabupaten Badung pada kondisi awal memiliki 3 dokumen rencana tata ruang pada kawasan strategis kabupaten dan akhir tahun ditargetkan tersusun 30 dokumen. Pencapaian target penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Terhadap target sebanyak 30 dokumen sampai dengan akhir tahun telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Indikator tujuan 2 . Persentase luas kawasan bebas banjir

Banjir yang terjadi di Kabupaten Badung disebabkan oleh karena banyaknya alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan resapan untuk air hujan, disamping itu juga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan saluran drainase. hal itu menyebabkan dimensi saluran drainase dan sungai tidak bisa menampung debit air dan menyebabkan banjir. untuk itu pemerintah Kabupaten Badung Pada tahun 2015 melakukan penanganan di sepanjang Tukad Mati, yaitu dengan pembangunan Longstorage, dan Pembuatan pompa di jalan Dewi Sri, sehingga dari target yang direncanakan untuk ditangani seluas 25 Ha dan dapat direalisasikan seluas 39 Ha sehingga prosentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100,03%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk melihat penjelasan masing –masing indikator sasaran dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Yang Sesuai Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kawasanstrategis Kabupaten .

Tabel. 3.70

**Analisi pencapaian sasaran 18.
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PROGRAM
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN .**

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	75	88	80	9	9	100 %	3	4	133.33 %
2.	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	100,43	100,4	102,69	91,42	94,45	103,31	94.68	94.72	100,04

Pada Tahun 2010 kondisi jaringan irigasi berkondisi baik sebesar 89.14% dan direncanakan tahun ke 5 atau akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 saluran irigasi di Kabupaten Badung dalam kondisi baik sebesar 94,68%. Diawali pada Tahun 2011 dengan target 89.2% dan terealisasi sebesar 89.58%, capaian kinerja tercapai 100,42%. Tahun 2012 dengan target kinerja 89.87% terealisasi sebesar 90.23%, capaian kinerja tercapai 100,40% dan di tahun 2013 dengan target kinerja sebesar 90,75 terealisasi sebesar 93,1%, capaian kinerja tercapai 102,58%. Tahun 2014 dengan target kinerja 93,92% terealisasi sebesar 94,45% capaian kinerja tercapai 100,56% dan ditahun 2015 dengan target kinerja sebesar 94,68% dengan realisasi sebesar 94,72% sehingga capaian kinerja tercapai 100,04%.

Indikator 1.

Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi prosedur penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan prosedur penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang. Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan rencana umum tata ruang berupa Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dan telah dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Badung.

Mengingat pesatnya perkembangan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Badung dan sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Badung maka disusun rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagai salah satu instrument pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terhadap indikator Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis sesuai RTRW Kabupaten, Tahun 2015 ditargetkan 3 dokumen dengan realisasi sebanyak 4 dokumen , sehingga capaian kinerja telah tercapai 133.33 %. Adapun jenis-jenis dokumen perencanaan yang disusun tahun 2015 diantaranya Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kuta Selatan, Penyusunan Rencana Teknis Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Primer, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa Wisata di Kabupaten Badung dan Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu di Kabupaten Badung. Terhadap dokumen rencana tata ruang kawasan strategis yang disusun tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan dan telah ditindaklanjuti di tahun 2016 dengan kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda RDTR Desa Wisata dan penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Rencana Pengembangan Wilayah Terpadu sebagai dasar untuk penetapan menjadi peraturan daerah.

Untuk Tahun 2014 ditargetkan 9 dokumen dengan realisasi sebanyak 9 dokumen (100%) melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung, Pemetaan Indeks Grafis Pertanahan di Kabupaten Badung, Pemetaan

Pola Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Badung, Penyusunan DED Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Taman Mumbul Sangeh, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung, Penyusunan DED Penataan Daya Tarik Wisata Bongkasa Pertiwi, Penyusunan DED Penataan Daya Tarik Wisata Labuan Sait, Penyusunan DED Penataan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan Penyusunan DED Penataan Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh. Dokumen rencana kawasan strategis tahun 2014 telah ditindaklanjuti tahun 2015 dengan penataan pada kawasan strategis diantaranya penataan kawasan daya tarik wisata taman mumbul sangeh, penataan daya tarik wisata kawasan luar pure uluwatu dan penataan daya tarik wisata alas pala sangeh. Sedangkan untuk dokumen rencana lainnya dipergunakan untuk melengkapi substansi dalam penyusunan Ranperda RDTR 6 kecamatan.

Tahun 2013 ditargetkan 5 dokumen dengan realisasi sebanyak 4 dokumen (80%) melalui kegiatan Studi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung, Studi penerapan insentif dan disinsentif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung, Program Percepatan Sanitasi Permukiman dan Penyusunan Masterplan Drainase di Kabupaten Badung. Dokumen ini dipergunakan untuk menunjang penyempurnaan materi teknis RTRW Kabupaten Badung.

Untuk Tahun 2012 ditargetkan 9 dokumen dengan realisasi sebanyak 8 dokumen (88%) melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Jembatan Tukad Bangkung di Kecamatan Petang, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Badung, Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Jalan Sunset-By Pass Ngurah Rai-Nusa Dua di Kabupaten Badung, Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung, Penyusunan Rencana Kota Hijau di Kabupaten Badung, Studi Pengendalian Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Badung, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Badung dan Penyusunan Masterplan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Badung. Dokumen ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Badung, Penetapan peraturan Bupati tentang Standar Luasan Minimal Hotel dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Badung.

Tahun 2011 ditargetkan sebanyak 4 dokumen dengan realisasi sebanyak 3 dokumen (75%) melalui kegiatan Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Badung, Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Desa Wisata Pangsan di Kecamatan Petang dan Penyusunan RDTR Kawasan Sempadan Pantai. Dokumen ini dimanfaatkan sebagai dasar melengkapi kajian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Indikator 2.

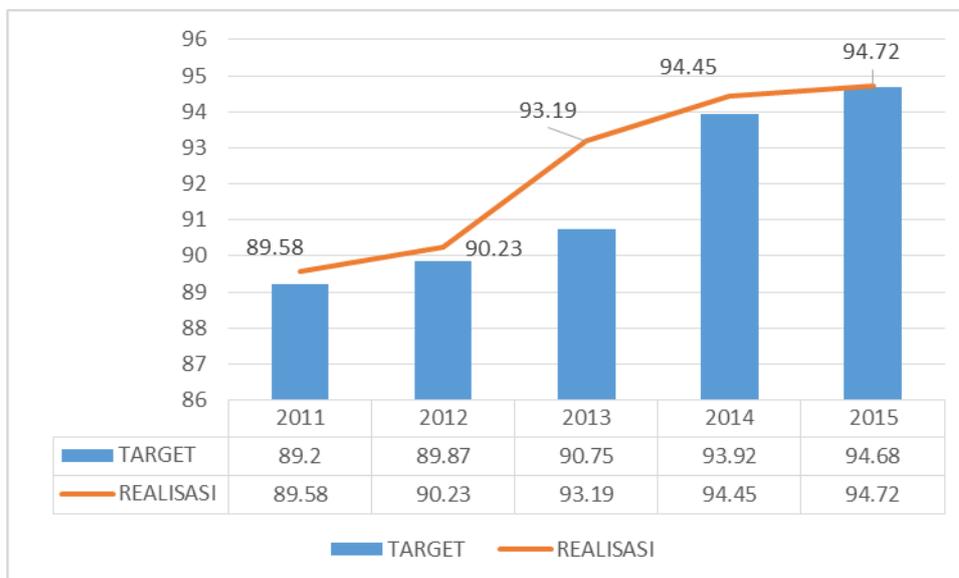
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik .

Panjang Saluran irigasi di Kabupaten Badung 655,341 km, yang terdiri dari saluran irigasi primer, sekunder dan tersier dengan pengelolaan dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pada Tahun 2010 kondisi jaringan irigasi berkondisi baik sebesar 89.14% dan direncanakan tahun ke 5 atau akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 saluran irigasi di Kabupaten Badung dalam kondisi baik sebesar 94,68 %.

Tabel. 3.71
Kondisi Jaringan Irigasi di Awal Tahun 2010

NO	KLASIFIKASI	PANJANG TOTAL (Km)	KONDISI AKHIR TAHUN 2010			
			BAIK (KM)	%	RUSAK (KM)	%
1	Saluran Primer	95,15	86,69	13,23%	8,46	1,29%
2	Saluran Skunder	137,29	114,23	17,43%	23,06	3,52%
3	Saluran Tersier	417,681	378,02	57,68%	39,661	6,05%
4	Saluran Pembuang	5,22	5,22	0,80%	0	0,00%
	Total Saluran	655,341	591,31	89,14%	64,03	10,86%

Grafik 3.34
Target dan Realisasi Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik



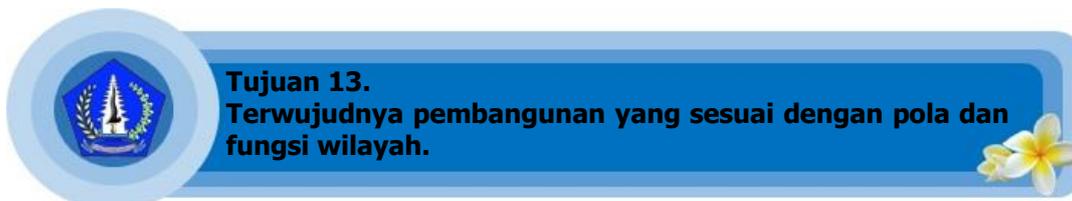
Dengan melihat diagram diatas dapat dibandingkan realisasi kinerja Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tiap tahunnya dimana Tahun 2015 target jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Badung sebesar 94.68 % dan telah terealisasi sebesar 94,72 sehingga capaian kinerja mencapai 100,04 %. Ini berarti bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kondisi saluran irigasi yang ada di Kabupaten Badung dari total panjang saluran irigasi 655,341km dan yang sudah berkonsisi baik sepanjang 620,74 km (94,72 %). Bila dibandingkan Tahun 2014 target jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Badung sebesar 91,42 % dan telah terealisasi sebesar 94,45 , sehingga terjadi peningkatan di capaian kinerja tahun 2015. Begitu pula dengan tahun sebelumnya dari tahun 2011 sampai dengan 2013 capaian kinerja selalu adanya Peningkatan pencapaian kinerja oleh karena adanya upaya Pemerintah Daerah untuk menjadikan perbaikan prasarana pengairan sebagai prioritas utama didalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan.

Tabel 3.72

**PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERWUJUDNYA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN YANG SESUAI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TAHUN 2014
DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja s/d. Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	584,171 (89,14 % x 655,341 Km)	94,68 %	94,72 %	100.04 %

sesuai realisasi akumulasi sampai tahun 2015 dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD di tahun 2015 bahwa untuk indikator perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten dan Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, semua indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan dan telah terpenuhi di tahun 2015, hal ini dapat terwujud karena telah terlaksanannya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya serta partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang pengairan maupun rencana tata ruang pembangunan strategis Kabupaten Badung sebagai pengendali pemanfaatan ruang.



Perkembangan pembangunan yang sangat pesat membawa perubahan yang cepat, dinamis dan berdampak terhadap lingkungan serta penataan ruang secara keseluruhan. Hal yang paling sulit dalam penataan ruang adalah pengendalian ruang, dimana pihak Pemerintah khususnya perijinan harus lebih menitikberatkan pada aspek peningkatan pemanfaatan ruang sehingga tujuan mewujudkan ruang wilayah/ kota/ kawasan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dinamika penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung memiliki kompleksitas yang cukup tinggi terutama pembangunan fasilitas penunjang kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan, integrasi dan koordinasi antara penyelenggara penataan ruang pada berbagai tingkat kewenangan.

Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayahnya disasar melalui manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan, terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan, pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif, akan ditempuh melalui strategi peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.

Pengukuran terhadap capaian tujuan 13 (sepuluh) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu **Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.** Hasil capaian indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.73
Capaian indikator kinerja tujuan 13
Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45,82% (7.395,54 Ha).	9.684,58 Ha (60,00% dari luas total lahan yang boleh terbangun).	10.492,48 Ha (65,01%)	108,34 %.

Analisis atas capaian indikator tujuan 13 persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan

Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung sering menimbulkan problema pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah tidak mentaati rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang secara ketat sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, luas total wilayah kabupaten Badung adalah 41.852 Ha, dengan total luas lahan boleh terbangun adalah 16.140,96 Ha (38,57 %). Pada periode RPJMD 2010-2015, target luas lahan terbangun sampai Tahun 2015 adalah 9.684,58 Ha (60,00% dari luas total lahan yang boleh terbangun). kondisi awal pada Tahun 2010 luas lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung adalah sebesar 45,82% (7.395,54 Ha).

Pada Tahun 2015 realisasi luas lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung adalah sebesar 10.492,48 Ha (65,01%) dari target yang ditetapkan sebesar 9.684,58 Ha (60,00 %), sehingga capaian kinerja tercapai 108,34 %. Tercapainya kinerja yang melebihi target tersebut karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan di Kabupaten Badung baik yang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah maupun sektor swasta terutama pembangunan yang menunjang kegiatan kepariwisataan sebagai sektor andalan Kabupaten Badung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan 13 yaitu terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah sudah tercapai .

Bila dilihat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Pelaku Pembangunan Lainnya Untuk Membangun Sesuai Dengan Rencana tata Ruang.

Tabel 3.74

Analisis Capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Pelaku Pembangunan Lainnya Untuk Membangun Sesuai Dengan Rencanatata Ruang.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	Persentase Lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	103.61	102,84	102,13	53,00	54,30	102,45	60	65.01	108.35

Indikator
Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, luas total wilayah kabupaten Badung adalah 41.852 Ha, dengan total luas lahan boleh terbangun adalah 16.140,96 Ha (38,57 %). Pada periode RPJMD 2010-2015, target luas lahan terbangun sampai Tahun 2015 adalah 9.684,58 Ha (60,00% dari luas total lahan yang boleh terbangun).

Berdasarkan data Pemanfaatan Ruang Kabupaten Badung, kondisi awal pada Tahun 2010 luas lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung adalah sebesar 45,82% (7.395,54 Ha) dari target Tahun 2015 sebesar 60,00% (9.684,58 Ha).

Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 peningkatan sebesar 5,89 % di tahun 2015. Apabila dibandingkan Antara data pemanfaatan ruang Kabupaten Badung Tahun 2015 dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013- 2033, maka realisasi peningkatan lahan terbangun sampai tahun 2015 masih terkendali yaitu 25,07%. Apabila dibandingkan daerah lain dengan indikator yang hampir sama, yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan terhadap RTR kab/ kota dan RTRW Provinsi pada Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta .

Tahun 2014 dengan target 60,00% sedangkan realisasi mencapai 64,21,00% sehingga tingkat capaian 107,02%. Untuk Kabupaten Badung pada Tahun 2014, target 53,00%, realisasi 54,30% sehingga tingkat capaian dalam periode 5 tahun dari 2011 sampai dengan 2015 terjadi penambahan luas lahan terbangun yaitu Tahun 2011 dari target yang direncanakan 47,00% (7.586,25 Ha) realisasi sebesar 48,70% (7.860,00 Ha), Tahun 2012 dari target yang direncanakan 49,00% (7.909,07 Ha) realisasi sebesar 50,39% (8.133,75 Ha), Tahun 2013 dari target 51,00% (8.231,89 Ha) realisasi 52,09% (8.407,50 Ha), Tahun 2014 dari target 53,00% (8.554,71 Ha) realisasi sebesar 54,30% (8.764,28 Ha).

Pada Tahun 2015 realisasi luas lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung adalah sebesar 10.492,48 Ha (65,01%) dari target yang ditetapkan sebesar 9.684,58 Ha (60,00 %), sehingga capaian kinerja tercapai 108,34 %. Tercapainya kinerja yang melebihi target tersebut karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan di Kabupaten Badung baik yang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah maupun sektor swasta terutama pembangunan yang menunjang kegiatan kepariwisataan sebagai sektor andalan Kabupaten Badung.

Pengendalian penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Badung dilaksanakan agar sampai pada Tahun 2015, luas lahan terbangun tidak melebihi 60,00%. Untuk mengantisipasi pembangunan yang semakin berkembang diperlukan pengendalian yang maksimal terutama dalam hal pemanfaatan lahan terbangun antara lain melalui penyusunan regulasi yang jelas dan transparan serta pengawasan yang maksimal di lapangan.

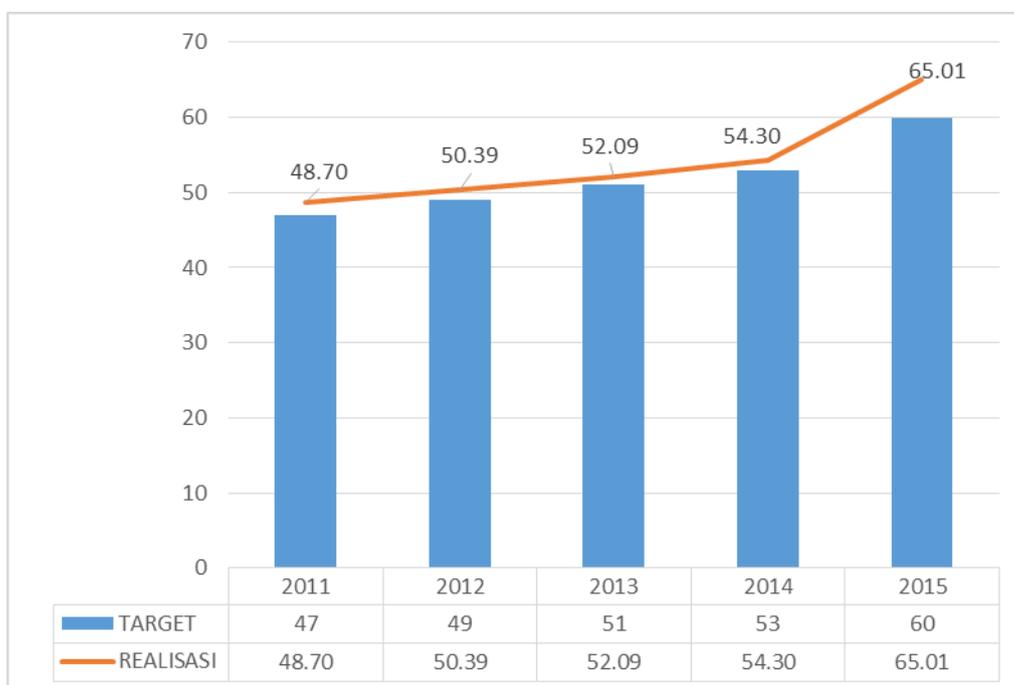
Adapun kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW adalah dengan melaksanakan keterpaduan program dan kegiatan dari beberapa instansi yang menangani Tata Ruang di Kabupaten Badung (Bappeda Litbang, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satpol PP dan Dispenda). Kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya pengendalian penataanruang adalah:

- (1) Memberikan perlindungan pada Jalur Hijau dan kawasan limitasi agar berfungsi sesuai peruntukannya, yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang.

- (2) Memberikan perlindungan pada tanah pertanian di wilayah Kabupaten Badung agar berfungsi sesuai peruntukannya dengan menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Tanah Pertanian, diberikan dengan pengurangan bervariasi Antara 20% sampai dengan 80% sesuai dengan desa/ kelurahan masing-masing.
- (3) Melakukan koordinasi dengan instansi/ dinas lain dalam rangka sosialisasi Perda RTRW sehingga terwujud pengendalian dalam penataan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung.

Perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.35
Perkembangan capaian kinerja Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.dari tahun 2011 – 2015.



Tabel . 3.75

**PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DAN PELAKU PEMBANGUNAN
LAINNYA UNTUK MEMBANGUN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG.**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s/d. Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	7.395,54 ha (45,82%)	60,00	65,01	108,34

Realisasi akumulasi sampai tahun 2015 dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD di tahun 2015 sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang persentase capaian sampai tahun 2015 telah menunjukkan angka yang positif, sampai tahun kelima akhir RPJMD capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang seimbang antar wilayah

Tabel. 3.76

**Analisis pencapaian sasaran
Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang seimbang antar wilayah**

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)	97,6%	98,75%	101%	0,77	0,73	105%	0.60	0.61	98,3%
2.	Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light	96,8%	100,02 %	100,02 %	72,54	76,47	105%	78.43	80.39	102,5%

Kabupaten Badung sebagai daerah destinasi wisata internasional selama 10 tahun terakhir ini telah mengalami peningkatan lahan terbangun yang cukup tinggi.

Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketidaksesuaian dengan rencana pola tata ruang yang telah ditetapkan. Berbagai upaya dilakukan untuk memudahkan identifikasi pemanfaatan ruang salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lain untuk membangun sesuai tata ruang. Selain itu dengan Pariwisata yang merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah, Kabupaten Badung diharapkan juga dapat mewujudkan percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang seimbang antar wilayah.

Kelancaran transportasi serta Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan interaksi lalu lintas serta angkutan jalan. Sehingga tidak adanya ketimpangan dan susah akses menuju satu daerah dengan daerah yang lainnya di Kabupaten Badung. Selain itu, dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Badung tidak hanya menimbulkan dampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas. Dimana dibutuhkan antisipasi pemerintah guna menanggulangi permasalahan lalu lintas yang nantinya tidak menghambat proses pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung.

Guna mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah di Kabupaten Badung sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Badung tahun 2011-2015 didukung oleh sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Pelaku Pembangunan Lainnya Untuk Membangun Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang dengan dua indikator kinerja yaitu Persentase Lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dan Prosentase sarana prasarana bangunan gedung pemerintah yang representatif dan diukur dengan sasaran Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang seimbang antar wilayah dijabarkan melalui 2 alat ukur yaitu indikator Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) dan indikator Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light.

Adapun analisis capaian indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Indikator 1. Tingkat kepadatan lalu lintas (v/c ratio).

Perkembangan pembangunan di kabupaten Badung berpengaruh terhadap kelancaran transportasi , karena pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya serta perkembangan mobilitas penduduk antar kota sangat tinggi. Sehingga ruas ruas jalan yang saling menghubungkan Kabupaten Badung menuju /dari kota atau Kabupaten lainnya (SARBAGITA) mengalami peningkatan arus lalu lintas yang signifikan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang akhirnya berujung pada kemacetan lalu lintas.

Kepadatan lalu lintas merupakan ratio perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan (V/C r) yang merupakan salah satu parameter yang dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan dari ruas jalan atau level of sevice (LOS) suatu ruas jalan yang dapat juga digunakan sebagai indikator tingkat kemacetan jalan. Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan kondisi V/C ratio ruas jalan di Kabupaten Badung pada akhir RPJMD tahun 2015 menurun menjadi 0,60 dimana kondisi awal tahun 2011 rata-rata jalan di Kabupaten Badung berada pada level E ring 0,85-1,00 yang artinya volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil dan kecepatan terkadang terhenti. Tingginya angka v/c ratio awal tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang, hal ini ini disebabkan karena volume kendaraan yang semakin meningkat dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada terutama pada ruas – ruas jalan di Kabupaten Badung dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi yang terjadi pada jam - jam tertentu secara bersamaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tertib lalu lintas serta menuruti rambu rambu yang terpasang seperti parkir sembarangan yang mengakibatkan hambatan samping jalan. Hal inilah yang harus diperbaiki selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan tabel 3.53 Indikator tingkat kepadatan lalu lintas (v/c ratio) tahun 2015 ditargetkan 0.60 dan realisasi sebesar 0.61 capaian kinerja sebesar 98,3 % sehingga capaian kinerja belum tercapai. Kondisi tersebut berada pada level C ring 0,45 – 0,74 artinya rata rata ruas jalan di Kabupaten Badung dalam kondisi arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan dan pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan tersebut.

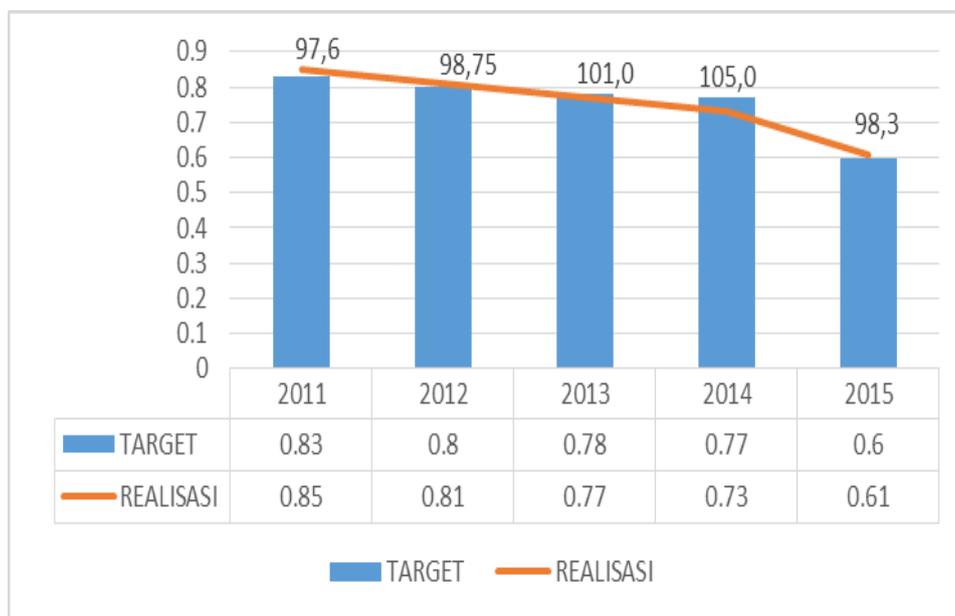
jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana tingkat kepadatan lalulintas (v/c) ratio ditargetkan 0,77 dan realisasi sebesar 0,73 sehingga capaian kinerja tercapai sebesar

105%. Sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan kinerja di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena masih adanya pelanggaran pelanggaran parkir kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pengguna jalan dengan mengabaikan rambu larangan parkir sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan – hambatan samping jalan.

Dilihat dari realisasi target dalam 5 (lima) tahun (2011-2015) mengalami peningkatan secara signifikan dari of service (tingkat pelayanan jalan) pada rata-rata jalan di Kabupaten Badung tahun 2011 berada pada level E di tahun 2015 rata-rata level of service (tingkat pelayanan jalan) ruas jalan sudah berada pada level C. Dan apabila dibandingkan dengan daerah lain dalam hal ini kita Bandung tahun 2014 berhasil menurunkan v/c rasionya 0,85 dengan kecepatan rata-rata 14,3 km/jam , sedangkan Kabupaten Badung tahun 2015 berhasil menurunkan v/c rasionya 0,61 dengan kecepatan rata-rata 24,06 km/jam.

Program kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini yaitu Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 265.414.650 dimana anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 50.018.300

Grafik 3.36
**Capaian Indikator Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)
 Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung**



Indikator 2. Persentase persimpangan yang terpasang traffic light.

Kemacetan akut bukan hanya menjadi permasalahan Jakarta, tapi juga Bali, dimana diprediksi tak lama lagi lalu lintas Pulau Dewata tak bisa bergerak. Permasalahan Transportasi di Kabupaten Badung tidak dapat dilepaskan dari perkembangan daerah di sekelilingnya. Bagaimanapun juga mobilitas penduduk antar kota di wilayah daerah tangkapan Kabupaten Badung tersebut atau dikenal sebagai kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), sudah sangat tinggi. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antar kabupaten/kota. Untuk dapat meningkatkan mobilitas tersebut maka diperlukan adanya penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Banyak cara yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kemacetan tersebut, salah satunya dengan pemasangan traffic light yang dipakai untuk menata ulang pola arus yang keluar dari setiap kaki persimpangan. yang efeknya tetap akan mempengaruhi ritme arus lalu lintas pada ruas jalan lainnya.

Secara keseluruhan Di Kabupaten Badung memiliki 51 persimpangan, pada akhir tahun 2010 sudah terpasang traffic light berjumlah 29 simpang, sedangkan rencana akhir sesuai RPJMD tahun 2010-2015 terpasang traffic light berjumlah 11 sehingga total yang akan terpasang menjadi 40 simpang (78,43%). Dan sisa yang belum terpasang traffic light berjumlah 10 simpang yang direncanakan terpasang pada RPJMD periode berikutnya.

Tahun 2015 ditargetkan pemasangan traffic light pada 2 simpang empat jalan Tangkuban perahu-Br. Pengubengan Kecamatan Kuta utara dan simpang empat jalan uluwatu-jalan wanagiri jimbaran kecamatan kute selatan, dan terealisasi 100% atau menjadi 41 simpang atau 80,39%. Sehingga capaian kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. tercapainya capaian kinerja ini karena komitmen pimpinan, dijadikan skala prioritas penganggaran.

Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 3 simpang terpasang, terealisasi 5 simpang yaitu simpang tiga Br.Anyar kaja kecamatan kuta utara, relokasi pemasangan traffic light yang berlokasi pada simpang empat yaitu simpang empat pererenan kecamatan mengwi, simpang empat sanggulan abianbase kecamatan mengwi, simpang empat batu bolong kecamatan kuta utara, simpang empat penarungan kecamatan mengwi atau terealisasi sebesar 76,47 % (39 simpang) dari target yang ditetapkan sebesar 72,54 %, sehingga capaian kinerja tercapai 105 %.

Tahun 2013 ditargetkan pemasangan traffic light sebanyak 2 simpang yaitu di simpang tiga terminal sisi barat kecamatan mengwi, dan simpang empat angantaka kecamatan abiansemal dan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 66,75 % atau 34 simpang.

Tahun 2012 ditargetkan penambahan 1 simpang yang terpasang traffic light di simpang polres badung mengwi. , capaian kinerja tercapai 100,2% dari target yang ditetapkan sebesar 62,74% dan terealisasi sebesar sebesar 62,75% menjadi 32 traffic light .

Tahun 2011 ditargetkan sebanyak 2 Persimpangan yaitu di persimpangan empat kali ulu wayu dan simpang sunset barat di kecamatan kuta di wilayah Kabupaten Badung. Dan secara akumulatif jumlah simpang yang terpasang sampai tahun 2011 terpasang menjadi 31 atau sebesar 60.78 %, terealisasi sebesar 58,82 sehingga capaian kinerja tercapai 96,8%. Simpang yang terpasang treffic light adalah simpang empat kali uluwatu sedangkan pada simpang sunset barat tidak terealisasi karena belum memenuhi kriteria bahwa suatu persimpangan sudah harus dipasang alat pemberi isyarat lalu lintas.

Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan total pagu anggaran selama 5 (lima) sebesar Rp 4.607.400.625 dan pagu Program di tahun 2015 sebesar Rp 1.709.202.700,00

Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja setiap tahun telah mengalami peningkatan realisasi dan lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 3.37
Capaian Indikator Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung



Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.77

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERWUJUDNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEIMBANG, BERKELANJUTAN DAN SINERGISITAS KETERPADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN AKAN DITEMPUH MELALUI STRATEGIS PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG ANTAR WILAYAH TAHUN 2015

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Rencana Kinerja s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	Persentase Capaian Kinerja (0%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	0,85	0,60	0,61	98,3%
2	Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	56,86	78,43	80,39	102,5%

Berdasarkan tabel 3.81, rata realisasi akumulasi pencapaian sasaran terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang, **berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pemabangunan yang seimbang antar wilayah** dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 capaian kinerja dapat dikatakan sudah tercapai dengan rata-rata capaian sasaran mencapai 100,4%. Tercapainya capaian kinerja ini karena tingginya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan .



Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sudah sepatutnya diantisipasi dan ditangani dengan langkah dan upaya yang baik supaya lingkungan hidup akan selalu terjaga dan terlindungi di kemudian hari. Pasalnya, kerusakan lingkungan hidup yang saat ini terjadi tak lepas dari ulah dan kebiasaan manusia sehingga tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan dalam diri setiap masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup secara maksimal oleh semua pihak dan lapisan masyarakat, sehingga keseimbangan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan tujuan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup demi kemakmuran bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menetapkan salah satu tujuan dalam RPJMD tahun 2010-2015 yaitu Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup .

Untuk melihat capaian kinerja indikator tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.78
Capaian indikator kinerja tujuan 14
Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya
kualitas lingkungan hidup

No.	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu :				
	Cod Air Sungai	10,2 mg/l	< 50 mg/l	26,74 mg/l	146,72 %
	BOD Air Sungai	5,2 mg/l	< 6 mg/l	6,10 mg/l	97,83 %
	BOD Air Laut	6,03 mg/l	< 10 mg/l	8,60 mg/l	116,80 %

Analisis Capaian kinerja untuk tujuan 14 yaitu meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup rata-rata kinerja sebesar 120,45%, sehingga dapat disampaikan bahwa tujuan tersebut sudah tercapai. Tercapainya tujuan tersebut karena adanya komitmen pimpinan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan pada pengusaha industri yang berlokasi dekat DAS yang ada di Kabupaten Badung, penataan

sempadan sungai ,melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sanitasi yang baik dan pelaksanaan gerakan Program Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) melalui perorangan, kelompok dan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan pendekatan persuasip.

Untuk melihat capaian alat ukur pada sasaran meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu indikator persentase sumberdaya air yang dipantau yang memenuhi baku mutu air, Indikator persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu dan indikator persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah, secara terinci capaian kinerja pada masing – masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bila dilihat capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah kabupaten badung menuju badung yang bersih dan hijau.

Tabel 3.82
Analisis Capaian Sasaran 21.
Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2011	Capaian Kinerja Tahun 2012	Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
					Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sumber daya air yang memenuhi baku mutu air : COD air sungai	127,0%	135,6%	108,8%	50	39.7	120.6%	50	26,74	146.72
	BOD air sungai	93,37%	86.7%	50%	6	8,9	51.67%	6	6,10	97.83%
	BOD air laut	134,0%	91%	101%	10	8.6	114%	10	8,6	116.8%
	Sumber daya udara yang memenuhi standar baku mutu (NO ₂)	180,97 %	182,1 %	182,19 %	400	14,75	196.31 %	400	23.48	195.71 %
2	Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah	100%	117%	145%	160	236	147,5%	240	316	131,67 %

Pemerintah Kabupaten Badung terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas manusia, dengan demikian potensi kebutuhan terhadap air juga semakin meningkat. Penggunaan air yang utama adalah sebagai kebutuhan air minum. Sumber air yang digunakan sebagai kebutuhan manusia sehari-hari adalah berasal dari air tanah, mata air dan sungai. Meningkatnya kebutuhan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap kualitas sumber air tersebut. Selanjutnya, kualitas ketiga sumber air tersebut akan berpengaruh pula pada kualitas air laut sebagai lokasi hilir atau daerah tempat mengalirnya air terakhir.

Dengan pertambahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Badung berdampak pada kualitas air karena semakin meningkatnya aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia dan sekitarnya seperti aspek kesehatan dan kelangkaan air. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau diperlukan adanya pemantauan, pengendalian dan penelitian mengenai kualitas air di Kabupaten Badung.

Pemerintah Kabupaten selalu berupaya menjaga pelestarian dan kualitas lingkungan hidup di tempuh melalui kebijakan yang mendorong dan meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan melakukan upaya seperti :

1. Secara kontinyu (setiap tahun) melakukan pemantauan dan pengujian kadar BOD dan COD air sungai.
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan yang baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi upaya-upaya menjaga sumber-sumber mata air.

Indikator 1.

Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air.

Baku mutu air yang dimaksud adalah mencakup parameter COD air sungai, BOD air sungai dan BOD air laut melalui penelitian yang dilakukan pada 10 sungai dari 39 sungai yang ada di Kabupaten Badung yang selalu berisi air mengalir, sedangkan 29 sungai merupakan sungai musiman (berisi air saat musim penghujan).

Pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau dan musim hujan. Hasil pemantauan masing-masing titik pantau, baik pada musim kemarau maupun musim hujan, nilainya dijumlahkan dan hasil jumlah diambil rata-ratanya, dengan formula jumlah nilai titik pantau dibagi dengan jumlah sampling. Rata-rata masing-masing parameter (COD dan BOD) selanjutnya dibandingkan dengan standar baku mutu air berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Jika nilai rata-rata lebih kecil atau sama dengan

standar baku mutu maka kualitas air tersebut memenuhi baku mutu. Sebaliknya jika nilai rata-rata melebihi standar baku mutu, maka berarti kualitas air tersebut melebihi standar/tercemar. Selanjutnya prosentase kualitas sumber daya air diperoleh dengan formula dua kali target dikurangi realisasi dibagi target. Semakin tinggi prosentase berarti semakin tinggi capaian kinerja.

Lokasi pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Badung yaitu; Sungai Tukad Mati, Tukad Ayung, Tukad Uma Alas, Tukad Bangiang, Tukad Danggang, Tukad Pangi, Tukad Penet, Tukad Ukian, Tukad Yeh Poh dan DAM LukLuk.

Hasil pemantauan baku mutu air sungai, secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel.3.83
Perkembangan hasil pemantauan sumberdaya air sungai yang memenuhi baku mutu air di Kabupaten Badung dari tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Standar Baku Mutu	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
COD Air Sungai	mg/l	50	36,5	32,2	45,6	39,7	26,74
BOD Air Sungai	Mg/l	6	6,4	6,8	9,0	8,9	6,13
BOD Air laut	Mg/l	10	6,6	10,9	9,9	8,6	8,31

a. COD Air Sungai

COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam air secara kimiawi. Angka COD merupakan ukuran kebutuhan Oksigen agar limbah organik dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Tingginya COD dalam air mengindikasikan adanya pencemaran senyawa organik polutan / atau limbah pada sumber air. Nilai baku mutu COD air sungai berdasarkan Pergub Bali No 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah 50 mg/ltr.

Tahun 2015 parameter rata-rata COD air sungai di Kabupaten Badung mencapai realisasi 26,74 mg/l terhadap target COD air sungai 50 mg/l dengan capaian kinerja sebesar 146,72%, yang berarti memenuhi standar baku mutu sebesar 50 mg/l sesuai

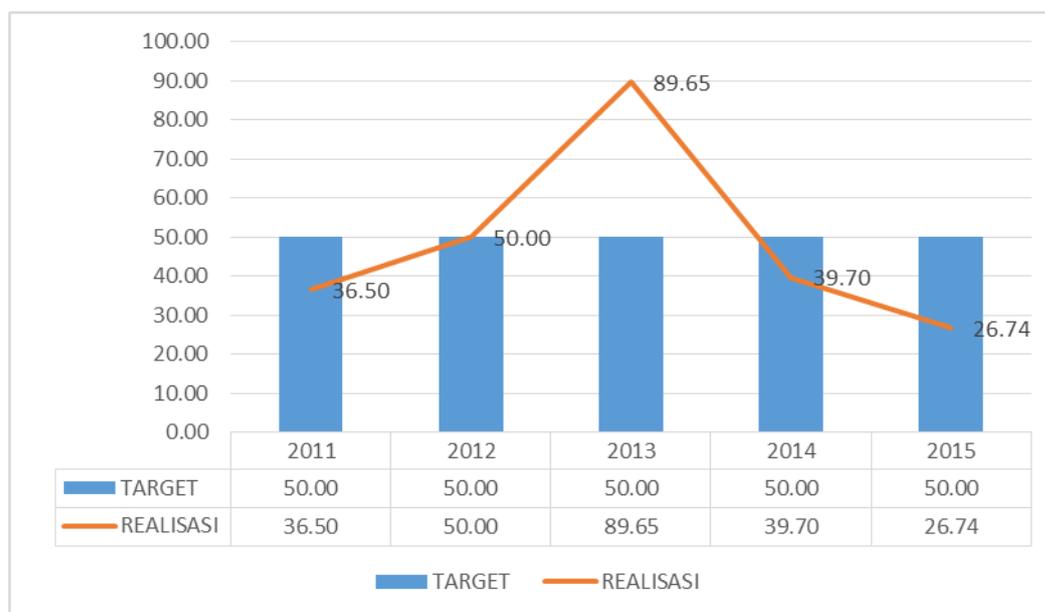
target RPJMD. Dibandingkan dengan tahun 2014 parameter COD air sungai di Kabupaten Badung rata-rata adalah 39,7 mg/l dengan capaian kinerja sebesar 120,6%, berarti telah terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 26,12% pada tahun 2015 jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014.

Tahun 2012, 2013 nilai COD air sungai terus melampaui target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, dengan tidak membuang sampah dan/atau limbah ke sungai terutama disepanjang daerah aliran sungai (DAS), Sosialisasi terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan, Pembinaan Desa Sadar Lingkungan, Pemeriksaan Kualitas Air Sungai, melaksanakan Koordinasi di Daerah Hulu.

Apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta (COD 55 mg/l), maka pencemaran air di Kabupaten Badung lebih baik kondisinya.

Perbandingan nilai rata-rata COD sungai di Kabupaten Badung tahun 2010 sampai 2015 tertera pada grafik berikut :

Grafik 3.38
Kualitas Air Sungai (COD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015
 (angka th 2013 dan 2014 datanya tdk sm dg data dlm tabel hsl pantauan dg th yg sm)



Tabel 3.84

Secara rinci hasil pengamatan kualitas air sungai berdasarkan kondisi parameter COD sungai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : COD per sungai Tahun 2011-2015

no	Nama Sungai	Parameter	Standar Baku Mutu	Hasil Penelitian				
				2011	2012	2013	2014	2015
A.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
	Tukad Mati T.Ayung T.Pangi T.Penet T. Dangkang T.Dam LukLuk T.Ukian T.Umaalas T. Bangiang T. Yeh Poh	COD air sungai	50 mg/ltr	31.43 35 37 40 40.5 45 32 33.5 35 36	31.82 30 30 34 34 45 25 23 36 33	35 35.68 33.46 77.50 80.01 70.54 21.36 23.58 43.52 35.94	21 27.00 42 74.00 62.00 46 55 22.15 9.65 38.15	20,7 25 25 19,23 34,29 34,24 36,2 22,15 32,1 35,94

b. BOD Air Sungai



BOD merupakan salah satu parameter untuk mengetahui banyaknya jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme dalam air untuk menguraikan bahan-bahan organik dalam air. BOD adalah salah satu parameter dalam penentuan status mutu air / kualitas air sungai dimana semakin tinggi nilai BOD, semakin buruk kualitas perairan tersebut dimana standar baku mutu maksimal 6 mg/ltr. Apabila melewati baku mutu dapat mengakibatkan kematian makhluk maupun organisme akuatik seperti ikan sehingga keadaan menjadi anaerob dan menimbulkan bau busuk pada perairan tersebut.

Hasil pemantauan BOD air sungai tahun 2015 diketahui bahwa rata-rata kadar BOD pada 10 sampel air sungai di Kabupaten Badung realisasi sebesar 6,13 mg/l dari target baku mutu yang ditetapkan 6 mg/l dengan capaian kinerja 97,83%.

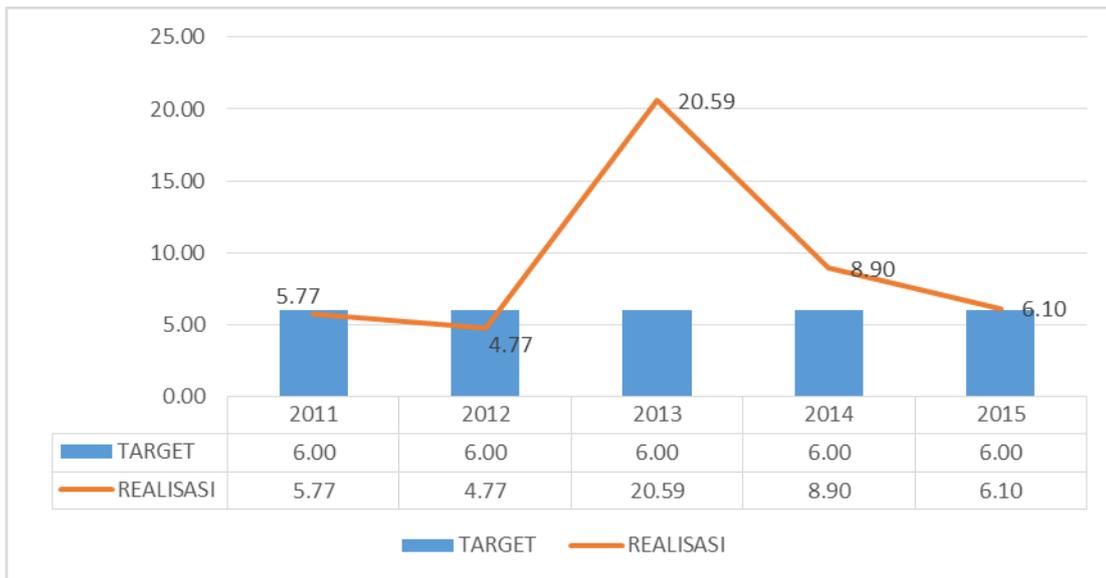
Tidak tercapainya capaian kinerja ini disebabkan karena belum efektifnya upaya pengendalian pencemaran air sungai, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan seperti masih adanya pembuangan limbah langsung ke sungai (aktivitas rumah tangga, perkantoran, usaha industri kecil dan menengah, rumah makan sablon, rumah sakit maupun aktifitas industri pariwisata) maupun adanya penebangan pohon secara liar.

Jika dibandingkan dengan pantauan BOD tahun 2014 (8,9 mg/l), terjadi peningkatan angka BOD sebesar 2,77 artinya terjadi peningkatan jumlah oksigen sebesar

2,77 mg/ltr pada titik pantauan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 (51,67%), capaian kinerja tahun 2015 meningkat sebesar 46,16%. Tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan upaya – upaya penurunan angka BOD antara lain dengan melakukan memperluas jangkauan dan cakupan pembinaan Desa Sadar Lingkungan hingga ke banjar, penanganan pembuangan limbah cair melalui pengelolaan IPAL, maupun septik tank termasuk upaya-upaya penanganan limbah padat/ sampah. Disamping itu peran serta stake holder yaitu masyarakat pengguna air yang ada di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) agar berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, perlunya peningkatan pengawasan terhadap pemrakarsa kegiatan/ pengusaha untuk mengelola limbah industri maupun domestik.

Perkembangan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara rinci dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.39
Kualitas Air Sungai (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015



Bila dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan hasil pemeriksaan BOD sebesar 30 mg/ltr, kondisi BOD air sungai di Kabupaten Badung lebih baik.

Kondisi sungai yang dipantau pada tahun 2015 seperti tabel Dibawah ini:

Tabel 3.85

Tabel : BOD per sungai Tahun 2011-2015

No	Nama Sungai	Parameter	Standar Baku Mutu	Hasil Penelitian				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2.	3.	4.	5.	6	7	8	
1.	Tukad Mati	BOD air sungai	6 mg/ltr	7.97	10.39	10.50	23	8,9
	T.Ayung			7	7	6.10	7	6,5
	T.Pangi			6	6	4.67	9	8
	T.Penet			6	7	8.77	6	5,78
	T. Dangkang			5.5	5	7.68	6	5,78
	T.Dam LukLuk			5	5	6.40	5	5,78
	T.Ukian			6	6	14.27	8	6,15
	T.Umaalas			6	7	6.48	3.80	3,80
	T. Bangiang			7	7	7.53	8.90	7,23
	T. Yeh Poh			8	8	17.66	12.55	12,50

Program yang mendukung indikator kinerja terpenuhinya baku mutu BOD air sungai di Kabupaten Badung pada tahun 2015 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Air, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.192.600,00 dan realisasi Rp 19.907.600,00 (98,59%). Untuk memenuhi pencapaian kinerja baku mutu BOD sungai di Kabupaten Badung maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung juga melaksanakan berbagai upaya terobosan berupa kegiatan inovasi yang berkoordinasi dengan stake holder antara lain berupa : kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang berkompetensi melalui pengusulan Bintek PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil), melaksanakan kegiatan CSR lingkungan dengan mendorong dan memfasilitasi para pengusaha agar meningkatkan kegiatan yang peduli lingkungan melalui aksi nyata di masyarakat.

b. BOD Air Laut

Kabupaten Badung memiliki garis pantai sepanjang 82 km yang membentang dari pantai Mengening di desa Cemagi kecamatan Mengwi sampai pantai Tanjung Benua di kecamatan Kuta Selatan. Terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki wilayah pantai dan pesisir yaitu kecamatan Mengwi, Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan. Dari 32 (tiga puluh dua) pantai yang ada, pemantauan kualitas air laut di Kabupaten Badung dilaksanakan pada 10 lokasi pantai yaitu : Pantai Tanjung Benua, Pantai Nusa Dua, Pantai Kutuh, Pantai Jimbaran, Pantai Kedongan, Pantai Tuban, Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Petitenget dan Pantai Seseh. Sesuai dengan baku mutu air laut yang diperuntukkan sebagai tempat wisata bahari, batas maksimal BOD Air Laut yang diperbolehkan adalah 10 mg/l.

Hasil capaian rata-rata kadar BOD air laut tahun 2015 pada 10 pantai yang menjadi lokasi pemantauan sebesar 8,31 mg/ ltr, (Baku Mutu 10 mg/ltr), dengan capaian kinerja 116,80%. Ini berarti kualitas air laut di Kabupaten Badung masih baik. Hasil capaian tahun 2015 mengalami peningkatan 2,80% bila dibandingkan hasil capaian tahun 2014 sebesar 8,6 mg/ltr dengan capaian kinerja sebesar 114%.

Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terus melampaui target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, berhasilnya pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Terjadi kecenderungan peningkatan rata-rata kadar BOD air laut dari tahun 2010 rata-rata sebesar 6,03 mg/l, tahun 2011 rata-rata sebesar 6,6 mg/ltr (tidak ada air laut yang melebihi baku mutu BOD air laut dari 10 pantai yang dipantau), tahun 2012 rata-rata sebesar 10,9 mg/ltr (2 air laut yang melebihi baku mutu BOD air laut dari 10 pantai yang dipantau), tahun 2013 kadar BOD air laut sebesar 9,9 mg/ltr (1 air laut yang melebihi baku mutu BOD air laut dari 10 pantai yang dipantau) dan mulai tahun 2014 terjadi penurunan rata-rata sebesar 8,6 mg/ltr (1 air laut yang melebihi baku mutu BOD air laut dari 10 pantai yang dipantau)

Berdasarkan hasil pemantauan dan penelitian kadar BOD air laut terhadap 10 lokasi pantai di Kabupaten Badung terjadi kecenderungan peningkatan BOD air laut. Kenaikan secara signifikan kadar COD air laut terjadi di Pantai Seseh, mulai terlihat pada tahun 2012 sebesar 22,95 mg/ltr jauh diatas kadar COD air laut tahun 2011 sebesar 8,18 mg/ltr. Kondisi ini disebabkan adanya perkembangan aktivitas pembangunan pariwisata dan pemukiman penduduk yang semakin menjamur di wilayah kawasan pesisir Pantai Seseh. Hal ini memacu terjadinya aktivitas domestik yang meningkat, dimana adanya peningkatan jumlah penduduk tidak dimbangi dengan kesadaran penduduk pendatang akan pelestarian dan kebersihan lingkungan pantai.

Terdapat tiga pantai yang mempunyai kadar COD melebihi baku mutu air laut untuk wisata bahari yaitu Pantai Tanjung Benoa, Pantai Tuban dan Pantai Petitenget, sehingga untuk tahun berikutnya ketiga pantai tersebut dijadikan prioritas penajaman sasaran.

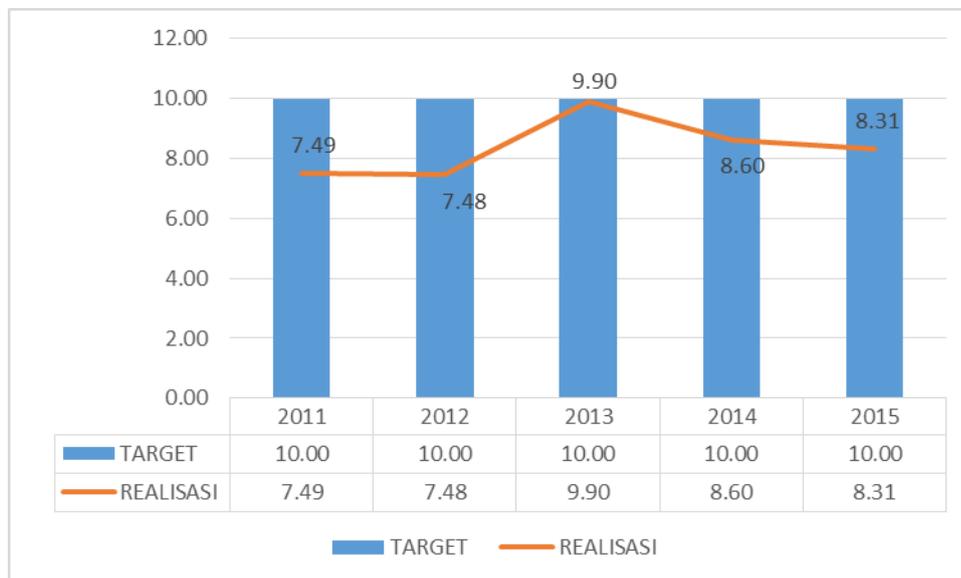
Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata BOD air laut Jakarta sebesar 23.3 mg/l maka nilai rata-rata BOD air laut Kabupaten Badung masih cukup baik yaitu dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air laut adalah:

1. Pembinaan kepada masyarakat di daerah pesisir pantai dalam pengelolaan pencegahan pencemaran misalnya dengan pembuatan septik tank sesuai persyaratan yang ada.
2. Mencegah pengambilan air tanah secara berlebihan agar tidak terjadi intrusi air laut dengan memperketat ijin pengambilan ABT (Air Bawah Tanah), memperketat ijin pembuatan sumur bor.
3. Menggiatkan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan sebagai usaha konservasi tanah untuk menghemat penggunaan air.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pengusaha dan industri untuk melarang membuang limbah cair langsung ke pantai/laut dan mengelola IPAL sesuai persyaratan yang tercantum dalam peraturan ijin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair ke tanah.
5. Meningkatkan *reward* bagi masyarakat yang berhasil menjaga kelestarian pantai dan *punishment* kepada masyarakat yang melanggar.

Capaian pemeriksaan dengan indikator BOD air laut tahun 2010 sampai 2015 seperti grafik berikut:

Grafik 3.40
Kualitas Air Laut (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015



Program yang mendukung indikator kinerja terpenuhinya baku mutu BOD air laut di Kabupaten Badung pada tahun 2015 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Air. Secara rinci hasil pengamatan kualitas air laut berdasarkan kondisi parameter BOD air laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.86
Hasil Pemanataan Parameter BOD Air Laut di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015

no	Nama Sungai	Param eter	Standar Baku Mutu	Hasil Penelitian				
				2011	2012	2013	2014	2015
A.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	
	P Nusa Dua1	BOD air laut	10 mg/ltr	5,47	7,56	7,69	7,69	6,98
	P. Tj Bena1			5,16	7,06	7,27	7,69	7,1
	P.Kutuh1			6,99	9,26	9,61	9,61	9,8
	P.Jimbaran1			8,76	8,57	9,73	8,73	9,2
	P.Kedonganan 1			2,58	22,30	7,93	7,93	8,5
	P. Tuban1			7,380	7,45	7,82	7,82	9,8
	P. Kuta1			7,70	8,43	9,12	9,12	9,2
	P. Legian1			8,30	8,36	9,52	9,52	9,2
	P. Petitenget1			5,95	7,19	7,64	7,64	1,22
	P. Seseh1			8,18	22,95	23,80	23,80	9,7

Untuk mengetahui persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu dapat disampaikan bahwa diadakan melalui pengukuran kualitas udara. Di Kabupaten Badung dilaksanakan di masing-masing Kecamatan, dimana masing-masing

Kecamatan diambil 2 titik sampel yang dianggap menunjukkan kualitas udara daerah setempat. Adapun titik lokasi pemantauan kualitas udara Ambien di Kabupaten Badung adalah: Tanjung Bena, Nusa Dua, Jimbaran, Tuban, Kuta, Canggu, Kerobokan, Sempidi, Abiansemal dan Petang. Baku mutu yang digunakan dalam pengukuran kualitas udara di lokasi tersebut berpedoman pada baku mutu peraturan gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007. Sumber daya udara yang dipantau adalah NO₂ (Natrium Dioksida). Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Badung dilakukan terhadap kualitas mutu udara ambien.

NO₂ (Gas Natrium Dioksida / Nitrit) merupakan senyawa yang berbahaya apabila konsentrasinya tinggi di udara yang mempengaruhi kualitas udara dilingkungan sekitar. Kadar Baku Mutu NO₂ yang ditetapkan sesuai PerGub No 8 Tahun 2007 yaitu 400 Ug/m³.

Hasil capaian rata-rata kadar NO₂ (Gas Natrium Dioksida/ Nitrit) tahun 2015 sebesar 22.49 Ug/ltr telah melampaui target RPJMD sebesar 400 Ug/m³. Dari hasil capaian tersebut maka target kinerja kualitas udara di Kabupaten Badung telah melampaui target sebesar 194.15 % berarti tingkat pencapaiannya sangat baik. Dibandingkan tahun 2014 hasil realisasi kualitas udara parameter kadar NO₂ sebesar 14.75Ug/ltr dengan capaian kinerja sebesar 196,31%. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas udara yang cukup signifikan. Data awal tahun 2010 menunjukkan kadar NO₂ rata-rata mencapai 42,1 dengan capaian kinerja 189,48%, tahun 2011 rata-rata sebesar 74,63 dengan capaian kinerja 181,34% dan tahun 2012 menurun sebesar 71,55 Ug/m³ dengan capaian kinerja 182,11%, Capaian Kinerja Tahun 2013 sebesar 182,19%, tahun 2014 sebesar 196,31%, Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 195,71%.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penelitian kadar NO₂ pada 10 lokasi di Kabupaten Badung terdapat perubahan terhadap kualitas udara, namun di wilayah Canggu dan Petang terjadi perbedaan kadar NO₂ ambient yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kadar NO₂ pada 8 wilayah lainnya yang menjadi sampel penelitian. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan secara signifikan pada semua lokasi yang menjadi wilayah sampel.

Masih baiknya kualitas udara di Kabupaten Badung disebabkan upaya yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dengan menanam perindang baik di tempat umum seperti sekolah, pasar, perkantoran dan perindang yang ada di telajakan, konsistensinya pelaksanaan program berupa gerakan penanaman 1 milyar pohon dari pemerintah Kabupaten Badung maupun sosialisasi kepada masyarakat berupa larangan pembakaran

sampah rumah tangga. Upaya lain juga dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas udara antara lain:

1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan.
2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan.
3. Pemeriksaan Kualitas Udara

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata NO₂ Jakarta pada tahun 2015 sebesar 42.9 Ug/m³ sedangkan nilai NO₂ Kabupaten Badung sebesar 22.49 Ug/m³ menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Badung masih jauh lebih baik.

Program yang mendukung indikator kinerja terpenuhinya kualitas udara berdasarkan parameter NO₂ di Kabupaten Badung pada tahun 2015 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas udara, dengan pagu anggaran sebesar Rp.52.654.900,00 dengan realisasi Rp. 52.009.900 (98.78%)

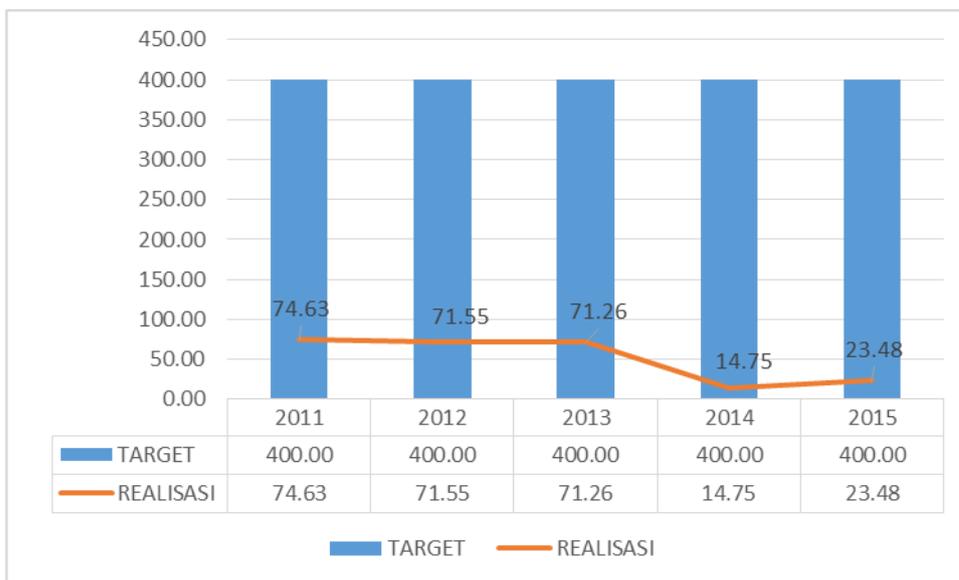
Secara rinci hasil pengamatan kualitas udara berdasarkan kondisi parameter NO₂ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.87
Parameter NO₂ per wilayah di Kab Badung Tahun 2011-2015

no	Nama Sungai	Parameter	Standar Baku Mutu	Hasil Penelitian				
				2011	2012	2013	2014	2015
A.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	
	Tj. Bena	NO ₂	400 Ug/m ³	47,500	47,315	46,942	11,00	24,8
	Nusa Dua			55,464	54,707	54,312	13,78	20,7
	Jimbaran			92,19	85,949	86,669	10,67	16,5
	Tuban			124	123,446	124,765	38,23	38,5
	Kuta			138,65	133,714	131,484	20,89	24,2
	Canggu			60,185	54,915	55,205	7,29	26,29
	Krobokan			65,77	66,485	66,108	8,89	12,4
	Sempidi			83,911	83,771	83,837	13,34	22,2
	Abiansemal			46,854	39,309	38,634	12,89	29,9
	Petang			48,50	25,856	24,638	4,89	19,7

Capaian kinerja dengan indikator NO₂ tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan bahwa masih terjaganya kualitas udara di kabupaten Badung seperti grafik berikut :

Grafik 3.41
Kualitas udara (NO2) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2015



**Indikator 3.
 Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah.**

Tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah, secara akumulasi ditargetkan 246 usaha dan terealisasi 316 usaha (untuk tahun 2015, target 80 perusahaan, realisasi 80 perusahaan/100%), sehingga capaian kinerja tercapai 131,67%, tercapai capaian kinerja ini karena pemerintah Kabupaten selalu berupaya menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang ditempuh melalui kebijakan yang mendorong dan meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan melakukan upaya seperti :

1. Secara kontinu (setiap tahun) melakukan pemantauan dan pengujian kadar BOD dan COD air sungai
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan yang baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi upaya-upaya menjaga sumber-sumber mata air.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 15,83% (capaian kinerja kumulatif tahun 2014 sebesar 147,5%), hal ini disebabkan karena sebagian besar usaha telah terkoneksi dengan Sistem Denpasar Sewage Developmnet Plant (DSDP/IPAL Komunal), sehingga tidak perlu lagi melakukan pengolahan limbah sendiri.

Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dapat disampaikan pencapaian target terus melampaui target setiap

tahunnya. Realisasi akumulasi capaian target sasaran yang telah ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun 2011					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SISA	%
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	921.622.225	898.348.925	23.273.300	97,47
	1 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	48.263.550	48.263.550	-	100,00
	Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penuaan Lingkungan (PKP2L)				
	2 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung	-	-	-	-
	3 Pemantauan dan Penelitian Kualitas udara di Kab. Badung	-	-	-	-
	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Lingkungan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00

Tahun 2012					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SISA	%
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.151.892.600	1.108.106.600	43.786.000	96,20
	1 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	33.549.500	32.359.500	1.190.000	96,45
	Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penuaan Lingkungan (PKP2L)				
	2 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung				
	Pemantauan dan Penelitian Kualitas udara di Kab. Badung				
	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Lingkungan	94.182.625,00	94.182.625,00	-	100,00

Tahun 2013					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SISA	%
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.190.659.130	1.108.106.600	82.552.530	93,07
	1 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penuaan Lingkungan (PKP2L)	111.253.000	108.293.000	2.960.000	97,34
	2 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air dan udara di Kab. Badung	93.565.000	93.565.000	-	100,00

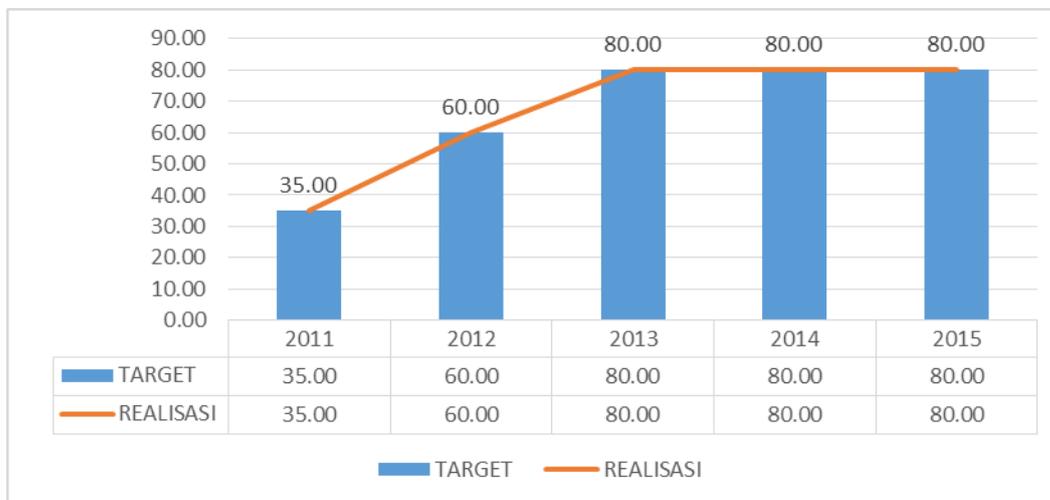
Tahun 2014					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SISA	%
I	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.134.406.900	1.030.748.900	103.658.000	90,86
	1 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Pnaatan Lingkungan (PKP2L)	16.608.500	16.608.500	-	100,00
	2 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung	112.468.500	94.978.500	17.490.000	84,45
	3 Pemantauan dan Penelitian Kualitas udara Kab. Badung	51.612.000	51.364.500	247.500	99,52

Tahun 2015					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SISA	%
I	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.541.014.625	1.030.748.900	510.265.725	66,89
	1 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Pnaatan Lingkungan (PKP2L)	16.608.500	16.608.500	-	100,00
	2 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung	20.192.600	19.907.600	285.000	98,59
	3 Pemantauan dan Penelitian Kualitas udara Kab. Badung	52.654.900	52.009.900	645.000	98,78

Program yang mendukung terhadap keberhasilan ini adalah program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Pembinaan kinerja perusahaan dalam pnaatan lingkungan (PKP2L), yang didukung dana sebesar Rp.20.065.950, dengan realisasi anggaran Rp. 19.190.950 (95.64%).

Realisasi akumulasi capaian sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2014 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Grafik 3.42
**Perusahaan yang menggunakan Pengelolaan Limbah
 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015**



Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL.3.88
**CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
 MENINGKATNYA KUALITAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI SELURUH
 WILAYAH KABUPATEN BADUNG MENUJU BADUNG YANG BERSIH DAN HIJAU
 TAHUN 2015 DIBANDINGKAN TARGET RPJMD TAHUN 2015**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi akhir yg diharapkan	Capaian kinerja	Persentase Kinerja
1.	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu :				Rata2: 120,45 mg/l
	Cod Air Sungai	10,2 mg/l	< 50 mg/l	26,74 mg/l	146,72 %
	BOD Air Sungai	5,2 mg/l	< 6 mg/l	6,10 mg/l	97,83 %
	BOD Air Laut	6,03 mg/l	< 10 mg/l	8,60 mg/l	116,80 %
2.	Sumber daya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu (NO ₂)	74,63 Ug/m3	400 Ug/m3	23,48 Ug/m3	195,71%
3.	Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	216	316	131,67%

Berdasarkan tabel 3.62 realisasi akumulasi pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Pelestarian Lingkungan Hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung Menuju Badung yang bersih dan hijau di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan.

3.3 Realisasi Anggaran .

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen, bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ *Money Follows Function* ” yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan yaitu : (1) pengelolaan pendapatan daerah, (2) pengelolaan belanja dan (3) pengelolaan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan Pendapatan Asli daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya.

Kabupaten Badung yang sumber PAD-nya sebagian besar dari sektor pariwisata selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Naik turunnya PAD Kabupaten Badung ini berbanding paralel dengan perkembangan kepariwisataan di Bali. Di sisi lain dengan melihat potensi yang cukup besar dari PAD Badung terutama dari komponen pajak hotel dan restoran, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan sumbangan kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya di Bali dengan menyisihkan 22 % dari PAD Badung sesuai Keputusan Gubernur Bali No. 286/01-F/HK/2009 tentang Relokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali yang besarnya 15% - 22%. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana.

2. Peningkatan Dana Perimbangan

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian.

3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Langkah-langkah untuk peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilakukan dengan menetapkan APBD tepat waktu dan memperkecil SILPA sehingga dapat memperoleh Dana Insentif daerah.

4. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat diketahui arah pembangunan Kabupaten Badung. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3.3.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Anggaran tahun 2015 tanggal 19 Desember tahun 2014, dan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang n Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung Anggaran Tahun 2015 tanggal 25

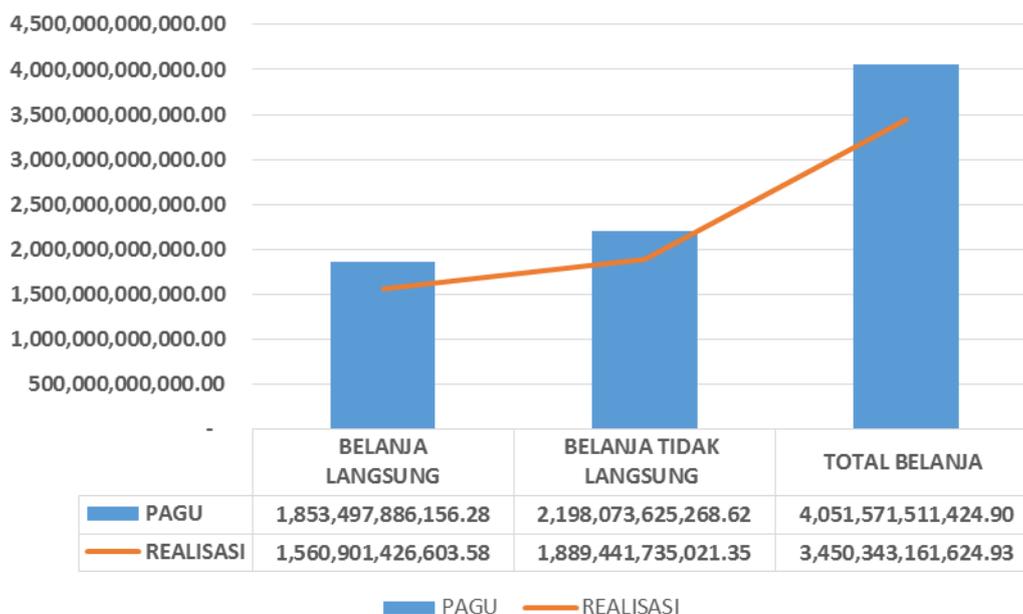
september 2015, maka pagu dan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten badung adalah sebagai berikut :

- a. Pagu anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp.4.051.571.511.424,90
 - Realisasi : Rp. 3.450.343.161.624,93
 - Terdiri dari :
 - Belanja Langsung :
 - Pagu : Rp.1.853.497.886.156,28
 - Realisasi : Rp. 1.560.901.426.603,58
 - Belanja pegawai 67.205.320.084,00 realisasi Rp.59.740.787.212,00 (88,89%)
 - Belanja barang/jasa . 678.323.213.262,50 realisasi Rp.574.796.679.217,00 (84,74%)
 - Belanja modal 1.107.969.352.809,78 realisasi Rp.926.363.960.174,58 (83,61%)
 - belanja tidak langsung :
 - Pagu : Rp. 2.198.073.625.268,62
 - Realisasi : Rp. 1.889.441.735.021,35

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015

Grafik 3.43

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015



PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR , PAGU DAN REALISASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	6	8		
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	Program Pengembangan Nilai Budaya	25.647.996.275	25.647.996.275	100%
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	Pengembangan Nilai Budaya			
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)				
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	109.828.819.676,00	88.251.995.276,00	80.35%
			2. Pendidikan Menengah	14.469.766.715,00	7.929.825.004,00	54.80%
			3. peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	2.668.509.900,00	2.438.282.500,00	91.37%
		5. Angka Melek Huruf	Pendidikan Non Formal	517.478.100,00	514.921.500,00	99.50%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	Pendidikan Menengah	16.914.150.000,00	4.646.370.358,50	27.47%

5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7.	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan anak	1.029.580.000	812.698.000	78.93%
		8.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup		44.669.200	44.669.200	100%
		9.	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	718.849.050	670.244.050	93.23%
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	379.751.000	373.729.600	98.41%
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	10.	Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	629.868.500	514.536.900	81.68%
		11.	Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	43.941.100	39.994.280	91.01%
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	37.464.100	32.779.100	87.49%
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12.	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.514.327.425	2.449.948.125	97.43%
		13.	Cakupan desa siaga aktif		52.581.300	50.351.300	95.75%
		14.	Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga		41.137.900	37.862.900	92.03

8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	<p>15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:</p> <p>1. Prosentase keluarga yang memiliki KK</p> <p>2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP</p> <p>3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran</p> <p>4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian</p>	Program Penataan Administrasi Kependudukan	707.865.350	640.084.524	90.42%
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Program Keluarga Berencana	827.196.505,00	768.878.789,00	92.94%
10.	Mempermudah, memperlancar dan	17. Persentase penurunan	1. Pemberdayaan	2.400.000.000	2.400.000.000	100%

	memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	penyandang masalah sosial	<p>Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS.</p> <p>2. Pelaksanaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>3. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo</p> <p>4. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial</p> <p>5. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>			
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	966.220.700.	901.346.590	93.28%
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.561.436.250.	3.072.141.552	86.26%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	<p>1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <p>2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>3. Program Peningk</p>	28.781.360.909,00	21.833.626.439,00	75.86%

			<p>atan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>5. Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</p> <p>8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p> <p>9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</p>			
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	28.781.360.909,00	21.833.626.439,00	75.86%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	1. Program pencegahan dan penanggulangan	5.339.594.874	5.163.440.792	96.70%

			<p>n penyakit ternak;</p> <p>2. Program Peningkatan produksi hasilpeternakan</p> <p>3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</p> <p>4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</p>			
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	<p>1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;</p> <p>2. Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan ;</p> <p>3. Program pengembangan budidaya perikanan;</p> <p>4. Program Pengembangan perikanan tangkap;</p> <p>5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan</p>	3.061.551.547	2.579.821.447	84.26%

			<p>Pemasaran Produksi Perikanan;</p> <p>6. Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan ;</p> <p>7. Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;</p> <p>8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap ;</p> <p>9. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</p>			
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.755.508.200	2.510.125.200.	91.09
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari	Program pemeliharaan kankamtribmas dan pencegahan tindak kriminal	657.140.375	522.962.300	79.58%

		1 hari setelah laporan diterima				
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.413.097.850	920.016.400	65.10%
		27. Peningkatan pendapatan asli daerah	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.422.518.500	5.633.133.000	87.70%
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	346.059.200	176.820.600	51.09%
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Program Perencanaan Tata Ruang	1.359.435.700	1.179.739.220	86.78%

		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan lainnya	128.137.628.625	107.137.800.868	83.61%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	1. Program Pengendalian pemanfaatan ruang	2.855.253.000	2.358.806.902	82.61%
		32. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif	1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2. Penataan Bangunan Gedung	219.250.544.393 367,780,414,249	196.667.576.612 296,926,599,524	89.69% 80.73%
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	33. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	2. Program peningkatan pelayanan angkutan 3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	31.858.397.525	29.034.843.697	91.13%
		34. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light				
21.	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	35. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air: •COD air sungai	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	1.541.014.625	1.030.748.900	66.88%
		•BOD air sungai				
		•BOD air laut				
		36. Persentase sumberdaya				

		udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu				
		37. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah				

3.4 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2015 .

1. Juara II Tingkat Nasional Lomba Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi.
2. Penilaian Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta lingkungan hidup telah berhasil meraih Tropy Adipura nomor urut 1 tingkat nasional tahun tahun 2014 dan peringkat 2 tahun 2015. Satu inovatif program DKP Badung juga masuk 40 besar tingkat nasional melalui inovatif program Gelatik.
3. Sejumlah prestasi yang berhasil diraih Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2015 pada tingkat Nasional meliputi:
4. Meraih Tropy Adipura Tingkat Nasional Tahun 2015 (Juara II Nasional Katagori Kota Kecil Seluruh Indonesia).
5. Pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim Tahun 2015, berdasarkan hasil verifikasi Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa Desa Sempidi berhasil memperoleh Trophy dan piagam penghargaan sebagai Desa PROKLIM 2015 Tingkat Nasional.
6. Penghargaan Pengelola Lingkungan Tingkat Propinsi Bali Tahun 2015 dengan katagori sebagai berikut : Desa Sadar Lingkungan (DSL) Tahun 2015 diraih oleh Desa Kekeran Kecamatan Mengwi.
7. Juara I Kelompok Keluarga Berencana Pria/Motivator KB Pria atas nama Kelompok KB Pria "Bhana Shanti" dari Desa Petang, Kecamatan Petang.
8. Juara II Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Tipe B, C dan D atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dari Kelurahan Kapal, Mengwi-Badung.

9. Juara II Pemuda Pelopor (Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan) tingkat Nasional atas nama Roselina Ni Putu Novia Mandasari.
10. Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada I Wayan Badung katagori Pelopor Ketahanan Pangan alamat Br. Sidan, Desa Belok, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
11. Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Si Ketut Wirama, SH katagori Pembina Ketahanan Pangan alamat Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
12. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor: B1503/M.PAN-RB/04/2015 atas Inovasi Pengembangan Potensi Pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan) Kabupaten Badung sebagai Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015.
13. Juara Umum 1 Kompetisi Baywatch Tingkat Nasional di Propinsi Banten.
14. Inovasi pengembangan asparagus Badung Utara Penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. CHAMPION OF E-TOURISM" dan "CHAMPION OF E-EDUCATION Penghargaan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
16. TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK Penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. PENGHARGAAN ARSIP TINGKAT NASIONAL 2015 Penghargaan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
18. OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Penghargaan oleh BPK RI;
19. KABUPATEN TERBAIK NASIONAL Penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri;
20. KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI Penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia;
21. ANUGRAH KEARSIPAN NASIONAL 2015 Penghargaan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
22. ADIPURA TERBAIK KEDUA KTA KECIL Penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
23. KABUPATEN PEDULI HUKUM DAN HAM Penghargaan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
24. SWASTI SABA WISTARA Penghargaan oleh Kementerian Kesehatan RI;
25. TROFI DESA PROKLIM Penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;

26. DAERAH BERPRESTASI PENERIMA DID Penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia;
27. PENGHARGAAN PERCEPATAN PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL Penghargaan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI;
28. WAHANA TATA NUGRAHA 2015 Penghargaan oleh Kementerian Perhubungan RI

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 14 tujuan, 21 sasaran dengan 36 indikator kinerja utama (IKU), tersirat secara jelas bahwa Pemkab Badung telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah system pertanggung jawaban kinerja yang lebih akuntabel melalui SAKIP. Hal tersebut tampak jelas dari upaya memperbaiki dokumen perencanaan melalui revisi RPJMD, IKU dan Renstra agar seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mulai diimplementasikannya system pelaporan kinerja berbasis elektronik (e-Sakip) sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Evaluasi Lakip tahun 2013.
2. Secara umum pencapaian kinerja sudah menunjukkan kemajuan yang sangat baik, dari 14 tujuan, 21 sasaran, 36 indikator kinerja terdapat 10 tujuan yang sudah dilaksanakan, dan 4 tujuan yang belum tercapai sesuai dengan harapan . Dengan sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik berjumlah 17 sasaran strategis yaitu sasaran 1,2,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21 dan 4 belum berhasil dilaksnakan 100% yaitu sasaran strategis 3,5,11,14 dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 89,79%. Namun secara umum dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik.
3. Disamping capaian kinerja tersebut diatas, kerja keras segenap jajaran Pemkab Badung tahun 2015 juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam bentuk pemberian penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional disamping capaian kinerja pembangunan lainnya seperti seperti pencapaian target MDGs, angka IPM yang semakin meningkat, PDRB, distribusi pendapatan dengan tingkat pemerataan tinggi dan kesenjangan rendah dan tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional serta tingkat pengangguran terbuka yang relative kecil menjadi bukti nyata kesungguhan mewujudkan *result oriented government* di Kabupaten Badung.

4.2 Rekomendasi

Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius diantaranya :

1. Terhadap sasaran dan indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target diantaranya berkaitan dengan lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/SMK , angka kematian, meningkatkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan, jumlah pelanggaran perda, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk dapat merumuskan program

dan kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut pada tahun yang akan datang.

2. Mengingat tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan, terhadap sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan untuk dipertimbangkan menjadi sasaran dalam RPJMD yang akan ditetapkan, terutama berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pencapaian indikator pelanggaran Perda.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Pemerintah Kabupaten Badung ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Dalam rangka perbaikan system monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap e-Sakip perlu terus dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Badung di masa yang akan datang.
5. Sistem renumerasi atau pengakuan (reward dan recognition) perlu diperhatikan bagi pihak yang menyepakati perjanjian atau kesepakatan kinerja, sehingga dapat menghindari potensi mengurangi makna dan semangat pihak-pihak yang bersepakat.

Mangupura, 22 Maret 2016
Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai sesuai RPJMD	Capaian Kinerja	Kinerja
1	2	3	4		5	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti	3. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Srad	27 Upacara	117 Upacara	100%	100%
		4. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Bhakti	27 Kegiatan	117 Kegiatan	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 1 :				
2	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali	3. Persentase desa adat yang memenuhi tananan yg ditetapkan	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
		4. Persentase sekaa teruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	10.90 % (58 sekaa teruna)	14.66% (78 sekaa teruna)	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 2 :				
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak usia sekolah yg tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 3 :				
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jejang SMA/MA/SMK	81,30%	100%	99,37%	99,37%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 4 :				
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	4. Angka kesakitan	634 per 100.000 penddk	200 per 100.000 penddk	353,34 per 100.000 penddk	23,33%
		5. Angka kematian	-	-	-	91,74%
		6. Persentase Balita Gizi buruk	0,47	0,4	0,2	150,0%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 5 :				89,71%
6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu	Cakupan layanan administrasi kependudukan	83.38%	98.75%	101.35%	103.00%

		Rata2 kinerja indikator tujuan 6 :				103%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati	Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 RTS	(4.326 RTS) 32,54%	(4.326 RTS) 32,54%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 7 :				100%
8	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan	3. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung; 4. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	14.305 US\$ 106.017.947,01	5.600 US\$ 590.140.152,668	5.534 US\$ 368.197.191,86	98,82% 62,39%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 8 :				80,61%
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	4. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan 5. Peningkatan populasi peternakan 6. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	162.371,5 ton 1.607.998 ekor 1.607.998 ekor 31.228,10 ton	174.450 ton 1.450.000 ekor 1.450.000 ekor 157.556,50 ton	177.004 ton 1.486.869 ekor 1.486.869 ekor 148.913,13 ton	109,01% 102,54 ekor 102,54 % 94,51 %
		Rata2 kinerja indikator tujuan 9 :				
10	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	2. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	1.764	1.500	1.658	89,46%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 10 :				89,46%
11	Terjaminnya terwujudnya good government dan clean government	3. Opini pemeriksaan BPK 4. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	WDP 35,72	WTP 70	WTP 75,89	100% 108,41%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 11 :				104,21%
12	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang	3. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten 4. Persentase luas kawasan bebas banjir	3 dok 99,86%	30 dok 99,92%	30 dok 99,96%	100% 100,03%
		Rata2 kinerja indikator Tujuan 12 :				100,02%
13	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah	1. Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45,82%	60,00%	65,01%	108,34%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 13 :				108,34%

14	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu COD air sungai	110,2 MG/L	<50	26,74	146,72
		BOD air sungai	5,2	<6	6,10	97,83
		BOD air laut	6,03	<10	8,6	116,80
		Rata2 kinerja indikator tujuan 14 :				120,45%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai	Target th 2015 /satuan	Realisasi th 2015	% Capaian Kinerja th 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	38. Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	100 %
	Rata-rata kinerja sasaran 1:		0	0	0	0	100%
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	39. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	16,39% (20 ds adat)	3,27 (4)	3,27 (4)	100%
		40. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	3,68% (20 sekaa teruna)	0,73 (4)	0,73 (4)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 2 :						100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	41. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100	100	100	100%
		42. Angka Melek Huruf	92,92 %	100	100	95,71	95,71%
	Rata-rata kinerja sasaran 3 :						97,86%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	43. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 4 :						100%
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	44. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	62.16	99.83	60/ 100.000	99.83	33,62%
		45. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6.71	3.87	4,5/ 1.000	3.87	114,00%
		46. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5.1	3.62	5/ 1.000	3.62	127,60%
	Rata-rata kinerja sasaran 5 :						91,74%
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit	47. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	0	46.15	45	46.15	102,56%

	layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat KabupatenBadung.	48. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	100	100	100	100	100%			
	Rata-rata kinerja sasaran 6 :						101,28%			
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	49. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	98,08	97.74	95	97.74	102,88%			
50. Cakupan desa siaga aktif		100	100	100	100	100%				
51. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga			80.18	70	80.18	114,54%				
	Rata-rata kinerja sasaran 7 :						105,81%			
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	52. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	93.60	100	100	100	100%			
5. Prosentase keluarga yang memiliki KK										
6. Prosentase penduduk yang memiliki KTP		90.62			100			100	90.02	90.02%
7. Prosentase kepemilikan akta kelahiran		65.91			95			95	99.99	105.25%
8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	100	100	115.39	115.39%					
	Rata-rata kinerja sasaran 8 :						102,80%			
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	53. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.13	0.12	0.12	0.12	100%			
	Rata-rata kinerja sasaran 9 :						100%			
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	54. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.29 4 rts	4.326 RTS (32,54%)	600 RTS (4,51%)	600 RTS (4,51%)	100%			

	Rata-rata kinerja sasaran 10 :						100%
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	55. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	88 koperasi	100 % (332 Koperasi)	21.68% (72 Koperasi)	30.10% (100 Koperasi)	138,8 %
		56. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.017,497,01	US\$ 590.140.152,668	US\$ 120.152.926,503	US\$ 51.860.534,16	43,16%
	Rata – rata kinerja sasaran 11 :						90,98%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	57. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	180.923	873.446	174.450	177.004	101,47%
		58. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	63.93 Kw/Ha	63,18 Kw/Ha	64Kw/Ha	63.18Kw/Ha	98,72%
	Rata-rata kinerja sasaran 12 :						100,10%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	59. Jumlah populasi peternakan		1.486.081	1.450.000	1.486.081	102,49%
		60. Jumlah produksi perikanan dan kelautan		149.766,9	5.061,87	7.097,59	140,22%
	Rata-rata kinerja sasaran 13 :						121,36
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	61. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	1764	3158	1.500	1.658	86,98%
	Rata-rata kinerja sasaran 14 :						86,98%
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	62. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	25%	67.92%	65%	67.92%	104,49%
	Rata-rata kinerja sasaran 15 :						104,49%
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	63. Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100%
		64. Peningkatan pendapatan asli daerah	936.887,975,37	2.990.965.598	2.302.169.811	2.990.965.598	129,92%
	Rata-rata kinerja sasaran 16 :						114,96%
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan	65. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35.72	70,0	70,0	75.89	108,41%

	pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel						
	Rata-rata kinerja sasaran 17 :						108,41%
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	66. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	3	30	3	4	133,33%
		67. Prosentase Jaringan irigasi berkeondisi baik	89.14	94.58	94.68	94.72	100,04%
	Rata-rata kinerja sasaran 18 :						116,69%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguan lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	68. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45.82	65.01	60	65.01	108,34%
	Rata-rata kinerja sasaran 19 :						108,34%
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	69. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	31	0,64	0.60	0,61	98,3%
		70. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	56,86	80,39	78.43	80,39	102,5%
	Rata-rata kinerja sasaran 20 :						100,48%
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	71. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	10.2	26.74	50	26,74	146,5%
		• COD air sungai					
		• BOD air sungai	5.2	6.1	6	6,1	97,83%
		• BOD air laut	6.03	10	10	8,6	116,8%
		Sub Rata-rata					120,38%
		72. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	74,63	400	400	23.48	195,71%
		73. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	216	240	316	131,67%
	Rata-rata kinerja sasaran 21 :						149,25%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA		0
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	%	100
		5. Angka Melek Huruf	%	100
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	kh	60/ 100.000
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	kh	4,5/ 1.000
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	kh	5/ 1.000
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	%	45
		11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	%	100
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	95
		13. Cakupan desa siaga aktif	%	100
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	%	70

8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	%	100
		1. Prosentase keluarga yang memiliki KK		
		2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	%	100
		3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	100
		4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.12
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	%	67
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	%	21.68
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$	120.152.926.503
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	TON	174.450
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	KW/HA	64
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Ekor	1.450.000
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	157.556,05
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Pelanggaran	2.500
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	%	75

16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	wtp
		27. Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp	2.302.169.811
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	70
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Dokumen	3
		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	%	94.68
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	%	60
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	(V/C ratio)	0.60
		33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	%	78.43
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	mg/lt	50
		• COD air sungai		
		• BOD air sungai	mg/lt	6
		• BOD air laut	mg/lt	10
35. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu		µg/m ³	400	
36. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah		Perusahaan	80	

**Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai sesuai RPJMD	Capaian Kinerja	Kinerja
1	2	3	4		5	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada dan Bhakti	1. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Srada	27 Upacara	117 Upacara	100%	100%
		2. Peningkatan/Jumlah pelaksanaan Bhakti	27 Kegiatan	117 Kegiatan	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 1 :				100%
2	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali	1. Persentase desa adat yang memenuhi tananan yg ditetapkan	47.54 % (58 desa adat)	63.93% 78 (desa adat)	100%	100%
		2. Persentase sekaa teruna yg memenuhi tatanan yg ditetapkan	10.90 % (58 sekaa teruna)	14.66% (78 sekaa teruna)	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 2 :				100%
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak usia sekolah yg tuntas wajib belajar 12 tahun	100%	100%	100%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 3 :				100%
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/MA/SMK	81,30%	100%	99,37%	99,37%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 4 :				99,37%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	1. Angka kesakitan	634 per 100.000 penddk	200 per 100.000 penddk	353,34 per 100.000 penddk	23,33%
		2. Angka kematian	-	-	-	91,74%
		3. Persentase Balita Gizi buruk	0,47	0,4	0,2	150,0%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 5 :				89,71%

6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu	Cakupan layanan administrasi kependudukan	83.38%	98.75%	101.35%	103.00%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 6 :				103%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati	Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 RTS	(4.326 RTS) 32,54%	(4.326 RTS) 32,54%	100%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 7 :				100%
8	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan	1. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung;	14.305 US\$ 106.017.947,01	5.600 US\$ 590.140.152,668	5.534 US\$ 368.197.191,86	98,82% 62,39%
		2. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM				
		Rata2 kinerja indikator tujuan 8 :				80,61%
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan	162.371,5 ton	174.450 ton	177.004 ton	109,01%
		2. Peningkatan populasi peternakan	1.607.998 ekor	1.450.000 ekor	1.486.869 ekor	102,54 ekor
		3. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	1.607.998 ekor 31.228,10 ton	1.450.000 ekor 157.556,50 ton	1.486.869 ekor 148.913,13 ton	102,54 % 94,51 %
		Rata2 kinerja indikator tujuan 9 :				
10	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	1.764	1.500	1.658	89,46%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 10 :				89,46%
11	Terjaminnya terwujudnya good goverment dan clean government	1. Opini pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	100%
		2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	35,72	70	75,89	108,41%
		Rata2 kinerja indikator tujuan 11 :				104,21%
12	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang	1. Perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten	3 dok	30 dok	30 dok	100%
		2. Persentase luas kawasan bebas banjir	99,86%	99,92%	99,96%	100,03%
		Rata2 kinerja indikator Tujuan 12 :				100,02%
13	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah	1. Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45,82%	60,00%	65,01%	108,34%

		Rata2 kinerja indikator tujuan 13 :				108,34%
14	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu COD air sungai	110,2 MG/L	<50	26,74	146,72
		BOD air sungai	5,2	<6	6,10	97,83
		BOD air laut	6,03	<10	8,6	116,80
		Rata2 kinerja indikator tujuan 14 :				120,45%

**Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 .
berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai	Target th 2015 /satuan	Realisasi th 2015	% Capaian Kinerja th 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	37. Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	100 %
	Rata-rata kinerja sasaran 1:		0	0	0	0	100%
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	38. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	16,39% (20 ds adat)	3,27 (4)	3,27 (4)	100%
		39. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBI NAAN	3,68% (20 sekaa teruna)	0,73 (4)	0,73 (4)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 2 :						100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	40. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100	100	100	100%
		41. Angka Melek Huruf	92,92 %	100	100	95,71	95,71%
	Rata-rata kinerja sasaran 3 :						97,86%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	42. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 4 :						100%
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	43. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	62.16	99.83	60/ 100.000	99.83	33,62%
		44. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6.71	3.87	4,5/ 1.000	3.87	114,00%
		45. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5.1	3.62	5/ 1.000	3.62	127,60%
	Rata-rata kinerja sasaran 5 :						91,74%
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan	46. Cakupan pelayanan	0	46.15	45	46.15	102,56%

	terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat KabupatenBadung.	puskesmas dengan standar ISO					
		47. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	100	100	100	100	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 6 :						101,28%
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	48. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	98,08	97.74	95	97.74	102,88%
		49. Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100%
		50. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga		80.18	70	80.18	114,54%
	Rata-rata kinerja sasaran 7 :						105,81%
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	51. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	93.60	100	100	100	100%
		5. Prosentase keluarga yang memiliki KK				100	
		6. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	90.62	100	100	90.02	90.02%
		7. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	65.91	95	95	99.99	105.25%
		8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	-	100	100	115.39	115.39%
	Rata-rata kinerja sasaran 8 :						102,80%
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	52. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.13	0.12	0.12	0.12	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 9 :						100%

10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	53. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 rts	4.326 RTS (32,54%)	600 RTS (4,51%)	600 RTS (4,51%)	100%
	Rata-rata kinerja sasaran 10 :						100%
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	54. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	88 koperasi	100 % (332 Koperasi)	21.68% (72 Koperasi)	30.10% (100 Koperasi)	138,8 %
		55. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$ 106.017,497,01	US\$ 590.140.152,668	US\$ 120.152.926,503	US\$ 51.860.534,16	43,16%
	Rata – rata kinerja sasaran 11 :						90,98%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	56. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	180.923	873.446	174.450	177.004	101,47%
		57. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	63.93 Kw/Ha	63,18 Kw/Ha	64Kw/Ha	63.18Kw/Ha	98,72%
	Rata-rata kinerja sasaran 12 :						100,10%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	58. Jumlah populasi peternakan		1.486.081	1.450.000	1.486.081	102,49%
		59. Jumlah produksi perikanan dan kelautan		149.766,9	5.061,879	7.097,59	140,22%
	Rata-rata kinerja sasaran 13 :						121,36
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	60. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	1764	3158	1.500	1.658	86,98%
	Rata-rata kinerja sasaran 14 :						86,98%
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	61. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	25%	67.92%	65%	67.92%	104,49%
	Rata-rata kinerja sasaran 15 :						104,49%
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis	62. Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100%

	kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	63. Peningkatan pendapatan asli daerah	936.8 87.97 5.37	2.990.9 65.598	2.302.1 69.811	2.990 .965. 598	129,92%
	Rata-rata kinerja sasaran 16 :						114,96%
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	64. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35.72	70,0	70,0	75.89	108,41%
	Rata-rata kinerja sasaran 17 :						108,41%
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	65. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	3	30	3	4	133,33%
		66. Prosentase Jaringan irigasi berkeondisi baik	89.14	94.58	94.68	94.72	100,04%
	Rata-rata kinerja sasaran 18 :						116,69%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	67. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	45.82	65.01	60	65.01	108,34%
	Rata-rata kinerja sasaran 19 :						108,34%
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	68. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	31	0,64	0.60	0,61	98,3%
		69. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	56,86	80,39	78.43	80,39	102,5%
	Rata-rata kinerja sasaran 20 :						100,48%
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	70. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	10.2	26.74	50	26,74	146,5%
		• COD air sungai					
		• BOD air sungai	5.2	6.1	6	6,1	97,83%
		• BOD air laut	6.03	10	10	8,6	116,8%
	Sub Rata-rata					120,38%	
		71. Persentase sumberdaya udara		400	400	23.48	195,71%

		yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	74,63				
		72. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	216	240	316	131,67%
	Rata-rata kinerja sasaran 21 :						149,25%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Tujuan	Indikator	Formula	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Peningkatan pelaksanaan srada 2. Peningkatan pelaksanaan bhakti	Jumlah pelaksanaan srada tahun sekarang – tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100% Jumlah pelaksanaan bhakti tahun sekarang – tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100%	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	Jumlah konflik SARA terjadi di Kabupaten Badung yang dihitung pada tahun berkenaan	Peningkatan pelaksanaan srada dan bhakti pada tujuan IKU tidak dihitung	Dinas Kebudayaan
2. Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.	3. Persentase desa adat yang memenuhi tantangan yang ditetapkan 4. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan	Persentase desa adat yang memenuhi tatanan terhadap target akhir tahun RPJMD Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan terhadap target akhir tahun RPJMD	2. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i> 3. Persentase sekaa teruna yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>	Jumlah desa adat yang memenuhi tatanan yang lestari dibagi desa adat di Kab. Badung x 100% Jumlah sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang lestari dibagi desa adat di Kab. Badung x 100%		Dinas Kebudayaan

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

<p>3. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.</p>	<p>5. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun</p>	<p>Jumlah siswa usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK seluruhnya ----- x100% Jumlah penduduk usia sekolah 7 s.d 18 tahun</p>	<p>3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.</p>	<p>4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun</p> <p>5. Angka Melek Huruf</p>	<p>Jumlah siswa usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK seluruhnya ----- x100% Jumlah penduduk usia sekolah 7 s.d 18 tahun</p> <p>Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis ----- x100% jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</p>	<p>Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah</p> <p>Mengurangi penduduk yang buta huruf dan meningkatkan taraf hidup penduduk</p>	<p>Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga</p>
<p>4. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p>	<p>6. Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/MA/SMK</p>	<p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/MA/SMK ----- x100% Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya</p>	<p>4. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi</p>	<p>6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah</p>	<p>Jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan dasar ----- x100% Jumlah siswa yang diterima pada jenjang pendidikan menengah</p>	<p>Meningkatkan pendidikan menengah universal</p> <p>Jumlah siswa yang dimaksud formula indikator sasaran adalah siswa yang lulus SMA</p>	<p>Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga</p>

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.	7. Angka kesakitan	Jumlah penderita penyakit DBD ----- x1000 Jumlah penduduk	5. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas ----- x100.000 Jumlah kelahiran Hidup	Angka kematian merupakan salah satu indikator terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Pengendalian angka kematian merupakan indikator untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	8. Angka kematian	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin da nifas ----- x100.000 Jumlah kelahiran hidup Jumlah bayi (berumur < 1 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah bayi (berumur < 1 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup		
	9. Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup Jumlah balita gizi buruk ----- x 100 Jumlah seluruh balita	6. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	Jumlah Puskesmas yang berstandar ISO ----- x 100% Jumlah seluruh Puskesmas	Terciptanya pelayanan yang baik disertai kualitas rumah sakit yang terakreditasi diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	Dinas Kesehatan
				11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	Jumlah RS yang berstandar terakreditasi ----- x 100% Jumlah seluruh RS		

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

			7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri 13. Cakupan desa siaga aktif 14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	<p>Jumlah posyandu kriteria purnama dan mandiri -----x 100%</p> <p>Jumlah posyandu</p> <p>Jumlah Desa Siaga yang Aktif ----- x 100%</p> <p>Jumlah Desa Siaga yang dibentuk</p> <p>Jumlah rumah tangga berPHBS ----- x 100%</p> <p>Jumlah rumah tangga yang dipantau</p>	<p>Kemandirian posyandu, desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan batasan-batasan yang dipakai untuk tercapainya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kab. Badung</p>	Dinas Kesehatan
6. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.	10. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	<p>Jumlah KK yg diterbitkan -----x100%</p> <p>Jumlah kepala keluarga</p> <p>Jumlah KTP yg diterbitkan -----x100%</p> <p>Jumlah Penduduk wajib KTP</p> <p>Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan ----- x 100%</p>	8. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan - Prosentase keluarga yang memiliki KK - Prosentase penduduk yang memiliki KTP	<p>Jumlah KK yg diterbitkan -----x100%</p> <p>Jumlah kepala keluarga</p> <p>Jumlah KTP yg diterbitkan -----x100%</p> <p>Jumlah Penduduk wajib KTP</p>	<p>Layanan administrasi kependudukan yang dicakup adalah KK, KTP, Akte Kelahiran, Akta Kematian</p>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

		jumlah Kelahiran yg terjadi Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan ----- x 100% Jumlah Kematian yg terjadi		- Prosentase kepemilikan akte kelahiran - Prosentase penduduk yang dilengkapi dengan akte kematian	Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan ----- x 100% jumlah Kelahiran yg terjadi Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan ----- x 100% Jumlah Kematian yg terjadi		
			9. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	PUS yang Usia Istrinya < 20 tahun ----- x 100% Pus yang usia istrinya 15-49 tahun	Memperkecil median usia kawin pertama wanita kurang dari 20 tahun dari 0.30 tahun 2010 menjadi 0.15 tahun 2015	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah	11. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima	10. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Penanggulangan masalah PMKS di Kabupaten Badung untuk 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kab. Badung	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

kesejahteraan sosial lainnya.		jaminan sosial dalam 1 tahun	sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.				
8. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	12. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung 13. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	Jumlah UKM yang berdiri pada tahun ke N dibagi jumlah UKM yang ada pada tahun ke N di kali 100% Nilai ekspor UKM tahun sekarang – nilai ekspor UKM tahun sebelumnya -----x 100% Nilai ekspor UKM tahun sebelumnya	11. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas 19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	Jumlah UMKM dan koperasi sehat dibagi jumlah UMKM dan Koperasi yang ada dikali 100% Nilai ekspor UKM tahun sekarang – nilai ekspor UKM tahun sebelumnya -----x 100% Nilai ekspor UKM tahun sebelumnya	Koperasi yang sehat dan berkualitas merupakan koperasi yang memenuhi standarisasi sesuai dengan Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.20/PERMEN. KUKM/XI/2008 Nilai ekspor yang dimaksud adalah nilai ekspor hasil UKM yang ada di Kabupaten Badung	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	14. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan 15. Peningkatan produktivitas	Selisih Total produk usaha pertanian, perkebunan tahun ke -n dan tahun n-1 dibagi total produk usaha pertanian, perkebunan pada pada tahun ke5 RPJM dikali 100% Selisih produktivitas pertanian per pada tahun ke n dengan tahun ke n-1 dibagi	12. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan 21. Tingkat produktivitas bahan	Total produk usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan pada tahun ke-n Total produksi bahan pangan utama per panen di bagi luas lahan	Yang menjadi batasan pengukuran peningkatan produksi dan produktivitas pada tujuan dan sasaran adalah kuantitas dari produksi hasil Komoditinya Peningkatan Kuantitas pangan untuk menjamin	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

	bahan pangan utama pangan	target produktivitas pada tahun ke 5 RPJMD		pangan utama (padi)		ketersediaan pangan penduduk	
	16. Peningkatan populasi peternakan	Selisih Total populasi peternakan tahun ke – n dan tahun n-1 dibagi total populasi tahun ke n-1 dikali 100%	13. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Jumlah seluruh populasi ternak tiap tahun yang dihitung pada saat pencacahan	Yang menjadi batasan pengukuran peningkatan produksi dan produktivitas pada tujuan dan sasaran adalah kuantitas dari produksi hasil Komoditinya Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang bermuara untuk kesejahteraan	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
	17. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan baik yang dihasilkan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan dalam jangka waktu tertentu		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan baik yang dihasilkan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan dalam jangka waktu tertentu		
1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	18. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan	Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan terhadap target akhir tahun RPJMD	14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun berkenaan	Pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan dn dipantau pada tahun berkenaan	Satpol PP
	19. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban terhadap target akhir RPJMD	15. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu	Jumlah laporan yang Direspon dlm kurun waktu Kurang dari 1 hari -----x 100 Jumlah pelanggaran	Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat dan badan hukum	Satpol PP

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

				kurang dari 1 hari setelah laporan diterima			
1. Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government</i> .	20. Opini pemeriksaan BPK	Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	16. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK	Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan merupakan salah satu perwujudan untuk menjadi <i>good government and clean government</i>	Inspektorat
	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur gara dan Reformasi Birokrasi RI	17. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,	27. Peningkatan pendapatan asli daerah	Jumlah pendapatan asli daerah	Adanya peningkatan pendaptan asli daerah merupakan salah satu keberhasilan dari tata kelola keuangan daerah	Dispenda / pasedahan Agung
				28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan gambaran dan pencapaian sistem manajemen kinerja pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan norma,	Bagian Ortal

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

			monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel			standar prosedur sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel menuju <i>good government</i> dan <i>clean government</i>	
12. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.	22. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten 22. Prosentase Jaringan Irigasi berkondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis kabupaten Jumlah panjang saluran Irigasi berkondisi baik ----- x100% Jumlah total panjang Saluran irigasi	18. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten 29. Prosentase Jaringan Irigasi berkondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis kabupaten Jumlah panjang saluran Irigasi berkondisi baik ----- x100% Jumlah total panjang Saluran irigasi	Terwujudnya tata ruang kawasan yang strategis	Bappeda & Litbang Dinas Bina Marga
13. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	24. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung 25. Prosentase kelancaran transportasi	Perbandingan luas lahan terbangun yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dengan luas total lahan yang boleh terbangun x 100% Jumlah ruas jalan bebas macet dibagi jumlah ruas jalan di	19. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	30. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	Perbandingan luas lahan terbangun yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dengan luas total lahan yang boleh terbangun x 100% Jumlah bangunan pemerintah yang ditingkatkan kondisinya -----x 100	Terlaksananya pembangunan sesuai dengan tata ruang	Dinas Cipta Karya

LKIP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

		wilayah Kabupaten Badung x 100%		31. Prosentase sarana prasarana Bangunan gedung pemerintah yang representatif	Jumlah total bangunan gedung pemerintah yang ada		
			20. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio) 33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	Rata-rata V/C Ratio pada ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan Jumlah persimpangan yang terpasang TL -----x100% jumlah persimpangan yang akan terpasang TL	Pengukuran v/c rasio pada ruas jalan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemacetan ruas jalan tersebut	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	26. Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu	Jumlah sumber daya air yang memenuhi baku mutu ----- x100% Banyaknya sumber daya air yang dipantau	21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	35. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air • COD air sungai • BOD air sungai	Jumlah obyek pemantauan sumber daya alam yg memenuhi baku mutu -----x100% Obyek sumber daya air yang dipantau	Sumber daya air yang dimaksud adalah sumber daya air laut dan sungai Jumlah sumberdaya air yang dipantau sebanyak 20 titik pantauan	Badan Lingkungan Hidup

				<ul style="list-style-type: none"> • BOD air laut 		<p>setiap tahunnya</p> <p>Terpantaunya kualitas air dengan parameter BOD = 6 mg/L COD = 50 mg/L</p> <p>Terpantaunya kualitas udara dengan parameter NO₂ = 400 mg/L SO₂ = 900 mg/L Sesuai Perbub No. 8 Tahun 2007</p>	
	<p>27. Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah</p>	<p>Jumlah perusahaan yang dibina yang telah menggunakan pengolahan limbah ----- x100% Banyaknya perusahaan yang dibina</p>		<p>36. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu (NO₂)</p> <p>37. Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah</p>	<p>Jumlah titik pantau udara yg memenuhi baku mutu -----x100% Jumlah titik pantau udara</p> <p>Jumlah perusahaan yang telah menggunakan pengolahan limbah -----x100% Banyaknya perusahaan yang dibina</p>		

